



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

LAPORAN
TAHUN 2018

JAKARTA 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan realisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dari unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sepanjang Tahun 2018 yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Adapun maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan informasi dan gambaran seputar kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Secara garis besar laporan ini menyajikan kegiatan pemerintah, operasional, pembangunan, realisasi atas pelaksanaan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran/ Petunjuk Operasional Kegiatan tersebut, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai respon terhadap isu dan kondisi aktual yang relevan terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan maupun perbaikan kegiatan di masa mendatang serta mendorong peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 14 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A Visi dan Misi Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional....	I - 2
B Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I - 2
C Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.....	I - 3
D Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Kepelabuhanan.....	I - 5
E Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.....	I - 6
F Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Kenavigasian.....	I - 8
G Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.....	I - 9
H Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 11
BAB II PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT.....	II - 13
I Program.....	II - 13
A Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	II - 13
B Bidang Pembangunan.....	II - 14
C Pelayanan Pihak Ke-3.....	II - 14
D Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	II - 15
II Realisasi.....	II - 15
A Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	II - 15
B Bidang Pembangunan.....	II - 44

C	Pelayanan Pihak Ke-3.....	II - 49
D	Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan.....	II - 50
BAB III	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG KEPELABUHANAN	III - 52
I	Program.....	III - 52
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	III - 52
B	Bidang Pembangunan.....	III - 53
C	Pelayanan Pihak Ketiga.....	III - 53
II	Realisasi.....	III - 54
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	III - 54
B	Bidang Pembangunan.....	III - 79
C	Pelayanan Pihak Ketiga.....	III - 94
D	Kegiatan Tidak Terlaksana	III - 95
BAB IV	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN	IV - 132
I	Program.....	IV - 132
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	IV - 132
B	Bidang Pembangunan.....	IV - 133
C	Pelayanan Pihak Ketiga.....	IV - 133
D	Kegiatan Lainnya.....	IV - 135
II	Realisasi.....	IV - 135
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	IV - 135
B	Bidang Pembangunan.....	IV - 151
C	Pelayanan Pihak Ketiga.....	IV - 157
D	Kegiatan yang tidak Terlaksana.....	IV - 164
E	Kegiatan Lainnya.....	IV - 165

BAB V	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG KENAVIGASIAN	V - 168
I	Program.....	V - 168
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	V - 168
B	Bidang Pembangunan.....	V - 169
C	Pelayanan Pihak Ketiga Di Bidang Kenavigasian.....	V - 169
D	Kegiatan Lainnya.....	V - 167
II	Realisasi.....	V - 170
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	V - 168
B	Bidang Pembangunan.....	V - 185
C	Pelayanan Pihak Ketiga Di Bidang Kenavigasian.....	V - 193
D	Kegiatan Lainnya.....	V - 194
E	Kegiatan yang tidak Terlaksana.....	IV - 200
BAB VI	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	VI - 202
I	Program.....	VI - 202
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	VI - 203
B	Bidang Pembangunan.....	VI - 203
C	Pelayanan Pihak Ketiga	VI - 203
D	Kegiatan Lainnya.....	VI - 203
E	Kegiatan yang tidak Terlaksana.....	VI - 204
II	Realisasi.....	VI - 204
A	Bidang Pemerintahan dan Operasional.....	VI - 201
B	Bidang Pembangunan.....	VI - 223
C	Pelayanan Pihak Ketiga.....	VI - 224
D	Kegiatan Lainnya.....	VI - 224
E	Kegiatan yang tidak Terlaksana.....	VI - 227

DAFTAR TABEL

I.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan.....	11
I.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan.....	12
II.1	Pelayanan Pihak Ketiga.....	14
II.2	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang Siupal Dan Siopsus.....	18
II.3	Monitoring Implementasi Sistem Informasi Angkutan Laut.....	20
II.4	Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (Ipka) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (<i>Check On The Spot</i>).....	23
II.5	Perkembangan Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2008 – 2018....	25
II.6	Perkembangan Angkutan Laut Perintis Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir	29
II.7	Jumlah Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun 2014 – 2018.....	42
II.8	Jumlah Dan Pangsa Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Tahun 2014 – 2018.....	43
II.9	Penyelesaian Pembangunan Kapal Perintis.....	44
II.10	Perusahaan Pelaksana Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat.....	46
II.11	Daftar Kapal Perintis Yang Docking Tahun 2018.....	47
II.12	Rekapitulasi Pelayanan Pihak Ketiga Tahun 2018.....	49
III.1	Materi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas.....	54
III.2	Materi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan..	55
III.3	Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan Dan Penundaan Kapal.....	56
III.4	Monitoring/Evaluasi Pembangunan Di Lingkungan Ditjen Hubla Pada Upt Ksop/Upp/Satker.....	59
III.5	Pendukung Kegiatan Strategis Di Bidang Perancangan Fasilitas	

	Pelabuhan.....	61
III.6	Evaluasi, Monitoring Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.....	63
III.7	Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Perairan Pada Tersus, Tuks Dan Bangunan Di Atas Air.....	65
III.8	Materi Focus Group Discussion Penggunaan Perairan Pada Tersus, Tuks Dan Bangunan Di Atas Air.....	66
III.9	Materi Bimbingan Teknis Perancangan, Pelaksanaan Dan .Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Bagi Kpa, Ppk Dan Staf Teknis..	68
III.10	Monitoring Klarifikasi Lapangan Dan Klarifikasi Data Teknis Perkerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Dan Pekerjaan Reklamasi Berdasarkan Sikk Dan Sikr.....	69
III.11	Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan....	70
III.12	<i>Workshop</i> Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan.....	72
III.13	Materi Kegaitan Bimtek Penetapan Dlkr Dan Dlkp.....	74
III.14	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus Dan Tuks Oleh Tim Teknis Terpadu.....	75
III.15	Materi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Kepelabuhanan.....	78
III.16	Materi Kegiatan Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan Tahun 2018.....	78
III.17	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Utama Pelabuhan.....	79
III.18	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut.....	83
III.19	Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.....	84
III.20	Pekerjaan Penyusunan Studi Survei Investigasi Dan Desain (Sid).....	86
III.21	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering Dan Desain (Ded) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan.....	86
III.22	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (Ukl-Upl) Pelabuhan Laut.....	86
III.23	Pengerukan Alur Pelayaran Di 3 Lokasi.....	87

III.24	Proyek Strategis Nasional.....	88
III.25	Perencanaan Dan Penyiapan Pengembangan Dan Pengoperasian Pelabuhan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Kpbu).....	89
III.26	Lokasi Yang Dibantu Oleh Pt. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).....	89
III.27	Kegiatan Predredge Sounding Pekerjaan Penggerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Tahun 2018.....	93
III.28	Pelayanan Pihak Ke-3 Yang Telah Ditetapkan Tahun 2018.....	94
III.29	Perencanaan Dan Penyiapan Pengembangan Dan Pengoperasian Pelabuhan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Kpbu)..	95
III.30	Lampiran SIKK.....	96
III.31	Lampiran SIKR.....	98
III.32	Lampiran BUP.....	99
III.33	Penetapan Pengoperasian 24 Jam.....	100
III.34	Izin Pembangunan Pelabuhan Umum.....	101
III.35	Pengelolaan Tuks.....	101
III.36	Jumlah Persetujuan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Tersus Tahun 2018.....	109
III.37	Izin Pengoperasian Tersus.....	113
III.38	Perpanjangan Pengoperasian Tersus.....	117
III.39	Izin Penggunaan Tersus Untuk Melayani Umum Sementara.....	121
III.40	Izin Penggunaan Tuks Untuk Melayani Umum Sementara.....	122
III.41	Izin Penetapan Lokasi.....	122
III.42	Izin Penggunaan Garis Pantai.....	126
IV.1	Daftar Lokasi Uji Petik Lebaran 1429 H	137
IV.2	Daftar Lokasi Uji Petik Nataru.....	138
IV.3	Daftar Lokasi Monitoring Dan Evaluasi Garis Muat Kapal, Stabilitas Dan Uji Coba Berlayar.....	140
IV.4	Daftar Lokasi Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Ism Code Sesuai Dengan Ncvs.....	141
IV.5	Daftar Lokasi Gerai Perijinan Dalam Rangka Percepatan Proses	

Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal Dan Sertifikasi Terhadap Kapal Tradisional.....	142
IV.6 Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran.....	146
IV.7 Daftar Lokasi Pengembangan Sid.....	151
IV.8 Daftar Lokasi Penambahan Perangkat Buku Pelaut.....	154
IV.9 Jumlah Layanan Rancang Bangun, Stabilitas&Garis Muat.....	158
IV.10 Jumlah Pengukuran, Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal.....	158
IV.11 Jumlah Dokumen Keselamatan Kapal.....	159
IV.12 Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran, Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan.....	160
IV.13 Jumlah Dokumen Kepelautan Tahun 2018.....	161
IV.14 Rekapitulasi Pnbp Pupk Tahun 2018.....	163
IV.15 Penerbita Surat Edaran Direktur Perkapalan Dan Kepelautan.....	164
V.1 Lokasi Monitoring Pembinaan Sdm Kenavigasian.....	170
V.2 Lokasi Kegiatan Konsinyering Terkait Kegiatan Sdm.....	172
V.3 Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian.....	174
V.4 Sop Telekomunikasi Pelayaran Pada 10 (Sepuluh) Lokasi.....	176
V.5 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Mentoring Operator Dan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran.....	177
V.6 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Teknis Armada Dan Pangkalan Kenavigasian.....	183
V.7 Docking Kapal Kenavigasian.....	185
V.8 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Sbnp).....	186
V.9 Pembangunan Dan Upgrade Global Maritime Distress And Safety System (Gmdss) Ta 2018.....	188
V.10 Pembangunan Dan Upgrade Upgrade Vessel Traffic System (Vts).....	189
V.11 Improvement System Gmdss (Ip) Base Untuk 8 Lokasi.....	190
V.12 Pengadaan Ais Base Station.....	191
V.13 Penetapan Alur Pelayaran.....	192
VI.2 Kegiatan Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (Psco).....	209
VI.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Awak Kapal Patroli.....	217

VI.4	Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran.....	219
VI.5	Kegiatan Pengadaan Rbb (Rigid Bouyant Boat) 6,7 Meter.....	223

DAFTAR GRAFIK

II.1	Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Tahun 2014 – 2018.....	19
II.2	Perkembangan Armada Kapal Nasional Tahun 2014 – 2018.....	20
II.3	Realisasi Muatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Tahun 2018.....	32
II.4	Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Tahun 2014 – 2018.....	40
II.5	Perkembangan Armada Kapal Nasional Tahun 2014 – 2018.....	41
II.6	Perkembangan Muatan Dalam Negeri Tahun 2014 – 2018.....	41
II.7	Perkembangan Muatan Luar Negeri Tahun 2014 – 2018.....	42
IV.1	Jumlah Layanan Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat.....	158
IV.2	Jumlah Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.....	159
IV.3	Jumlah Dokumen Keselamatan Kapal.....	160
IV.4	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran, Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan.....	161
IV.5	Jumlah Dokumen Kepelautan.....	162
IV.6	Rekapitulasi PNBP PUPK Tahun 2018.....	163
VI.1	Pelayanan Pihak Ketiga.....	224

DAFTAR GAMBAR

II.1	Monitoring SIUPAL, 10 Desember 2018 Panjang.....	20
II.2	Monitoring Implementasi Sistem Informasi Angkutan Laut.....	21
II.3	Monev PKKA, Samarinda,28 September 2018.....	22
II.4	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (Check On The Spot).....	24
II.5	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	24
II.6	Kapal Yang Dioperasikan Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2018.....	27
II.7	Pemudik Sepeda Motor KM. Dobosolo Tanjung Priok Tujuan Semarang, 18 Juni 2018.....	29
II.8	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis.....	30
II.9	Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban..... Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Tahun 2018.....	31
II.10	Kapal Tol Laut KM. Logistik Nusantara 4 Makassar 5 November 2018...	32
II.11	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak.....	33
II.12	Camara Nusantara Muat Sapi.....	34
II.13	Kapal Yacht Dari Berbagai Negera Meramaikan Sail Moyo.....	35
II.14	Rakornas Subsidi Kapal Perintis, Semarang 30 Oktober 2018.....	35
II.15	Rakor/FGD Tol Laut, Bandung 1-2 November 2018.....	36
II.16	Rapat Koordinasi Bidang Lala, Jakarta, 22-23 November.....	37
II.17	Rapat Kerja Nasional INKOP TKBM, Jakarta, 13 November.....	39
II.18	Bimtek TIK, Dumai, 14 November 2018.....	39
II.19	Hasil Pembangunan Kapal Perintis.....	46
II.20	Kapal Pelayaran Rakyat Dalam Tahap Konstruksi.....	47
III.1	Bimbingan Teknis di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas.....	55
III.2	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan.....	56
III.3	Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal.....	58

III.4	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan.....	59
III.5	Monitoring/Evaluasi Pembangunan di Lingkungan Ditjen Hubla pada UPT KSOP/UPP/Satker.....	61
III.6	Evaluasi, monitoring kinerja pelayanan operasional pelabuhan.....	64
III.7	Focus Group Discussion Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan....	65
III.8	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air.....	66
III.9	Focus Group Discussion Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air.....	67
III.10	Bimbingan Teknis Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan bagi KPA, PPK dan Staf Teknis.....	67
III.11	Monitoring klarifikasi lapangan dan klarifikasi data teknis perkerjaan pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan dan pekerjaan reklamasi berdasarkan SIKK dan SIKR.....	70
III.12	Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tahap I dan Tahap II.....	72
III.13	Kegiatan Workshop Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan..	74
III.14	Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Batas-Batas Daerah DLKr dan DLKp.....	75
III.15	Monitoring dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus dan TUKS oleh Tim Teknis Terpadu.....	77
III.16	Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kepelabuhanan.....	78
III.17	Materi Kegiatan Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan Tahun 2018.....	79
III.18	Studi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Ahli Perawatan Fasilitas Pelabuhan.....	90
III.19	The Development Of Belawan Port Project Phase I.....	91
III.20	Kegiatan Predredge Sounding Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan tahun 2018.....	93

IV.1	Kegiatan Penyusunan Program di Lingkungan Perkapalan dan Kepelautan.....	136
IV.2	Kegiatan Penyusunan Target dan Verifikasi Data PNBP Jasa Perkapalan..	136
IV.3	Kegiatan Uji Petik Lebaran 1429 H.....	138
IV.4	Kegiatan Uji Petik NATARU.....	139
IV.5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan.....	139
IV.6	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Class Autorisasi Terkait Statutory.....	140
IV.7	Kegiatan Monev Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar.....	141
IV.8	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISM Code sesuai dengan NCVS.....	142
IV.9	Kegiatan Gerai Perijinan Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal Tradisional.....	143
IV.10	Kegiatan Pengukuhan Auditor, Pendidik dan Praktisi Medis.....	143
IV.11	Kegiatan Pengukuhan Auditor ISM Code.....	144
IV.12	Kegiatan Pengukuhan Ahli Ukur Kapal Metode dalam Negeri.....	145
IV.13	Kegiatan Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.....	145
IV.14	Kegiatan Bimbingan Teknis PM 29 Tahun 2014.....	146
IV.15	Kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran.....	147
IV.16	Kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Konstruksi Kapal Berbahan Fiber Glass.....	147
IV.17	Kegiatan Penyusunan LKIP dan Laptah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Tahun 2017.....	148
IV.18	Kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Implementasi MLC 2006	149
IV.19	Kegiatan Penyiapan Bahan Sidang IMO terkait Keselamatan Kapal dan Publikasi IMO.....	150
IV.20	Kegiatan In House Training DPA.....	150
IV.21	Kegiatan Consultative Meeting Persiapan Bahan Sidang IMO MEPC 72 dan 73.....	151
IV.22	Perangkat Sistem informasi SID yang telah Terpasang.....	152
IV.23	Kegiatan Workshop dan Pelatihan Sistem Informasi SID.....	152
IV.24	UPT Penerima Buku Pelaut.....	154
IV.25	Perangkat Buku Pelaut sebelum Terpasang.....	155

IV.26	Kegiatan Instalasi Perangkat Buku Pelaut.....	155
IV.27	Perangkat Pelaut yang Telah Terpasang.....	155
IV.28	Kegiatan Training Peoperasian Buku Pelaut.....	155
IV.29	Kegiatan Workshop dan Pelatihan Sistem Informasi Buku Pelaut Online..	156
IV.30	Kegiatan Workshop dan Pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) Gelombang I.....	157
IV.31	Kegiatan Workshop dan Pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) Gelombang I.....	157
IV.32	Kegiatan Oversight Kerja Sama DJPL dengan PT. BKI (Persero).....	166
IV.33	Kegiatan Rakornis Direktorat Perkapalan dan Kepelautan 2018.....	167
V.1	Monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian di Disnav Samarinda dan Disnav Surabaya.....	171
V.2	Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kenavigasian Tahun 2018.....	174
V.3	Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian tanggal 15 s.d.16 November 2018 Di Hotel Whyndam – Surabaya.....	175
V.4	Penyertaan Pelatihan Operator VTS sesuai IALA V.103/1.....	179
V.5	Pelatihan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tk-III.....	179
V.6	Buku Sarana Telekomunikasi Pelayaran.....	180
V.7	Pelatihan Refreshment Training Simulator.....	180
V.8	Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian.....	181
V.9	Peningkatan Kompetensi Kartografi Kenavigasian179.....	182
V.10	Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Kalianget, Kijang, Tanjung Pinang dan Probolinggo.....	182
V.11	Penyelenggaraan The 3rd Implementation Committee Meeting On Joint Hydrographic Survey in The Straits of Malacca and Singapore.....	182
V.12	Docking Kapal Kenavigasian.....	186
V.13	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).....	188
V.14	Upgrade GMDSS SROP Kelas III Kuala Tanjung.....	189
V.15	VTS Merak, VTS Panjang dan VTS Tarakan.....	190
V.16	Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi.....	191
V.17	Pengadaan AIS Base Station.....	191

V.18	Penetapan Alur Pelayaran.....	192
V.19	Survey, disiapkan oleh PT. Mulia Arthaloka.....	195
V.20	Kegiatan Feasibility Study (FS) Pembangunan Jetty Menara Suar Wilayah Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, disiapkan oleh PT. Hegar Daya Consultant.....	196
V.21	Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas Menara Suar Pulau Sebatik Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, disiapkan oleh PT. Rayasurverindo Tirtasarana Konsultan Teknik.....	196
V.22	Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas Menara Suar Pulau Mangkalihat Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, disiapkan oleh PT. Bahari Jaya Sejahtera.....	197
V.23	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Basic Safety Training (BST) pada tanggal 17 s/d 25 Oktober 2018 berjumlah 40 peserta bertempat di Pertamina Training Maritim Center..	197
V.24	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Diklat Marine Surveyor Tk. Dasar di BKI Academy.....	197
V.25	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Radar ARPA dan Radar Simulator di Pertamina Training Maritim Center	195
V.26	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) di Pertamina Training Maritim Center.....	198
V.27	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Electrician di Pertamina Training Maritim Center.....	198
V.28	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Medical First Aid (MFA) di Pertamina Training Maritim Center	198
V.29	Kajian Kondisi Teknis Perawatan Kapal Negara Kenavigasian Pada Distrik Navigasi Kelas II Semarang dan Distrik Navigasi Kelas II Jayapura.....	199
V.30	Kajian Kondisi Teknis Perawatan Kapal Negara Kenavigasian Pada Distrik Navigasi Pada Distrik Navigasi Kelas II Sabang dan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang.....	200
VI.1	Dokumentasi Peningkatan Keterampilan Isps Code.....	204
VI.2	Dokumentasi Bimbingan Teknis Boarding Officer.....	205
VI.3	Dokumentasi Kegiatan Pembentukan Ppns Reguler (Pola 400 Jampel).....	206
VI.4	Dokumentasi Kegiatan Pembentukan Petugas Intelijen Ditjen Hubla Cilendek, Bogor.....	207

VI.5	Dokumentasi Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Kelembagaan Penjagaan Laut Dan Pantai.....	207
VI.6	Dokumentasi Penyusunan Pedoman Tata Cara Pendampingan Hukum Dan Penunjukan Ahli Bidang Pelayaran.....	208
VI.7	Dokumentasi Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.....	209
VI.8	Dokumentasi Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (Psco).....	210
VI.9	Dokumentasi Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penanganan Muatan Barang Berbahaya Pada Pelayaran.....	211
VI.10	Dokumentasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya.....	212
VI.11	Dokumentasi Peningkatan Keterampilan Penyelam Kplp Bidang Salvage Dan Pba.....	213
VI.12	Dokumentasi Latihan Nasional Penanggulangan Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak (Marine Pollution Exercise).....	214
VI.13	Dokumentasi Focus Group Discussion (Fgd) Rapat Pusat Komando Dan Pengendalian Nasional (Puskodalnas).....	215
VI.14	Dokumentasi Rapat Kerja Teknis Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (Rakernis Kplp).....	216
VI.15	Dokumentasi Konsinyering Penyusunan Standard Operational Procedure (Sop) Subbidang Sarana Dan Prasarana Direktorat Kplp.....	216
VI.16	Dokumentasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Awak Kapal Patroli Kplp.....	217
VI.17	Dokumentasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pemeliharaan Kapal Patroli Kplp.....	218
VI.18	Dokumentasi Sosialisasi Keselamatan Pelayaran.....	219
VI.19	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Lkip Dan Laptah.....	220
VI.20	Dokumentasi Serah Terima Operasional Kapal Patroli Kelas Iii Dan Rib (Rigid Inflatable Boat) 12 Meter.....	221
VI.21	Dokumentasi Studi Kelayakan Crane Kapal Kelas I.....	221
VI.22	Dokumentasi Studi Retrovit.....	222
VI.23	Kegiatan Pengadaan RBB (Rigid Bouyant Boat) 6,7 Meter.....	223
VI.24	Dokumentasi Port Security Regulatory Deep Dive Group Discussion.....	225

VI.25	Dokumentasi Kunjungan Ke Fasilitas Pelabuhan Oleh U.S. Coast Guard Dan Port Security Advanced Audit Workshop.....	226
VI.26	Dokumentasi Passenger Screening Skills Course.....	227

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya, dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan kementerian, pelaksanaan kebijakan kementerian, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan administrasi di bidangnya. Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mutlak untuk diwujudkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pimpinan satuan organisasi/ kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berisikan capaian kinerja selama tahun yang bersangkutan. Dengan demikian disusunlah Laporan Tahunan ini sebagai sarana untuk melaporkan pemantauan terhadap pencapaian kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2018 serta program kerja tahun 2019.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan data-data informasi terkait visi dan misi, program kerja besar tarealisasi kegiatan dan permasalahan beserta upaya pemecahan masalah di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 terkait kegiatan pemerintahan, kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan, sedangkan tujuan penyusunan laporan tahunan adalah selain memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, juga untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya dan tersedianya program kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik pada masing-masing Direktorat dalam tahun 2018.

A. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

1. Visi Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional

Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulangpunggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Misi Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional

- a. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/ dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
- c. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan.
- d. Menyelenggarakan perlindungan maritim diperairan nusantara.
- e. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut.

2. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiridari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
- d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- e. Direktorat Kenavigasian;
- f. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

1. Tugas Pokok Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

2. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri

dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- d. Penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar provinsi dan/atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtangga.

3. Susunan Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri dari:

- a. Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut;
- d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut;
- e. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPELABUHANAN

1. Tugas Pokok Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengurukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

2. Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengurukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengurukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengurukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- d. Penyiapan pemberian perizinan dan standardisasi penyelenggaraan pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengurukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengurukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

3. Susunan Organisasi Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan;
- b. Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan;
- c. Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;
- d. Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- e. Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan;
- f. Subbagian Tata Usaha.

E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

1. Tugas Pokok Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

2. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal,

pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;

- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- d. Penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (*ISM-Code*), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (*continuous synopsis record*);
- e. Penyiapan pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. Penyiapan penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
- g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

3. Susunan Organisasi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kelaikan Kapal;
- b. Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
- c. Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal;
- d. Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal;
- e. Subdirektorat Kepelautan;
- f. Subbagian Tata usaha.

F. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KENAVIGASIAN

1. Tugas Pokok Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

2. Fungsi Direktorat Kenavigasian

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- d. Penyiapan pemberian perizinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;

- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kerumah tanggaan Direktorat.

3. Susunan Organisasi Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perambuan;
- b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;
- c. Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian;
- d. Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

G. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

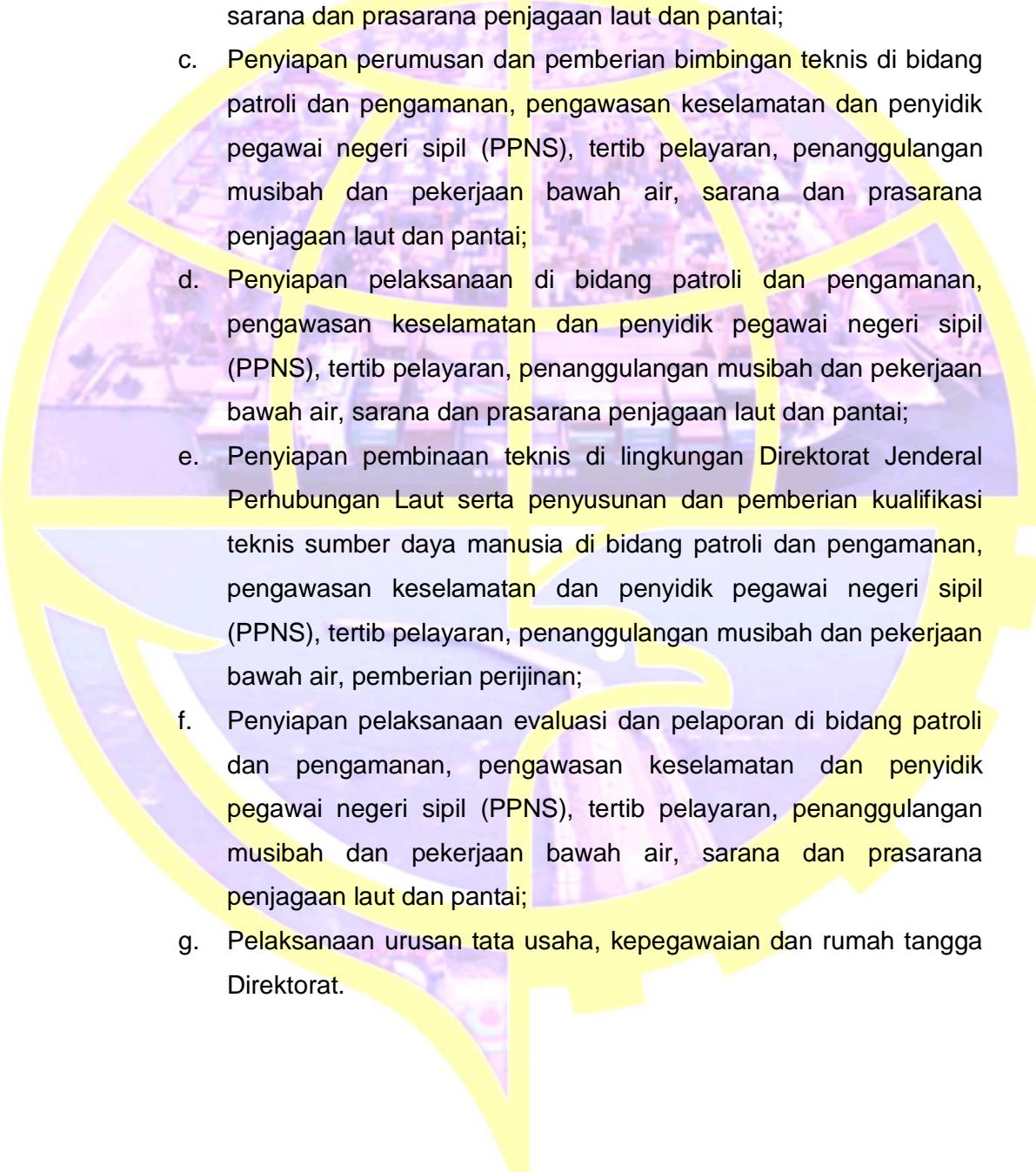
1. Tugas Pokok Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana laut dan pantai.

2. Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penjagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

- 
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
 - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
 - d. Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
 - e. Penyiapan pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pemberian perijinan;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3. Susunan Organisasi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Panjagaan Laut dan Pantai terdiri dari:

- a. Subdirektorat Patroli dan Pengamanan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Subdirektorat Tertib Pelayaran;
- d. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

H. SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2018 yaitu 14.357 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.1 Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2017	2018
1.	S3	3	3
2.	Spesialis	29	2
3.	S2	759	867
4.	S1	3.653	3.489
5.	D4	174	190
6.	D3	1.360	1.371
7.	D2	27	28
8.	D1	80	77
9.	SLTA	7.985	7.809
10	SLTP	529	419
11.	SD	108	102
TOTAL		14.707	14.357

- 2) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.2 Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2017	2018
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	7	3
3.	IV/c	19	20
4.	IV/b	67	77
5.	IV/a	279	289
6.	III/d	1059	1.195
7.	III/c	1531	1.690
8.	III/b	3440	3.392
9.	III/a	2379	2.357
10.	II/d	2033	1.967
11.	II/c	1633	1.588
12.	II/b	1891	1.467
13.	II/a	346	293
14.	I/d	9	10
15.	I/c	11	6
16.	I/b		2
17.	I/a	3	1
TOTAL		14.707	14.357

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

I. PROGRAM

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Rede.
2. Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Kapal Ternak.
3. Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Tol Laut.
4. Kajian Pengelolaan Kapal Kontainer dan Ternak.
5. Kajian Pengelolaan Kapal Perintis dan Rede.
6. Kajian Kebutuhan Trayek, Tipe Kapal dan Penempatan Kapal Untuk Angkutan Rede.
7. Kajian Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perantara Jual Beli Dan Atau Sewa Kapal (Ship Broker).
8. Kajian Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ships Repairing and Maintenance).
9. Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Kontainer.
10. Kajian Teknis Sistem Monitoring Digital Terhadap Pergerakan Kontainer Muatan Tol Laut.
11. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang SIUPAL Dan SIOPSUS.
12. Monitoring Implementasi Sistem Informasi Angkutan Laut.
13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perusahaan Keagenan Kapal Asing dan Realisasi Wilayah Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Dalam Negeri (Check On The Spot).
14. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (Check On The Spot).
15. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
16. Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri.

17. Penyelenggaraan Mudik Gratis Sepeda Motor Dengan Kapal Laut.
18. Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis.
19. Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut.
20. Pelayanan Angkutan Kapal Ternak.
21. Penyelenggaraan Sail Indonesia.
22. Rakornas Subsidi Kapal Perintis.
23. Rapat Koordinasi Tol Laut.
24. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Lala.
25. Pembinaan terhadap kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan.
26. Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
27. Penyajian Data Angkutan Laut dan Pencetakan Buku Informasi.
28. Perawatan CCTV dan Command Center Pemantauan Angkutan Laut, Pemeliharaan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pengembangan Sistem Inaportnet dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPADU);
29. Pembangunan Kapal Pelayaran Pelayaran Rakyat (Belanja Barang Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah);
30. Docking Kapal Perintis.

B. Bidang Pembangunan

Pembangunan Kapal Perintis (*Multi Years Contract*)

C. Pelayanan Pihak Ketiga

Tabel II.1 Pelayanan Pihak Ketiga

NO	PELAYANAN PIHAK KETIGA
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2.	Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus
3.	Spesifikasi Kapal
4.	Pembukaan Kantor Cabang
5.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur
6.	Persetujuan Omisi trayek
7.	Persetujuan Substitusi Kapal
8.	Persetujuan DeviasiTrayek

NO	PELAYANAN PIHAK KETIGA
9.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
10.	Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah
11.	Persetujuan Keagenan Kapal Asing
12.	Izin Penggunaan Kapal Asing
13.	Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal

D. Kegiatan Lainnya

Tidak ada kegiatan.

II. REALISASI

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Rede

Telah dilaksanakan Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Rede oleh konsultan PT. Mulia Arthaloka. Tujuan kajian ini adalah untuk menetapkan rumusan kebijakan pengembangan armada nasional khususnya kapal rede untuk kebutuhan dan desainnya.

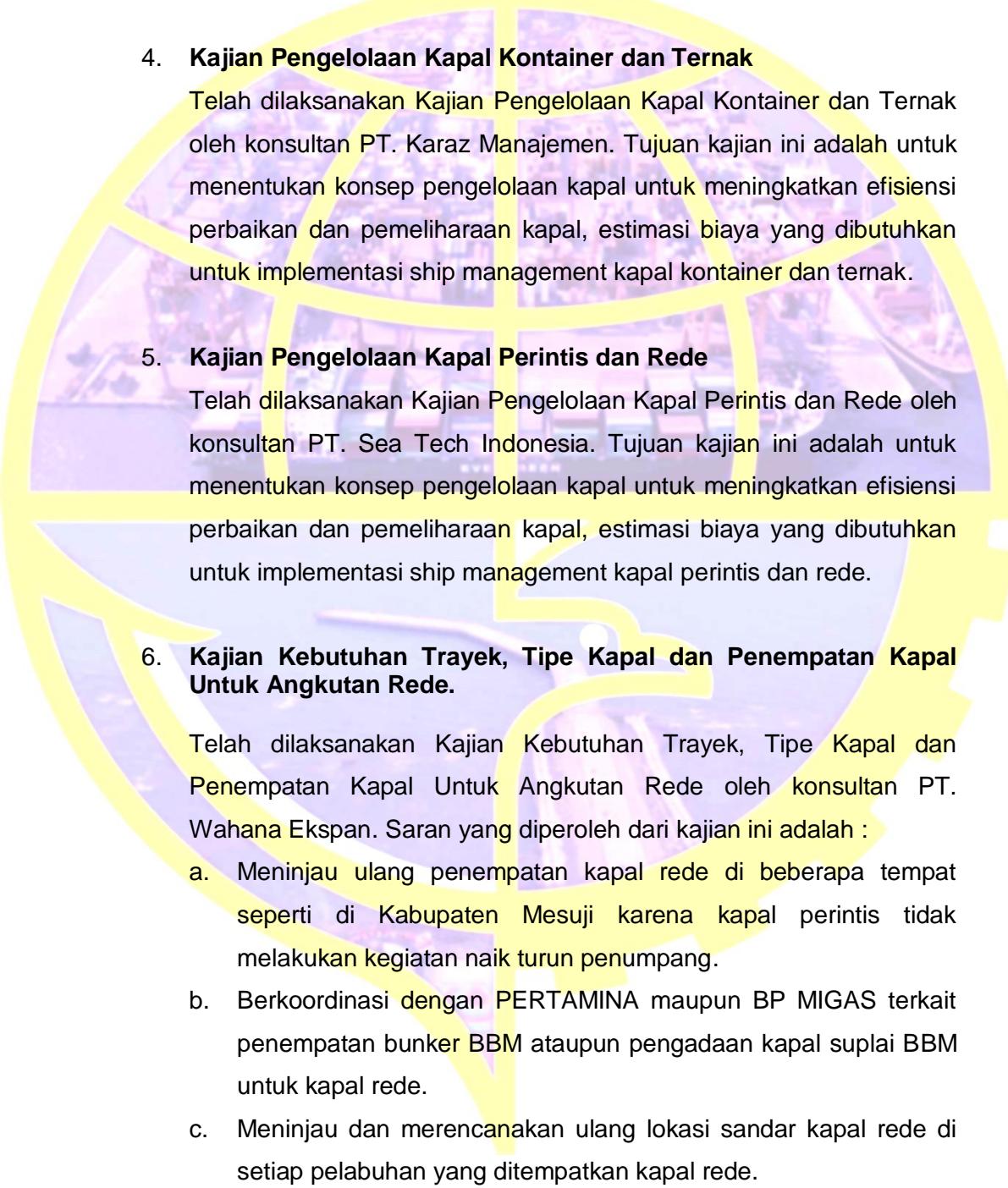
2. Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Kapal Ternak

Telah dilaksanakan Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Kapal Ternak oleh konsultan PT. Mega Ocean Jaya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengelompokkan biaya tetap, biaya tidak tetap dan biaya overhead dalam rangka menentukan besaran subsidi pengoperasian kapal ternak. Selain itu juga untuk menentukan nilai subsidi per mil per ekor ternak dan nilai subsidi per trayek. Kajian ini menghasilkan output berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak.

3. Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Tol Laut

Telah dilaksanakan Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Tol Laut oleh konsultan PT. Adizha Marathon. Tujuan kajian ini adalah untuk mengelompokkan biaya tetap, biaya tidak tetap dan biaya overhead dalam rangka menentukan besaran subsidi

penyelenggaraan angkutan barang di laut. Kajian ini menghasilkan output berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation).



4. **Kajian Pengelolaan Kapal Kontainer dan Ternak**

Telah dilaksanakan Kajian Pengelolaan Kapal Kontainer dan Ternak oleh konsultan PT. Karaz Manajemen. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan konsep pengelolaan kapal untuk meningkatkan efisiensi perbaikan dan pemeliharaan kapal, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk implementasi ship management kapal kontainer dan ternak.

5. **Kajian Pengelolaan Kapal Perintis dan Rede**

Telah dilaksanakan Kajian Pengelolaan Kapal Perintis dan Rede oleh konsultan PT. Sea Tech Indonesia. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan konsep pengelolaan kapal untuk meningkatkan efisiensi perbaikan dan pemeliharaan kapal, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk implementasi ship management kapal perintis dan rede.

6. **Kajian Kebutuhan Trayek, Tipe Kapal dan Penempatan Kapal Untuk Angkutan Rede.**

Telah dilaksanakan Kajian Kebutuhan Trayek, Tipe Kapal dan Penempatan Kapal Untuk Angkutan Rede oleh konsultan PT. Wahana Ekspan. Saran yang diperoleh dari kajian ini adalah :

- a. Meninjau ulang penempatan kapal rede di beberapa tempat seperti di Kabupaten Mesuji karena kapal perintis tidak melakukan kegiatan naik turun penumpang.
- b. Berkoordinasi dengan PERTAMINA maupun BP MIGAS terkait penempatan bunker BBM ataupun pengadaan kapal suplai BBM untuk kapal rede.
- c. Meninjau dan merencanakan ulang lokasi sandar kapal rede di setiap pelabuhan yang ditempatkan kapal rede.

- d. Mempertimbangkan kebijakan untuk penggunaan kapal rede sebagai angkutan non rede mengingat minmnya jam dan frekuensi operasi pelayanan kapal rede.
- 7. Kajian Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perantara Jual Beli Dan Atau Sewa Kapal (Ship Broker)**
- Telah dilaksanakan Kajian Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perantara Jual Beli Dan Atau Sewa Kapal (Ship Broker) oleh konsultan PT. Adhiza Marathon. Output kajian ini adalah Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perantara Jual Beli Dan Atau Sewa Kapal (Ship Broker).
- 8. Kajian Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ships Repairing and Maintenance)**
- Telah dilaksanakan Kajian Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ships Repairing and Maintenance) oleh konsultan PT. Amethys Utama. Output kajian ini adalah Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Pengusahaan dan Penyelenggaraan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ships Repairing and Maintenance).
- 9. Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Kontainer**
- Telah dilaksanakan Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Kontainer oleh konsultan PT. Mega Ocean Jaya. Tujuan kajian ini adalah untuk menetapkan rumusan kebijakan pengembangan armada nasional khususnya kapal kontainer untuk kebutuhan dan desainnya.
- 10. Kajian Teknis Sistem Monitoring Digital Terhadap Pergerakan Kontainer Muatan Tol Laut**

Telah dilaksanakan Kajian Teknis Sistem Monitoring Digital Terhadap Pergerakan Kontainer Muatan Tol Laut. Tujuan kajian ini adalah untuk mengembangkan sistem monitoring secara on line.

11. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang SIUPAL Dan SIOPSUS

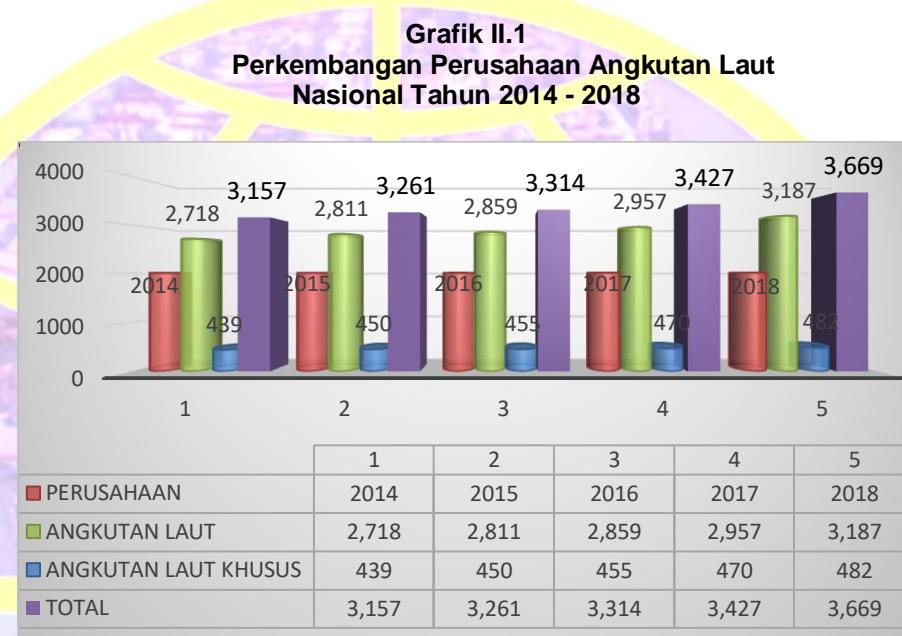
Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang SIUPAL Dan SIOPSUS dengan pelaksaaan sebagai berikut :

Tabel II.2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang SIUPAL Dan SIOPSUS

No.	Tanggal	Lokasi
1.	5 Februari 2018	Samarinda
2.	12 Februari 2018	Jakarta
3.	24 Maret 2018	Surabaya
4.	11 April 2018	Semarang
5.	8 Mei 2018	Balikpapan
6.	23 Juni 2018	Tanjung Pinang
7.	5 Juli 2018	Makassar
8.	11 Agustus 2018	Denpasar
9.	9 September 2018	Medan
10.	21 Oktober 2018	Bitung
11.	17 November 2018	Batam
12.	10 Desember 2018	Panjang

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang SIUPAL Dan SIOPSUS menghasilkan output sebagai berikut :

a. Perkembangan perusahaan angkutan laut nasional :



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

b. Perkembangan armada nasional :

Jumlah armada kapal nasional mengalami pertumbuhan. Sampai dengan tahun 2018 jumlah armada kapal nasional telah mencapai 16.502 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 194 unit atau 1,19 %. Gambaran perkembangan armada kapal nasional sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik II.2**Perkembangan Armada Kapal Nasional Tahun 2014 - 2018**

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut



12. Monitoring Implementasi Sistem Informasi Angkutan Laut

Telah dilaksanakan Monitoring Implementasi Sistem Informasi Angkutan Laut dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel II.3 Monitoring Implementasi Sistem Informasi Angkutan

No.	Tanggal	Lokasi
1.	6 Juli 2018	Tanjung Perak
2.	18 Juli 2018	Belawan
3.	26 Juli 2018	Makassar
4.	2 Agustus 2018	Tanjung Emas
5.	2 Agustus 2018	Tanjung Priok
6.	9 Agustus 2018	Banjarmasin
7.	16 Agustus 2018	Bitung
8.	16 Agustus 2018	Panjang
9.	29 Agustus 2018	Ambon
10.	30 Agustus 2018	Banten
11.	6 September 2018	Palembang
12.	6 September 2018	Pontianak
13.	12 September 2018	Gresik
14.	13 September 2018	Teluk Bayur
15.	20 September 2018	Balikpapan
16.	27 September 2018	Sorong



13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perusahaan Keagenan Kapal Asing dan Realisasi Wilayah Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Dalam Negeri (Check On The Spot)

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perusahaan Keagenan Kapal Asing dan Realisasi Wilayah Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Dalam Negeri (Check On The Spot). Monev keagenan kapal asing yang dilaksanakan pada tahun 2018 dilakukan pada 31 pelabuhan yang disinggahi kapal asing, sebagai berikut :

Banten, Palembang, Tg. Balai Karimun, Pontianak, Teluk Bayur, Tg. Perak, Samarinda, Pekanbaru, Batam, Ternate, Tarakan, Belawan, Dumai, Kotabaru, Sorong, Kuala Tanjung, Bitung, Panjang, Banjarmasin, Balikpapan, Pulau Sambu, Makassar, Tg. Emas, Tg. Priok, Amurang, Kep. Seribu, Cilacap, Sei Pakning, Marunda, Kintap dan Kupang. Monitoring dilakukan di Kantor OP/KSOP, Kantor Pelindo dan Kantor INSA/Perusahaan Pelayaran.



14. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (Check On The Spot).

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (Check On The Spot). Adapun Izin Penggunaan Kapal Asing Angkutan Laut Dalam Negeri menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri. Hasil monitoring IPKA sebagai berikut :

Tabel II.4 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (Check On The Spot).

No.	Tanggal	Kapal	Lokasi
1.	5-7 Maret 2018	Cable Laying Barge Networker	Batam
2.	4-6 April 2018	DN 10, DN 30 dan DN 58	Makassar
3.	3-5 Mei 2018	CL. Bold	Balikpapan

No.	Tanggal	Kapal	Lokasi
		Maverick	
4.	7-10 Mei 2018	PGS Apollo, Thor Alpha dan Gokhan Bey	Kupang
5.	14-16 Mei 2018	Zeynep Sultan	Amurang
6.	21-23 Mei 2018	Yazin Bey	Tulehu
7.	22-24 Mei 2018	Onur Sultan	Belawan
8.	4-6 Juni 2018	Hilong 106, Tian Niu dan Tian Niu Ting	Tanjung Balai Karimun
9.	6-7 Juli 2018	Onur Sultan	Belawan
10.	11-13 Juli 2018	Nezih Bey	Amurang
11.	19-21 Juli 2018	Ham 318, Coastal Ace dan Atremis	Benoa



Belawan, 22-24 Mei 2018

CL. Bold Maverick, Balikpapan

Gambar II.4 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri (Check On The Spot).

15. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Telah dilaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak, khususnya untuk Jasa Pengawasan Bongkar Muat di Pelabuhan. Lokasi evaluasi adalah Balikpapan, Cirebon, Selat Panjang, Teluk Bayur dan Dumai.

	
Gambar Evaluasi PNBP, Balikpapan 4-7 Oktober 2018	Gambar Evaluasi PNBP, Teluk Bayur 3-5 November 2018
Gambar II.5 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak	

14. Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri

Telah diselenggarakan Kewajiban Pelayanan Umum Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri. Dalam rangka kesinambungan pelayanan angkutan laut penumpang ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah menugaskan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Penugasan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018.

Untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri tahun 2018, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp 1.867.769.740.000,00. Jumlah kapal yang dioperasikan sebanyak 26 kapal dengan frekuensi pelayanan 266 voyage.

Tabel II.5
Perkembangan Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2008 – 2018
(dalam miliar rupiah)

NO	TAHUN	USULAN	DISETUJUI			REALISASI
			APBN	APBN-P	TOTAL	
1	2008	986	850	-	850	790
2	2009	837	600	-	600	600
3	2010	869	600	-	600	600
4	2011	900,8	872	-	872	800
5	2012	897	897	-	897	897
6	2013	826	726	-	726	726
7	2014	1.000	872	-	872	872
8	2015	1.602	1.602	-	1.602	1.602
9	2016	1.786	1.786	-	1.786	1.786
10	2017	2.060	2.060	-	2.060	2.060
11	2018	-	-	-	-	1.867

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
(dibuat tabel berisi tanggal dan lokasi) : Foto

Jumlah muatan penumpang kapal PT. PELNI selama tahun 2018 sebanyak 3.614.988 orang dan jumlah muatan barang sebanyak 56.154 ton/m3. Produksi penumpang mengalami peningkatan 7,64 % terhadap jumlah penumpang tahun 2017. Sedangkan produksi barang meningkat 13,04 % terhadap jumlah barang tahun 2017.

Kapasitas Penumpang	Nama Kapal	Gambar Kapal
3000 penumpang	1. KM. Labobar	

2000 penumpang	1. KM. Umsini 2. KM. Kelud 3. KM. Lambelu 4. KM. Doronloda 5. KM. Nggapulu 6. KM. Bukit Siguntang 7. KM. Sinabung 8. KM. Tidar 9. KM. Gunung Dempo 10. KM. Kerinci	
1000 penumpang	1. KM. Kelimutu 2. KM. Lawit 3. KM. Tatamailau 4. KM. Sirimau 5. KM. Awu 6. KM. Leuser 7. KM. Binaiya 8. KM. Bukit Raya 9. KM. Tilongkabila	
Tipe	Nama Kapal	Gambar Kapal
500 penumpang	1. KM. Sangiang 2. KM. Pangrango	

Tipe	Nama Kapal	Gambar Kapal
3 in 1	1. KM. Dobonsolo 2. KM. Ciremai	



Gambar II.6 Kapal Yang Dioperasikan Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2018



Gambar II. 7 Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2018

Keterangan :

- : Trayek untuk kapal kapasitas 1000 penumpang.
- : Trayek untuk kapal kapasitas 2000 penumpang.
- : Trayek untuk kapal kapasitas 500 penumpang.

17. Penyelenggaraan Mudik Gratis Sepeda Motor Dengan Kapal Laut

Telah diselenggarakan Mudik Gratis Sepeda Motor Dengan Kapal Laut bagi pengguna sepeda motor dengan kapal laut dengan rute Jakarta (Tg.Priok) - Semarang (Tg.Emas) pada Arus Mudik (H-8 sampai dengan H-2). Realisasi tahun 2018 mencapai 4.167 unit motor dan 9.429 penumpang atau meningkat 67,4% untuk motor dan 77,03% untuk penumpang dibandingkan penyelenggaraan tahun 2017 dengan realisasi 2.488 unit motor dan 5.326 penumpang. Sedangkan Penyelenggaraan Arus Balik (H+1 sd.

H+7) dengan rute Semarang (Tg.Emas) – Jakarta (Tg. Priok) 3.097 unit motor dan 7.147 penumpang atau meningkat 37.21% untuk motor dan 47.36% untuk penumpang dibandingkan penyelenggaraan tahun 2017 dengan realisasi 2.257 unit motor dan 4.850 penumpang.



Gambar II.7 Pemudik Sepeda Motor KM. Dobosolo Tanjung Priok Tujuan Semarang, 18 Juni 2018

18. Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis

Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis ke daerah-daerah terisolir, terpencil, pulau-pulau terluar dan perbatasan. Pada tahun 2018 pemerintah menyediakan anggaran subsidi operasi angkutan laut perintis sebesar Rp1.102.328.944.001,00. Anggaran subsidi tersebut digunakan untuk mensubsidi 113 kapal perintis yang beroperasi pada 113 trayek. Jumlah pelabuhan singgah perintis sebanyak 498 pelabuhan.

Tabel II.6
Perkembangan Angkutan Laut Perintis Selama 5 (lima) tahun Terakhir

PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS						
NO	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Anggaran (Rp)	537.376.623.8 59	580.000.000.0 00	809.565.323.1 10	1.146.396.232.000	1.102.328.944.001
2.	Jumlah Kapal	84	86	94	96	113
3.	Jumlah Pelabuhan :					
	Pelabuhan Pangkal	34	35	40	40	41
	Pelabuhan Singgah	526	507	527	527	498
4.	Jumlah Voyage	2.117	2.140	2.776	2.687	2.914

PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS						
NO	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
5.	Penempatan Kapal :					
	Bagian Barat Indonesia	13 Kpl (15%)	19 Kpl (22,09%)	20 Kpl (20,83%)	21 Kpl (21,88%)	19 Kpl (16,81%)
	Bagian Timur Indonesia	71 Kpl (85%)	67 Kpl (77,91%)	76 Kpl (79,17%)	75 Kpl (78,12%)	94 Kpl (83,19%)
6.	Kepemilikan Kapal :					
	Kapal Ditjen Hubla	45	47	54	57	107
	Kapal Swasta	35	35	42	39	6
	Kapal Pemda	4	4	0	0	0
7.	Jumlah Hari Operasi	27.657 Hari	28.687 Hari	34.879 Hari	34.779	35.936
8.	Realisasi Angkutan :					
	Penumpang (Orang)	531.560	537.113	311.543	1.384.798	70.224
	Barang (Ton)	265.000	127.677	275.155	276.896	118.902

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

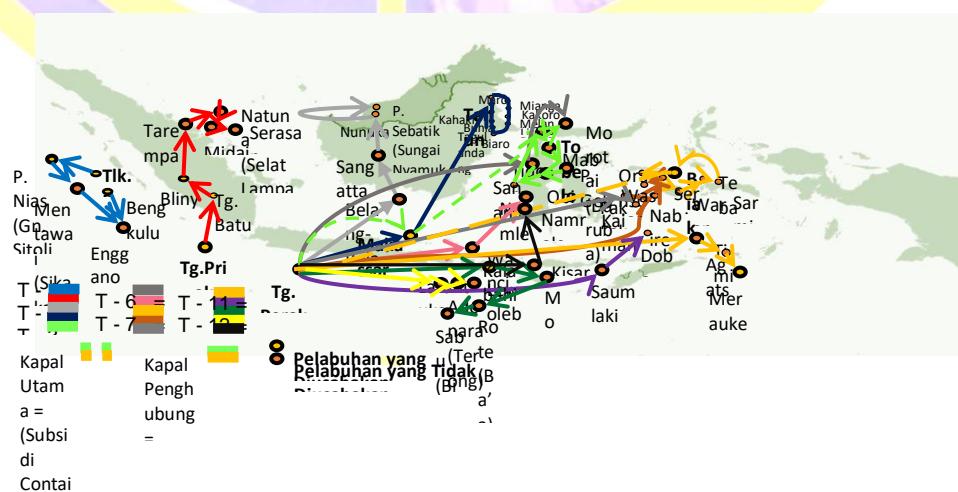
Produksi muatan penumpang angkutan laut perintis selama tahun 2018 mengangkut 70.224 penumpang. Sedangkan produksi muatan barang angkutan laut perintis pada tahun 2018 mencapai 118.902 ton/m3.



19. Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut.

Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Barang Tol Laut yang dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah

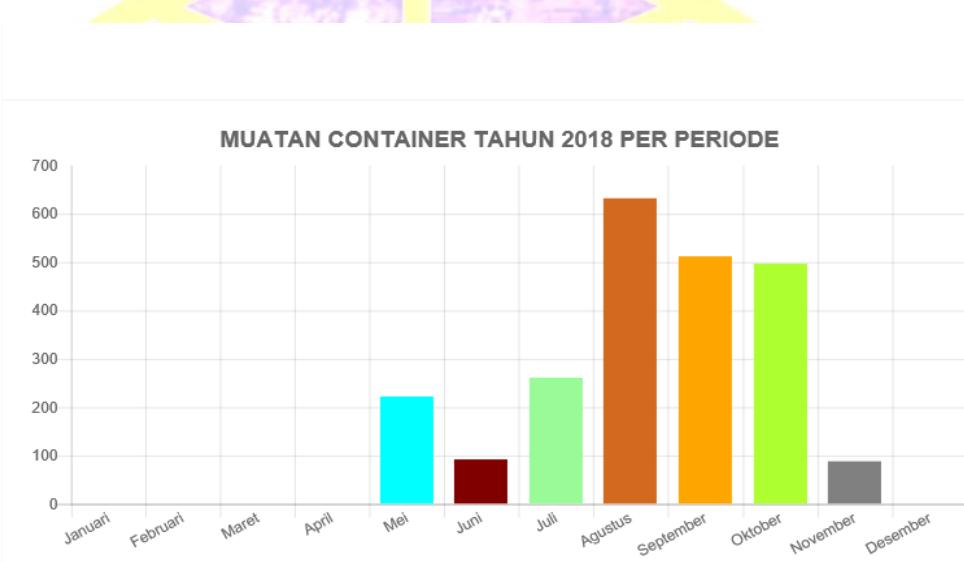
Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan tol laut. Tindak lanjut Peraturan Presiden, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018. Dalam menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang selama tahun 2018, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 447.628.808.000,00. Anggaran tersebut untuk membiayai operasional 19 kapal yang melayani 18 trayek. Sedangkan pelabuhan yang dilayani meliputi 3 pelabuhan pangkal, 3 pelabuhan transhipment dan 55 pelabuhan singgah. Mekanisme pelaksanaan kewajiban pelayanan umum angkutan barang terbagi dalam dua cara, penunjukkan langsung dan pelelangan umum. Mekanisme penunjukkan langsung dengan menugaskan PT. PELNI.



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

**Gambar II.9 Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Tahun 2018**

**Grafik II.3
Realisasi Muatan Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Tahun 2018**



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

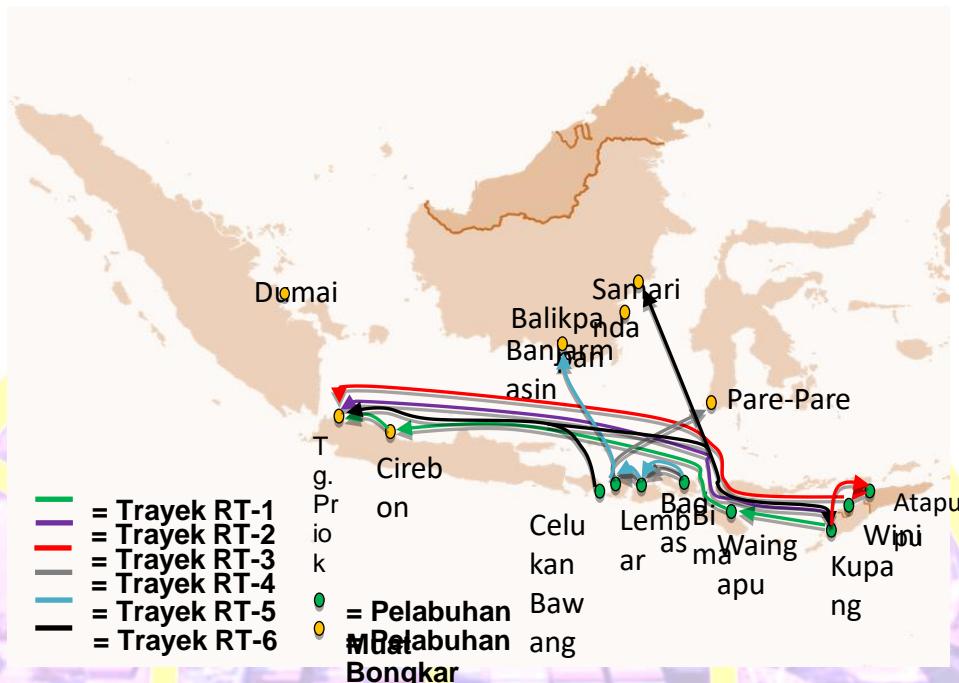


**Gambar II.10 Kapal Tol Laut KM. Logistik Nusantara 4,
Makassar 5 November 2018**

20. Pelayanan Angkutan Kapal Ternak

Telah dilaksanakan pengoperasian angkutan ternak berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL. 108/5/14/DJPL-18 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL. 108/2/7/DJPL-18 tentang Jaringan Trayek Kapal Khusus Angkutan Ternak Tahun 2018. Pengoperasian angkutan ternak menggunakan kapal khusus ternak KM Camara Nusantara. Pada tahun 2018 pemerintah mengoperasikan 6 kapal ternak pada 6 trayek dengan mekanisme penugasan kepada BUMN PT. PELNI dan PT. ASDP serta pelelangan umum kepada swasta. Anggaran subsidi yang disediakan sebesar Rp 73.385.611.000,00 untuk operasional kapal di 3 pelabuhan pangkal, 8 pelabuhan muat dan 7 pelabuhan bongkar.

Gambar Jaringan Trayek Kapal Ternak Tahun 2018



Gambar II.11 Pelayanan Angkutan Kapal Ternak
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut



Gambar II.12 KM. Camara Nusantara Muat Sapi

21. Telah diselenggarakan Sail Moyo Tahun 2018 pada tanggal 9-23 September 2018 di Pelabuhan Badas Nusa Tenggara Barat yang merupakan kegiatan Sail ke 11 (sebelas) kalinya sejak Tahun 2009.

Event Internasional ini dimulai dengan penyelenggaraan Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Belitung 2011, Sail Morotai 2012, Sail Komodo 2013, Sail Raja Ampat 2014, Sail Tomini 2015, Sail Karimata 2016 dan Sail Sabang 2017 yang bertujuan untuk :

- a. Salah satu model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil;
- b. Dapat menggalang keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah serta partisipasi swasta dalam pembangunan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan ;
- c. Dapat menambah lokasi dan kegiatan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional;
- d. Dapat mengukuhkan kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari.



Gambar II.13 Kapal Yacht Dari Berbagai Negera Meramaikan Sail Moyo

22. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Subsidi Kapal Perintis pada tanggal 30 Oktober 2018 di Hotel Harris Horison Semarang, yang dihadiri oleh 200 (dua ratus) orang peserta berikut :
- Dinas Perhubungan Provinsi,
 - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.



Gambar II.14 Rakernas Subsidi Kapal Perintis,
Semarang 30 Oktober 2018

Adapun pembahasan dari Rapat Koordinasi Nasional Subsidi Kapal Perintis yaitu jaringan trayek angkutan laut perintis Tahun 2019 sebanyak 113 trayek.

23. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tol Laut pada tanggal 1 s.d. 2 November 2018 di Bandung dengan jumlah peserta dan tema Penetapan Trayek Tol Laut 2019 Dan Sinergi Optimalisasi Muatan Balik.



Gambar II.15 Rakor/FGD Tol Laut, Bandung 1-2 November 2018

Adapun hasil rekomendasi sebagai berikut :

- a. Implementasi Tol Laut secara konektivitas dapat dianggap baik namun belum mampu menjangkau seluruh daerah pelosok,

namun secara efektifitas dan efisiensi penetapan jaringan trayek masih belum optimal yang berdampak pada *delivery time* ke pelabuhan tujuan yang lama karena menggunakan trayek dengan skema pergerakan pendulum.

- b. Dampak Tol Laut terhadap disparitas harga masih kurang optimal karena terkendala kondisi *shipping* yang memakan waktu lama, keterbatasan angkutan darat, ketidakseimbangan supply barang jika dibandingkan dengan angkutan laut swasta, serta terjadinya praktik ekonomi negatif seperti monopoli, oligopoli dan kartel.
- c. Muatan balik dari luar jawa ke jawa harus diperbanyak agar efisiensi penggunaan kapal angkutan barang meningkat (angkutan barang dari jawa ke luar jawa cukup banyak tetapi, muatan balik relatif sedikit). Hal ini menuntut adanya pertembuhan simpul-simpul di luar jawa yang menjadi pusat produksi sehingga menghasilkan barang yang dapat dipasarkan di Pulau Jawa atau membawa raw material yang dibutuhkan di pusat produksi Pulau Jawa. Usaha ini harus dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta.
- d. Tingkat efektifitas penyelenggaraan Tol Laut di hinterland pelabuhan singgah dirasakan belum efektif, khususnya hinterland yang memiliki jarak yang cukup jauh dari pelabuhan singgah. Hal tersebut dilihat dampak sosial ekonomi di wilayah hinterland yang terkait dengan disparitas harga barang yang masing tinggi, ketersediaan barang Tol Laut masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan sumbangsih sub sektor transportasi dalam PDRB yang masih rendah.

24. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Lala pada tanggal 22 s.d 23 November 2018 di Hotel Merlynn Park Jakarta dengan jumlah peserta.



Gambar II.16 Rapat Koordinasi Bidang Lala, Jakarta, 22-23 November

Rapat dengan tema "Wujudkan Transportasi Digital Angkutan Laut Dalam Mendukung Logistik, Penataan Pelabuhan Serta Konektivitas yang Sinergi dan Berkelanjutan", diisi pembekalan kepada peserta dengan narasumber dari :

- a. DPP PELRA, pembekalan dengan judul Penguatan Pelayaran Rakyat Dalam Mewujudkan Program Nawa Cita;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, pembekalan dengan judul Evaluasi Pelayanan Angkutan Laut Perintis;
- c. PT. PELINDO II (Persero), pembekalan dengan judul Tata Kelola Pelabuhan Tanjung Priok dan Hubungan Kerjasama Dengan PBM;
- d. PELINDO I (Persero), pembekalan dengan judul Penerapan Tiketing On Line Di Pelabuhan;
- e. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, pembekalan dengan judul Penerapan dan Perkembangan Aplikasi Inaportnet Pelayanan Kapal dan Barang Di Pelabuhan;
- f. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, pembekalan dengan judul Pengawasan Tol Laut dan Gerai Maritim.

25. Telah dilaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan khususnya terhadap Perusahaan Bongkar Muat dan Asosiasi/Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat. Pembinaan dilakukan dalam acara Rapat Kerja Nasional Induk Koperasi TKBM di Jakarta tanggal 13 November 2018.



Gambar II.17 Rapat Kerja Nasional INKOP TKBM, Jakarta, 13 November

26. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bentuk Sosialisasi pada tanggal 14 November 2018 di Dumai dengan jumlah peserta 200 orang.



Gambar II.18 Bimtek TIK, Dumai, 14 November 2018

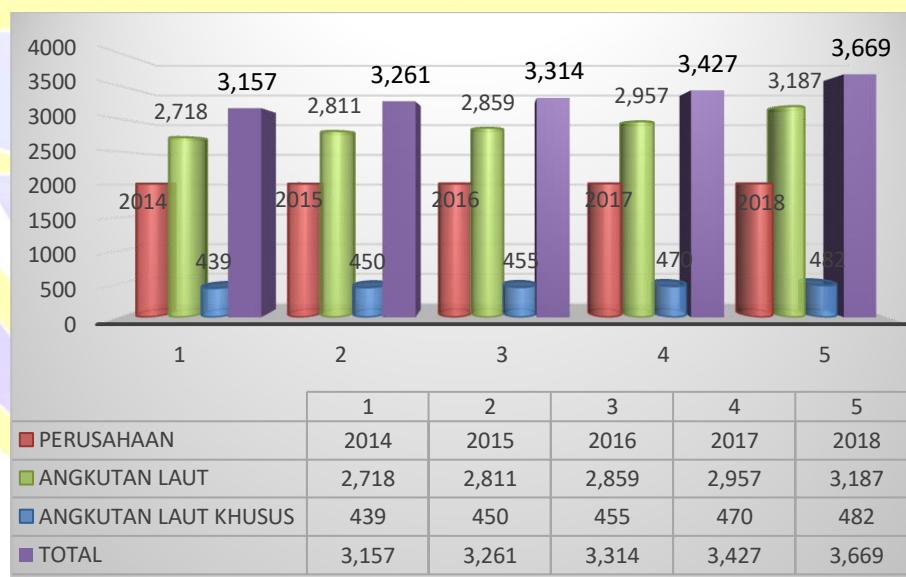
Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diikuti oleh peserta dari perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, dan stake holder lainnya di wilayah kerja PT. PELINDO I Cabang Dumai. Peserta lainnya berasal dari UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Dumai.

27. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Penyajian Data Angkutan Laut.

Pada tahun 2018 jumlah perusahaan angkutan laut tumbuh sebanyak 113 perusahaan atau 7,06 % sehingga sampai dengan tahun 2018 jumlah perusahaan angkutan laut menjadi 3.669 perusahaan. Adapun perkembangan usaha angkutan laut sepanjang tahun 2018 nampak dalam grafik sebagai berikut :

a. Perkembangan perusahaan angkutan laut nasional :

Grafik II.4
Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Nasional
Tahun 2014 - 2018



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

b. Perkembangan armada nasional :

Jumlah armada kapal nasional mengalami pertumbuhan. Sampai dengan tahun 2018 jumlah armada kapal nasional telah mencapai 16.502 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 194

unit atau 1,19 %. Gambaran perkembangan armada kapal nasional sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik II.5 Perkembangan Armada Kapal Nasional Tahun 2014 - 2018



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

c. Perkembangan muatan angkutan laut dalam negeri :

Sepanjang tahun 2018 jumlah muatan dalam negeri mencapai 449.837.690 ton/m³. Jumlah muatan tahun 2018 lebih tinggi 3,81 % dibandingkan tahun 2017. Peningkatan muatan dalam negeri dipicu oleh peningkatan muatan di beberapa pelabuhan bukan utama seperti Ternate, Ambon, Sorong, Anambas Natuna. Gambaran perkembangan muatan dalam negeri nampak pada grafik dan tabel berikut:

**Grafik II.6
Perkembangan Muatan Dalam Negeri Tahun 2014 - 2018**



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Tabel II.7
Jumlah Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Tahun 2014 - 2018

NO.	TAHUN	JUMLAH DAN PANGSA MUATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI				
		KAPAL NASIONAL	%	KAPAL ASING	%	TOTAL
1.	2014	444,348,306	99.99%	30,043	0.01%	444,378,349
2.	2015	408,552,545	99.99%	53,730	0.01%	408,606,275
3.	2016	450,239,087	99.99%	45,028	0.01%	450,284,115
4.	2017	433,307,110	100%	-	-%	433,307,110
5.	2018	449,837,690	100%	-	-%	449,837,690

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

d. Perkembangan muatan angkutan laut luar negeri :

Sepanjang tahun 2018 jumlah muatan luar negeri mencapai 718.013.090 ton/m3. Jumlah muatan tahun 2018 lebih tinggi 0,90 % dibandingkan tahun 2017. Peningkatan muatan luar negeri dipicu oleh peningkatan ekspor impor non migas. Gambaran perkembangan muatan luar negeri nampak pada grafik dan tabel berikut :

Grafik II.7
Perkembangan Muatan Luar Negeri Tahun 2014 - 2018



Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Tabel II.8
Jumlah dan Pangsa Muatan Angkutan Laut Luar Negeri
Tahun 2014 - 2018

NO.	TAHUN	JUMLAH DAN PANGSA MUATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI				
		KAPAL NASIONAL	%	KAPAL ASING	%	TOTAL
1.	2014	71,943,419	11.01%	581,327,245	88.99%	653,270,664
2.	2015	75,597,148	11.02%	610,402,377	88.98%	685,999,525
3.	2016	84,422,330	10.87%	692,195,137	89.13%	776,617,467
4.	2017	64,755,600	9,10%	646,844,400	90.90%	711,600,000
5.	2018	35.790.600	4,98%	682.222.490	95,02%	718.013.090

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

28. Telah dilaksanakan penggantian, perawatan, perbaikan CCTV, Command Center dan Server di Pelabuhan Benoa, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok sebagai berikut :
- Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap sistem informasi pelayanan publik dengan rincian sebagai berikut :
 - Mengupdate antivirus software
 - Memperpanjang lisensi penggunaan software aplikasi
 - Pengembangan Sistem Inaportnet dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPADU)
 - Telah dilaksanakan pembangunan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu SIMPADU yang merupakan *inhouse system* untuk layanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Utama terkait dengan lingkup pekerjaan berikut :
 - Modul PNBP
 - Layanan berthing windows/berthing slots
 - Layanan kapal pada pelabuhan tetap
 - Integrasi dengan BUP
 - Monitoring pelayanan pemanduan

- f. Monitoring pelayanan penundaan pemanduan
 - g. Integrasi penetapan pelayanan kapal
 - h. Perubahan penetapan pelayanan kapal
 - i. Distribusi penetapan olah gerak
 - j. Distribusi penetapan kapal keluar
 - k. Update status layanan
 - l. Layanan pencabutan
 - m. Layanan perpanjangan
 - n. Pengembangan modul web services
 - o. Penyesuaian service integrase
29. Pembangunan Kapal Pelayaran Pelayaran Rakyat (Belanja Barang Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah);
30. Docking Kapal Perintis.

B. Bidang Pembangunan

Telah dilaksanakan pembangunan kapal perintis yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya dan selesai pada tahun 2018, dengan rincian : 5 unit kapal ternak, 15 unit kapal kontainer 100 Teus, 5 unit tipe 750 DWT, 20 unit tipe GT. 1200, 25 unit tipe GT. 2000

Tabel II.9 Penyelesaian Pembangunan Kapal Perintis

NO.	TIPE	KAPAL	RENCANA PENEMPATAN
1.	Kapal Ternak	1. Camara Nusantara 2	Waingapu
		2. Camara Nusantara 3	Atapupu
		3. Camara Nusantara 4	Bima
		4. Camara Nusantara 5	Celukan Bawang
		5. Camara Nusantara 6	Pasean
2.	Kapal kontainer 100 teus	1. Khendaga Nusantara 1	Tahuna
		2. Khendaga Nusantara 2	Masih dalam pembahasan ulang
		3. Khendaga Nusantara 3	Masih dalam pembahasan ulang
		4. Khendaga Nusantara 4	Masih dalam pembahasan ulang
		5. Khendaga Nusantara 5	Masih dalam pembahasan ulang
		6. Khendaga Nusantara 6	Masih dalam pembahasan

NO.	TIPE	KAPAL	RENCANA PENEMPATAN
			ulang
		7. Khendaga Nusantara 7	Tobelo
		8. Khendaga Nusantara 8	Masih dalam pembahasan ulang
		9. Khendaga Nusantara 9	Biak
		10. Khendaga Nusantara 10	Masih dalam pembahasan ulang
		11. Khendaga Nusantara 11	Masih dalam pembahasan ulang
		12. Khendaga Nusantara 12	Masih dalam pembahasan ulang
		13. Khendaga Nusantara 13	Masih dalam pembahasan ulang
		14. Khendaga Nusantara 14	Masih dalam pembahasan ulang
		15. Khendaga Nusantara 15	Masih dalam pembahasan ulang
		1. Sabuk Nusantara 112	Manokwari
		2. Sabuk Nusantara 113	Tilamuta
		3. Sabuk Nusantara 114	Merauke
		4. Sabuk Nusantara 115	Surabaya
		5. Sabuk Nusantara 116	Tarakan
	3. 750 DWT	1. Sabuk Nusantara 92	Semarang
		2. Sabuk Nusantara 93	Kotabaru
	4. GT. 1200	3. Sabuk Nusantara 94	Biak
		4. Sabuk Nusantara 95	Tahuna
		5. Sabuk Nusantara 96	Manokwari
		6. Sabuk Nusantara 97	Kwandang
		7. Sabuk Nusantara 98	Manokwari
		8. Sabuk Nusantara 99	Surabaya
		9. Sabuk Nusantara 100	Jayapura
		10. Sabuk Nusantara 101	Maumere
		11. Sabuk Nusantara 102	Poso
		12. Sabuk Nusantara 103	Ambon
		13. Sabuk Nusantara 104	Saumlaki
		14. Sabuk Nusantara 105	Ternate
		15. Sabuk Nusantara 106	Ambon
		16. Sabuk Nusantara 107	Ambon
		17. Sabuk Nusantara 108	Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile)
		18. Sabuk Nusantara 109	Tahuna
		19. Sabuk Nusantara 110	Calang
		20. Sabuk Nusantara 111	Makassar/Biringkasi
	5. GT. 2000	1. Sabuk Nusantara 67	Kupang
		2. Sabuk Nusantara 68	Teluk Bayur
		3. Sabuk Nusantara 69	Bitung
		4. Sabuk Nusantara 70	Bitung
		5. Sabuk Nusantara 71	Ambon
		6. Sabuk Nusantara 72	Saumlaki
		7. Sabuk Nusantara 73	Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile)
		8. Sabuk Nusantara 74	Merauke

NO.	TIPE	KAPAL	RENCANA PENEMPATAN
		9. Sabuk Nusantara 75	Sorong
		10. Sabuk Nusantara 76	Saumlaki
		11. Sabuk Nusantara 77	Meulaboh
		12. Sabuk Nusantara 78	Jayapura
		13. Sabuk Nusantara 79	Waingapu
		14. Sabuk Nusantara 80	Kijang
		15. Sabuk Nusantara 81	Kendari
		16. Sabuk Nusantara 82	Kendari
		17. Sabuk Nusantara 83	Tanjung Pinang
		18. Sabuk Nusantara 84	Makassar/Biringkasi
		19. Sabuk Nusantara 85	Makassar/Biringkasi
		20. Sabuk Nusantara 86	Ternate
		21. Sabuk Nusantara 87	Ambon
		22. Sabuk Nusantara 88	Bengkulu
		23. Sabuk Nusantara 89	Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile)
		24. Sabuk Nusantara 90	Kupang
		25. Sabuk Nusantara 91	Sorong

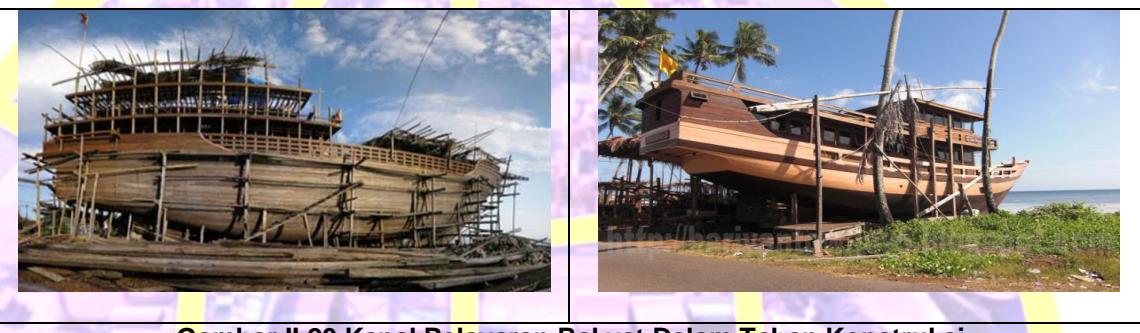


1. Telah dilaksanakan pembangunan kapal pelayaran rakyat dengan anggaran Rp 230.484.257.000,00 untuk belanja barang berupa pembangunan 94 unit kapal pelayaran rakyat yang terbagi dalam 3 paket.

Tabelll. 10 Perusahaan Pelaksana Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat

NO.	PERUSAHAAN	LOKASI
1.	PT. Avenir	Rembang
2.	PT. Empat Sekawan Marine	Lamongan
3.	PT. Trisetia Cipta Persada	Pasuruan
4.	PT. Constrine Jaya Group	Banyuwangi
5.	PT. Dukuh Raya Shipyard	Lombok
6.	CV. Sumber Pratama	Takalar

7.	CV. Cendana Citra Lestari	Bulukumba
8.	PT. Swarna Centra Buana Indonesia	Bulukumba
9.	PT. Putra Arung Samudra	Konawe
10.	PT. Tegal Utama Shipyard	Tegal
11.	CV. Rizki Pratiwi	Konawe
12.	CV. Rifqi Abadi	Konawe
13.	CV. Annisa Jaya Konstruksi	Takalar
14.	CV. Usaha Karya Mandiri	Konawe
15.	CV. Ika Bangun Cipta	Konawe
16.	CV. Cahaya Aljanuar	Konawe

**Gambar II.20 Kapal Pelayaran Rakyat Dalam Tahap Konstruksi**

2. Telah dilaksanakan pemeliharaan/perawatan kapal perintis tahun 2018 sebanyak 45 kapal dengan anggaran sebesar Rp 89.317.217.677,00.

Tabel II.11 Daftar Kapal Perintis Yang Docking Tahun 2018

NO	NAMA KAPAL	LOKASI / NAMA GALANGAN	LOKASI	PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)
1	KM. Sabuk Nusantara 59	PT. Citra Shipyard,	Batam	13 April s.d 23 Mei 2018
2	KM. Sabuk Nusantara 61	PT. Klasaman Indah Raya	Sorong	10 April s.d 4 Mei 2018
3	KM. Sabuk Nusantara 57	PT. Sinergi Indo Utama	Surabaya	13 April s.d 12 Mei 2018
4	KM. Sabuk Nusantara 42	PT Klasaman Indah Raya	Sorong	17 April s.d 31 Mei 2018
5	KM. Sabuk Nusantara 36	PT. Sinergi Indo Utama	Bitung	11 April s.d 9 Juni 2018
6	KM. Sabuk Nusantara 62	PT. Citra Shipyard,	Batam	22 April s.d 22 Mei 2018
7	KM. Sabuk Nusantara 38	CV. Pantang Mundur	Bitung	21 April s.d 25 Mei 2018
8	KM. Sabuk Nusantara 35	PT. Daya Radar Utama	Lampung	1 Mei s.d 6 Juli 2018
9	KM. Sabuk Nusantara 37	PT. Daya Radar Utama	Lampung	1 Mei s.d 30 Mei 2018
10	KM. Darakinusa	PT. Industri Kapal Indonesia	Makassar	21 April s.d 2 Agustus 2018
11	KM. Manusela	PT. Industri Kapal Indonesia	Makassar	21 April s.d 6 Agustus 2018
12	KM. Sabuk Nusantara 58	PT Klasaman Indah Raya	Sorong	8 Mei s.d 8 Juni 2018

NO	NAMA KAPAL	LOKASI / NAMA GALANGAN	LOKASI	PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)
13	KM. Kasuari Pasifik III	PT. Sinergi Indo Utama	Bitung	2 Mei s.d 30 Juni 2018
14	KM. Bandanaira	PT. Sinergi Indo Utama	Surabaya	2 Mei s.d 1 November 2018
15	KM. Sabuk Nusantara 46	PT. Daya Radar Utama	Lampung	1 September s.d 1 November 2018
16	KM. Sabuk Nusantara 43	PT. Orela Shipyard	Gresik	25 Oktober s.d 15 Desember 2018
17	KM. Sabuk Nusantara 47	PT. Klasaman Indah Raya	Sorong	25 Oktober s.d 31 Desember 2018
18	KM. Berkat Taloda	PT. Sinergi Indo Utama	Bitung	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
19	KM. Maloli	CV. Pantang Mundur	Bitung	25 Oktober s.d 24 November 2018
20	KM. Nemberala	PT. Sinergi Indo Utama	Surabaya	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
21	KM. Sabuk Nusantara 52	PT. Daya Radar Utama	Lampung	25 Oktober s.d 9 Desember 2018
22	KM. Sabuk Nusantara 53	KSO PT. Industri Kapal Indonesia - PT. Yasa Ayu Abadi	Makassar	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
23	KM. Sabuk Nusantara 51	PT. Sinergi Indo Utama	Bitung	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
24	KM. Wetar	PT. Sinergi Indo Utama	Bitung	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
25	KM. Sabuk Nusantara 28	PT. Klasaman Indah Raya	Sorong	25 Oktober s.d 31 Desember 2018
26	KM. Papua Lima	PT. Klasaman Indah Raya	Sorong	25 Oktober s.d 9 Desember 2018
27	KM. Sabuk Nusantara 50	CV. Pantang Mundur	Bitung	25 Oktober s.d 4 Desember 2018
28	KM. Sabuk Nusantara 48	CV. Pantang Mundur	Bitung	25 Oktober s.d 4 Desember 2018
29	KM. Sabuk Nusantara 41	KSO PT. Industri Kapal Indonesia - PT. Yasa Ayu Abadi	Makassar	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
30	KM. Sabuk Nusantara 49	PT. Sinergi Indo Utama	Surabaya	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
31	KM. Sabuk Nusantara 30	PT. Ben Sentosa	Surabaya	25 Oktober s.d 16 Desember 2018

NO	NAMA KAPAL	LOKASI / NAMA GALANGAN	LOKASI	PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)
32	KM. Sabuk Nusantara 55	KSO PT. Industri Kapal Indonesia - PT. Yasa Ayu Abadi	Makassar	25 Oktober s.d 14 Desember 2018
33	KM. Sabuk Nusantara 44	PT. Industri Kapal Indonesia	Bitung	25 Oktober s.d 31 Desember 2018
34	KM. Sabuk Nusantara 56	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Madura	25 Oktober s.d 4 Desember 2018
35	KM. Sabuk Nusantara 60	PT. Klasaman Indah Raya	Sorong	25 Oktober s.d 1 Desember 2018
36	KM. Sabuk Nusantara 64	PT. Klasaman Indah Raya	Sorong	25 Oktober s.d 9 Desember 2018
37	KM. Sabuk Nusantara 27	PT. Orela Shipyard	Gresik	25 Oktober s.d 15 Desember 2018
38	KM. Sabuk Nusantara 66	PT. Daya Radar Utama	Lampung	25 Oktober s.d 24 Nopember 2018
39	KM. Sabuk Nusantara 63	PT. Industri Kapal Indonesia	Bitung	25 Oktober s.d 10 Desember 2018
40	KM. Entebbe Express	KSO PT. Industri Kapal Indonesia - PT. Yasa Ayu Abadi	Makassar	1 Nopember s.d 21 Desember 2018
41	KM. Ghanda Nusantara 04	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Madura	23 Nopember s.d 2 Desember 2018
42	KM. Ghanda Nusantara 02	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Madura	24 Nopember s.d 3 Desember 2018
43	KM. Ghanda Nusantara 10	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Madura	24 Nopember s.d 3 Desember 2018
44	KM. Ghanda Nusantara 01	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Madura	25 Nopember s.d 4 Desember 2018
45	KM. Ghanda Nusantara 11	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	Madura	26 Nopember s.d 5 Desember 2018

C. Pelayanan Pihak Ketiga

Pelayanan kepada pihak ketiga diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Tabel II.12 Rekapitulasi Pelayanan Pihak Ketiga Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Output	Satuan
1	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)		
	a. Penerbitan Baru	68	Surat Izin
	b. Registrasi	37	Surat Keterangan
	c. Perubahan	14	Surat Keterangan
2	Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)		
	a. Penerbitan Baru	15	Surat Izin
	b. Registrasi	40	Surat Keterangan
	c. Perubahan	8	Surat Keterangan
3	Spesifikasi Kapal	80	Dokumen
4	Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut	20	Surat Keterangan
5	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	235	Persetujuan
6	Persetujuan atas usulan omisi kapal pada trayek tetap dan teratur	48	Persetujuan
7	Persetujuan atas penggantian (substitusi) kapal pada trayek tetap dan teratur	15	Persetujuan
8	Persetujuan atas usulan deviasi kapal pada trayek tetap dan teratur	63	Persetujuan
9	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	2.778	Persetujuan
10	Persetujuan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak teratur	43	Persetujuan
11	Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)		
	a. Kapal Lintas Batas	4.000	Persetujuan
	b. Kapal Non Lintas Batas	13.000	Persetujuan
12	Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)	46	Surat Izin
	JUMLAH	20.510	

D. Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2018 yaitu : kegiatan docking KM. Sabuk Nusantara 53 sebesar Rp. 1.856.281.812 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus duabelas rupiah) yang dilaksanakan oleh KSO PT Industri Kapal Indonesia & PT. Yasa Ayu Abadi dengan justifikasi terlambat untuk mengajukan revisi pencantuman nama kegiatan pada Halaman IV DIPA (Proses reviu Itjen Kemenhub bulan Oktober 2018).



BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

BIDANG KEPELABUHANAN

1. PROGRAM

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas
- 2) Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan
- 3) Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal
- 4) Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan
- 5) Monitoring/Evaluasi Pembangunan di Lingkungan Ditjen Hubla pada UPT KSOP/UPP/Satker
- 6) Pendukung Kegiatan Strategis di Bidang Perancangan Fasilitas Pelabuhan
- 7) Evaluasi, monitoring dan FGD kinerja pelayanan operasional pelabuhan
- 8) Monitoring, evaluasi dan FGD penggunaan perairan pada Tersus, TUKS dan bangunan di atas air
- 9) Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan bagi KPA, PPK dan Staf Teknis
- 10) Monitoring Klarifikasi Lapangan dan Klarifikasi Data Teknis Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan dan Pekerjaan Reklamasi berdasarkan SIKK dan SIKR
- 11) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
- 12) Workshop Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan
- 13) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Batas-Batas Daerah DLKr dan DLKp
- 14) Monitoring dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus dan TUKS oleh Tim Teknis Terpadu

- 15) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kepelabuhanan
- 16) Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan

b. Bidang Pembangunan

- 1) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial
- 2) Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut
- 3) Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 4) Pekerjaan Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID)
- 5) Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering and Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan
- 6) Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut
- 7) Penggerukan Alur Pelayaran di 3 Lokasi
- 8) Proyek Strategis Nasional
- 9) Perencanaan dan Penyiapan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- 10) Studi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Ahli Perawatan Fasilitas Pelabuhan
- 11) *The Development of Belawan Port Project*
- 12) *Predredge Sounding* Pekerjaan Penggerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan

c. Pelayanan Pihak Ke-3

1. Evaluasi permohonan izin penetapan lokasi Terminal Khusus (Tersus)
2. Evaluasi permohonan/persetujuan izin kerja keruk dan/atau reklamasi
3. Penetapan Operasional 24 Jam pada Terminal Khusus
4. Evaluasi permohonan izin pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP)

5. Penetapan Terminal Khusus (Tersus) yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri
6. Persetujuan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
7. Pengoperasian dan pembangunan Tersus
8. Persetujuan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Umum tahun 2018
9. Persetujuan Izin pembangunan Pelabuhan Umum tahun 2018
10. Jumlah Persetujuan Izin Pembangunan dan Operasional tahun 2018
11. Izin Penggunaan Garis Pantai tahun 2018

2. REALISASI

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis di di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas pada tanggal 21-23 November 2018 di hotel Royal Ambarukmo, dengan jumlah peserta 70 (Tujuh puluh) orang. Tema kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi staf teknis ASN (Aparatur Sipil Negara) bidang Perencanaan Fasilitas Pelabuhan dan Konsultan Perencana.

Tabel III.1 Materi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas

No	Materi
1	Gambaran Umum Perencanaan Fasilitas Pelabuhan
2	Analisa Hidro-Oceanografi dalam perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
3	Kondisi Kegempaan, Peta Gempa Indonesia dan Perencanaan Dermaga Tahan Gempa
4	Peta Gempa Indonesia dan Aspek Geoteknik dalam Perancangan Pembangunan Pelabuhan



Gambar III.1 Bimbingan Teknis di Bidang Perancangan Teknis Fasilitas

2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan yang terdiri dari 2 (dua) angkatan, yaitu:

- Angkatan I pada tanggal 1-3 Oktober 2018 di Hotel Atria Gading Serpong-Tangerang yang dihadiri oleh 63 (enam puluh tiga) orang peserta;
- Angkatan II pada tanggal 24-26 Oktober 2018 di The Alana Hotel-Yogyakarta yang dihadiri oleh 66 (enam puluh enam) orang peserta.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel III.2 Materi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan

No	Materi
1	Penetapan Perairan Pandu dan Pelimpahan Kewenangan Pemanduan
2	Pembekalan Direktur Kepelabuhanan
3	Tugas dan Tanggungjawab Pengawas Pemanduan
4	Tarif Pemanduan
5	SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan
6	Diskusi Terkait Pemanduan dan Penundaan Kapal
7	Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Pemanduan
8	Prasarana Pemanduan Berbasis Teknologi



Gambar III.2 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pemanduan

3. Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal

Telah dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal di 74 (tujuh puluh empat) lokasi, yaitu :

Tabel III.3 Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal

NO	LOKASI	TANGGAL
1.	Banjarmasin	7-9 Januari 2018
2.	Tuban	11-13 Januari 2018
3.	Medan	23-25 Januari 2018
4.	Bogor	23-24 Januari 2018
5.	Samarinda	31 Januari-2 Februari 2018
6.	Batam	31 Januari-3 Februari 2018
7.	Teluk Bayur	3-5 Februari 2018
8.	Probolinggo	5-7 Februari 2018
9.	Tarakan	8-10 Februari 2018
10.	Palembang	21-23 Februari 2018
11.	Jakarta	26 Februari 2018
12.	Jakarta	27 Februari 2018
13.	Jakarta	27 Februari 2018
14.	Jakarta	28 Februari 2018
15.	Cirebon	28 Februari-2 Maret 2018
16.	Surabaya	4-6 Maret 2018
17.	Pontianak	7-9 Maret 2018
18.	Makassar	14-16 Maret 2018
19.	Semarang	14-16 Maret 2018
20.	Bogor	13 Maret 2018

21.	Kotabaru	19-21 Maret 2018
22.	Banjarmasin	21-23 Maret 2018
23.	Balikpapan	21-23 Maret 2018
24.	Surabaya	27-29 Maret 2018
25.	Kendari	27-28 Maret 2018
26.	Jakarta	27 Maret 2018
27.	Luwuk	4-6 April 2018
28.	Bali	4-6 April 2018
29.	Bali	8-10 April 2018
30.	Batam	9-11 April 2018
31.	Bali	11-13 April 2018
32.	Surabaya	11-13 April 2018
33.	Surabaya	11-13 April 2018
34.	Dumai	17-19 April 2018
35.	Surabaya	17-19 April 2018
36.	Ternate	18-20 April 2018
37.	Bali	23-25 April 2018
38.	Jepara	26-28 April 2018
39.	Banten	25-27 April 2018
40.	Manado	2-4 Mei 2018
41.	Makassar	2-4 Mei 2018
42.	Pangkalbalam	2-4 Mei 2018
43.	Tg. Pandan	7-9 Mei 2018
44.	Kalbut	7-9 Mei 2018
45.	Panjang	14-16 Mei 2018
46.	Kumai	16-18 Mei 2018
47.	Garongkong	20-23 Mei 2018
48.	Lembar	21-23 Mei 2018
49.	Lab. Maringgai	21-23 Mei 2018
50.	Banyuwangi	24-26 Mei 2018
51.	Fakfak	29 Mei-1 Juni 2018
52.	Kupang	30 Mei-1 Juni 2018
53.	Sanggata	3-5 Juni 2018
54.	Dumai	3-7 Juni 2018
55.	Surabaya	5-7 Juni 2018
56.	Medan	8-10 Juni 2018

57.	Jakarta	21-23 Juni 2018
58.	Jepara	5-7 Juli 2018
59.	Bogor	5-6 Juli 2018
60.	Kotabaru	8-11 Juli 2018
61.	Bogor	18-19 Juli 2018
62.	Bengkulu	18-20 Juli 2018
63.	Banjarmasin	19-20 Juli 2018
64.	Surabaya	25-27 Juli 2018
65.	Surabaya	25-28 Juli 2018
66.	Surabaya	31 Juli-2 Agustus 2018
67.	Batam	1-3 Agustus 2018
68.	Muntok	7-9 Agustus 2018
69.	Surabaya	8-9 Agustus 2018
70.	Bekasi	14 Agustus 2018
71.	Bali	15-16 Agustus 2018
72.	Surabaya	28-30 Agustus 2018
73.	Batam	27 November 2018
74.	Serang	6 Desember 2018



Gambar III.3 Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal

4. Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

Telah dilaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

- Telah dilaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan pada tanggal 29-30 November 2018 di Hotel Grand Mercure, Bandung, dengan jumlah peserta 65 (enam puluh lima) orang

- Telah dilaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan pada tanggal 6-7 Desember 2018 di Java Paragon Hotel, Surabaya, dengan jumlah peserta 65 (enam puluh lima) orang
- Telah dilaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan pada tanggal 3-4 Desember 2018 Gamara Hotel, Makassar, dengan jumlah peserta 75 (tujuh puluh lima) orang



Gambar III.4 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

5. Monitoring/Evaluasi Pembangunan di Lingkungan Ditjen Hubla pada UPT KSOP/UPP/Satker
- Telah dilaksanakan Monitoring/Evaluasi Pembangunan di Lingkungan Ditjen Hubla pada UPT KSOP/UPP/Satker pada 24 (dua puluh empat) lokasi, yaitu:

Tabel III.4 Monitoring/Evaluasi Pembangunan di Lingkungan Ditjen Hubla pada UPT KSOP/UPP/Satker

NO	LOKASI	TANGGAL
1.	Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	11-13 April 2018
2.	Jakarta	10-13 Juli 2018
3.	Mangga Dua, Ambon	8 Agustus 2018
4.	Maloy , Kalimantan Timur	13-15 Agustus 2018
5.	Ndao, Nusa Tenggara Timur	23-26 Agustus 2018
6.	Waikelo, NTT	7-10 Agustus 2018
7.	Sebalang, Lampung	4 September 2018
8.	Luwuk, Sulawesi Tengah	9-12 September 2018

NO	LOKASI	TANGGAL
9.	Depapre, Papua	12-15 September 2018
10.	Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	24-15 September 2018
11.	Pelabuhan Pantoloan, Donggala, Wani, Sulawesi Tengah	11-12 Oktober 2018
12.	Atapupu, Nusa Tenggara Timur	22-24 Oktober 2018
13.	Babang, Maluku Utara	10-12 Oktober 2018
14.	Reo, Nusa Tenggara Timur	1-3 Oktober 2018
15.	Korido, Papua	10-12 Oktober 2018
16.	Wini, Nusa Tenggara Timur	18-19 Oktober 2018
17.	Pulau Bunyu, Kalimantan Utara	11-12 Oktober 2018
18.	Serui, Papua	6-9 November 2018
19.	Pangandaran, Jawa Barat	13-15 November 2018
20.	Sarmi, Papua	29-30 November 2018
21.	Tenau Kupang	1-5 November 2018
22.	Linau Bintuhan, Bengkulu	12-14 Desember 2018
23.	Tanjung Mocoh, Kepulauan Riau	13-14 Desember 2018
24.	Moru, NTT	17-19 Desember 2018



Gambar : III.5 Monitoring/Evaluasi Pembangunan di Lingkungan Ditjen Hubla pada
UPT KSOP/UPP/Satker

6. Pendukung Kegiatan Strategis di Bidang Perancangan Fasilitas Pelabuhan

Telah dilaksanakan kegiatan Pendukung Kegiatan Strategis di Bidang Perancangan Fasilitas Pelabuhan Laut berupa pendampingan,

partisipasi sebagai undangan/peserta rapat/nara sumber dalam kegiatan koordinasi terkait di bidang perancangan fasilitas pelabuhan dengan pihak swasta/instansi pemerintah pada 39 (Tiga Puluh Sembilan) lokasi, yaitu :

Tabel III.5 Pendukung Kegiatan Strategis di Bidang Perancangan Fasilitas Pelabuhan

NO	LOKASI	TANGGAL
1	Tiram, Sumatera Barat	28-29 Maret 2018
2	Bogor, Jawa Barat	5-7 April 2018
3	Bali	11-14 April 2018
4	Bogor, Jawa Barat	18 Agustus 2018
5	Jakarta	24-26 April 2018
6	Tiram, Sumatera Barat	26 April 2018
7	Manado, Sulawesi Utara	30- 2 Mei 2018
8	Kuala Tanjung, Sumatera Utara	18-19 April 2018
9	Kaimana, Papua Barat	17-19 April 2018
10	Belawan, Sumatera Utara	9-10 Juni 2018
11	Jakarta	26 Juni 2018
12	Depok, Jawa Barat	20 Juli 2018
13	Tanjung Perak, Jawa Timur	25-27 Juli 2018
14	Bandung, Jawa Barat	26-27 Juli 2018
15	Bogor, Jawa Barat	29-3 Agustus 2018
16	Papua Barat	30 – 3 Agustus 2018
17	Papua	10-12 Agustus 2018
18	Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	1-2 Agustus 2018
19	Tiram, Sumatera Barat	16 Agustus 2018
20	Lombok, NTB	23-25 Agustus 2018
21	Pacitan, Jawa Timur	30-1 September 2018
22	Medan, Sumatera Utara	12-14 September 2018
23	Simeulue, Aceh	6-8 September 2018
24	Jakarta	24 April 2018
25	Bogor	1-3 Agustus 2018
26	Banggai, Sulawesi Tengah	29-30 September 2018

NO	LOKASI	TANGGAL
27	Ujung Jabung, Jambi	4-6 Oktober 2018
28	Singkil, Aceh	11-13 Oktober 2018
29	Bandung, Jawa Barat	16-17 Oktober 2018
30	Tiram, Sumatera Barat	22-23 Oktober 2018
31	Surabaya, Jawa Timur	8-9 November 2018
32	Makassar, Sulawesi Selatan	23-25 Oktober 2018
33	Bali	31-2 November 2018
34	Tangerang, Banten	15-16 November 2018
35	Makassar,	25 November 2018
36	Sulawesi Tengah	28-30 Novemmr 2018
37	Jakarta	30 November 2018
38	Kalimantan Utara	17-18 Desember 2018
39	Jakarta	7 September 2018

7. Evaluasi, monitoring dan FGD kinerja pelayanan operasional pelabuhan

Telah dilaksanakan Evaluasi, monitoring dan FGD kinerja pelayanan operasional pelabuhan sebagai berikut :

- Evaluasi, monitoring pada 11 (sebelas) lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:
 - Melaksanakan proses manajemen, kontrol, pelaporan, dan mengevaluasi kinerja pelayanan operasional pelabuhan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja operasional berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
 - Mengkaji dan merumuskan gagasan penyelesaian permasalahan operasional pelabuhan yang konseptual untuk meningkatkan kinerja pelayanan operasional pelabuhan guna memperlancar arus kapal dan barang;
 - Mengetahui sampai sejauh mana kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan;
 - Masukan bagi pimpinan dan semua pihak yang terkait dalam upaya mendukung pengembangan pelabuhan.

Tabel III.6 Evaluasi, monitoring kinerja pelayanan operasional pelabuhan

NO	LOKASI	TANGGAL
1	Brondong	15 – 17 Maret 2018
2	Surabaya	12 – 13 Agustus 2018
3	Benoa	7 – 10 Mei 2018
4	Tanjung Redeb	7 – 11 Mai 2018
5	Telaga Biru	6 – 8 Juni 2018
6	Merauke - Jayapura	10 – 14 Juli 2018
7	Belawan	5 -7 September 2018
8	Kalianget	12 -14 September 2018
9	Tegal	28 November – 1 Desember 2018
10	Cirebon	3 – 5 Desember 2018
11	Rengat	12 – 14 Desember 2018



Gambar III.6 Evaluasi, monitoring kinerja pelayanan operasional pelabuhan

- b. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan di Hotel Golden Tulip Passer Baroe, Pasar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2018 yang di ikuti oleh 100 (seratus) peserta. Pada FGD ini dibahas terkait penetapan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Masing-masing penyelenggara pelabuhan yang mengelola

pelabuhan yang diusahakan secara komersial diwajibkan untuk menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan standar kinerja pelabuhannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Pemaparan terkait peraturan penetapan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan
- b. Pemaparan tentang Pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan



Gambar III.7 Focus Group Discussion Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

8. Monitoring, evaluasi dan FGD penggunaan perairan pada Tersus, TUKS dan bangunan di atas air

Telah dilaksanakan Monitoring, evaluasi dan FGD penggunaan perairan pada Tersus, TUKS dan bangunan di atas air sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air pada 9 (sembilan) lokasi dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penggunaan/sewa perairan pada Terminal Khusus (TERSUS), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Bangunan Diatas Air yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Tabel III.7 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air

NO	LOKASI	TANGGAL
1	Pulau Bunyu	27 – 28 Maret 2018
2	Kota Baru	17 – 20 April 2018
3	Brondong	12 – 14 Juli 2018
4	Batam	24 – 25 Agustus 2018
5	Samarinda	29 Juli – 1 Agustus 2018
6	Makassar	12 – 14 September 2018
7	Manado	19 – 21 September 2018
8	Halmahera Selatan	20 – 22 September 2018
9	Tanjung Santan	11 – 12 Desember 2018



Gambar III.8 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air

- b. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air di Hotel Golden Tulip Passer Baroe, Pasar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2018 yang di ikuti oleh 20 (dua puluh) peserta. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel III.8 Materi Focus Group Discussion Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air

No	Materi
1	Penggunaan Perairan Pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air
2	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Perairan
4	Penggunaan Perairan untuk Bangunan dan Kegiatan Lainnya



Gambar III.9 Focus Group Discussion Penggunaan Perairan pada Tersus, TUKS dan Bangunan di Atas Air

9. Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan bagi KPA, PPK dan Staf Teknis
- Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan bagi KPA, PPK dan Staf Teknis pada tanggal 18-21 September 2018 di Hotel Salak The Heritage Bogor yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta.



Gambar III.10 Bimbining Teknis Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan bagi KPA, PPK dan Staf Teknis

Tabel III.9 Materi Bimbining Teknis Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan bagi KPA, PPK dan Staf Teknis

No	Materi
1	Dokumen Lingkungan Terkait Pekerjaan Pengerukan
2	Pengurusan Surat Izin Kerja Keruk Untuk Pekerjaan Pengerukan Dengan Dana APBN
3	Rencana Induk Pelabuhan Sebagai Pedoman Pengembangan Pelabuhan
4	Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengerukan
5	Survei Investigasi dan Desain Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan
6	Survei Bathimetri Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan
7	Keselamatan Bernavigasi Pada Alur Pelayaran
8	Sosialisasi SOP Monitoring dan SOP Resounding
9	Pemilihan Alat Keruk
10	Manajemen Proyek
11	Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan

10. Monitoring Klarifikasi Lapangan dan Klarifikasi Data Teknis Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan dan Pekerjaan Reklamasi berdasarkan SIKK dan SIKR

Telah dilaksanakan Monitoring Klarifikasi Lapangan dan Klarifikasi Data Teknis Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan dan Pekerjaan Reklamasi berdasarkan SIKK dan SIKR pada 12 (dua belas) lokasi, yaitu :

Tabel III.10 Monitoring klarifikasi lapangan dan klarifikasi data teknis perkerjaan pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan dan pekerjaan reklamasi berdasarkan SIKK dan SIKR

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERIZINAN	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makasar	SIKR	Makasar Sulawesi Selatan	11 – 13 April 2018
2	PT. Pelindo I (Persero) Belawan Fase II	SIKR	Belawan Sulawesi Utara	2 – 4 April 2018
3	PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Bitung	SIKR	Bitung Sulawesi Utara	4 – 6 April 2018
4	PT. Pelindo III (Persero) Cabang Lembar (NTB)	SIKR	Lembar NTB	25 – 27 April 2018
5	PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Tarakan	SIKR	Tarakan Kalimantan Utara	18 – 20 April 2018
6	PT. Pelindo III (Persero) Benoa	SIKR	Pelabuhan Benoa Bali	18 – 20 April 2018
7	PT. Batam Setralindo Batam	SIKR	Batam Kepulauan Riau	5 – 7 September 2018
8	PT Bintan Aluminia Indonesia Kijang Tanjung Pinang	SIKR	Kijang Kepulauan Riau	6 – 8 September 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERIZINAN	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
9	PT Pelindo IV Cabang Sorong	SIKR	Sorong Papua	20 – 22 September 2018
10	PT Pelindo IV Cabang Kendari	SIKR	kendari	21 – 23 November 2018
11	SKKMigas (Handilll) Kalimantan Timur	SIKK	Kendari Kalimantan Timur	2-5 September 2018
12	PT Bhimasena Power Indonesia Batang Jawa Tengah	SIKK	Batang Jawa Tengah	12- 14 September 2018



Gambar III.11 Monitoring klarifikasi lapangan dan klarifikasi data teknis perkerjaan penggerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan dan pekerjaan reklamasi berdasarkan SIKK dan SIKR

11. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dilaksanakan 2 (dua) tahap, tahap I (pertama) dilaksanakan di Surabaya dengan mengundang pemerintah daerah dan instansi terkait, serta tahap II (kedua) dilaksanakan di Jakarta.

Tabel III.11 Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Peserta	Materi
1	Tahap I	26 s.d.28 September 2018	Hotel Vasa Surabaya	27	Integrasi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan dengan kesesuaian Tata Ruang Wilayah Metode Peramalan Permintaan Jasa Angkutan Laut Analisa Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Integrasi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dengan Rencana Induk Pelabuhan Sinkronisasi DLKr/DLKp dengan Rencana Induk Pelabuhan Analisa Ekonomi dan Finansial Pelabuhan Juknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
2	Tahap II	27 s.d. 29 November 2018	Hotel Ayana Midplaza Jakarta	30	Integrasi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan dengan kesesuaian Tata Ruang Wilayah Metode Peramalan Permintaan Jasa Angkutan Laut Analisa Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Integrasi Pembangunan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Peserta	Materi
					Fasilitas Pelabuhan dengan Rencana Induk Pelabuhan
					Sinkronisasi DLKr/DLKp dengan Rencana Induk Pelabuhan
					Analisa Ekonomi dan Finansial Pelabuhan
					Juknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan



Gambar III.12 Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tahap I dan Tahap II

12. Workshop Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan

Telah dilaksanakan *Workshop* Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan secara swakelola sebanyak 2 (dua) kali sebagai media sosialisasi dan pembinaan teknis kepada instansi terkait yang melakukan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan agar instansi tersebut dapat memahami prosedur penetapan rencana induk pelabuhan. Selain itu juga dilaksanakan evaluasi terhadap dokumen Rencana Induk Pelabuhan guna proses lanjut Penetapan. Adapun 2 (dua) kegiatan tersebut antara lain:

Tabel III.12 Workshop Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Peserta	Materi
1	Tahap I	14 s.d.17 Maret 2018	Hotel Harris Vertu Harmoni	40	Evaluasi dokumen studi Rencana Induk Pelabuhan yang disusun oleh Badan Litbang Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sebagai bagian dari proses penetapan Rencana Induk Pelabuhan, pada lokasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Jailolo; 2. Pelabuhan Taniwel; 3. Pelabuhan Mangga Dua; 4. Pelabuhan Manipa 5. Pelabuhan Tifure; 6. Pelabuhan Larat; 7. Pelabuhan Tulehu; 8. Pelabuhan Dama; 9. Pelabuhan Loleo Jaya; 10. Pelabuhan Darume; 11. Pelabuhan Bisui; 12. Pelabuhan Galela.
2	Tahap II	21 s.d. 23 November 2018	Hotel Ayana Midplaza Jakarta	30	Juknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
					Integrasi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dengan Rencana Induk Pelabuhan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Peserta	Materi
					Analisa Ekonomi dan Finansial Pelabuhan
					Metode Peramalan Permintaan Jasa Angkutan Laut
					Analisa Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan



Gambar III.13 Kegiatan Workshop Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan

13. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Batas-Batas Daerah DLKr dan DLKp

Telah dilaksanakan Bimtek Penetapan DLKr dan DLKp pada tanggal 8 – 10 Nopember 2018 di Hotel Vasa Surabaya dengan dihadiri sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) Peserta.

- Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel III.13 Materi Kegaitan Bimtek Penetapan DLKr dan DLKp

No	Materi
1	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Jepara
2	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Bunta
3	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Pomalaa
4	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Labuhan Bajo
5	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Seba
6	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Reo
7	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Garongkong
8	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Malili
9	Pembahasan permasalahan/hambatan dalam penetapan batas-batas DLKR DLKP Pelabuhan Teminabuan



Gambar III.14 Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Batas-Batas Daerah DLKr dan DLKp

14. Monitoring dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus dan TUKS oleh Tim Teknis Terpadu

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus dan TUKS oleh Tim Teknis Terpadu dengan tujuan menginventarisir perijinan TUKS baik yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun yang belum sesuai dan mengevaluasi ijin pengoprasian Terminal Khusus dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri berkaitan dengan status, peningkatan fasilitas dan komuditas Tersus/TUKS pada 22 (Dua puluh dua) lokasi sebagai berikut :

Tabel III.14 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus dan TUKS oleh Tim Teknis Terpadu

NO	LOKASI	TANGGAL
1	Larantuka	21 Maret 2018
2	Tanjung Uban	10 Juli 2018
3	Branta	26 Juli 2018
4	Pangkalan Susu	19 April 2018
5	Surabaya	19 April 2018
6	Cirebon	30 April 2018
7	Baubau	25 April 2018
8	Semarang	2 Mei 2018
9	Medan	14 Mei 2018
10	Jambi	6 April 2018
11	Lombok	14 Mei 2018

NO	LOKASI	TANGGAL
12	Balikpapan	4 Juni 2018
13	Semarang	6 Agustus 2018
14	Gresik	24 Juli 2018
15	Palembang	15 Nopember 2018
16	Jayapura	15 Nopember 2018
17	Maumere	15 Oktober 2018
18	Bawean	24 Oktober 2018
19	Jogja	21 Nopember 2018
20	Amurang	15 Nopember 2018
21	Bima	14 Oktober 2018
22	Sampit	9 Oktober 2018



Gambar III.15 Monitoring dan Evaluasi Permohonan Perizinan Tersus dan TUKS oleh Tim Teknis Terpadu

15. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kepelabuhanan

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kepelabuhanan yang dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu :

- a. pada tanggal 14 s.d 16 November 2018 di Grand Inna Bali/Denpasar dengan Jumlah Peserta 40 (empat puluh) Orang
- b. Pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2018 di Grand Mercure Bandung dengan Jumlah peserta 49 (empat puluh sembilan) Orang.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel III.15 Materi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kepelabuhanan

No	Materi
1	Menuju Pelabuhan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
2	Perencanaan Pengembangan Pelabuhan
3	Pengaturan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
4	Kebijakan PPLH dan PSDA terkait dengan Amdal
5	Pelaporan Pelaksanaan Ijin Lingkungan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di Kawasan Pelabuhan
6	Kelestarian Lingkungan di Pelabuhan
7	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup



Gambar III.16 Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kepelabuhanan

16. Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan

Telah dilaksanakan Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan Tahun 2018 pada 2 (dua) lokasi yaitu :

- a. Pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 di Hotel Nagoya Hill Batam dengan jumlah peserta 29 orang.
- b. Pada tanggal 29 s.d 1 Desember 2018 di Swissbell Hotel Makassar dengan Jumlah peserta 51 orang.

Tabel III.16 Materi Kegiatan Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan Tahun 2018

No	Materi
1	Dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan
2	Monitoring Dokumen Teknis Pelabuhan dalam rangka Mendukung Database Sistem Informasi Pelabuhan
3	<i>Plotting Polygon berdasarkan Titik Koordinat DMS (Degree Minute Second)</i>



Gambar III.17 Materi Kegiatan Workshop Pemutakhiran Database Sistem Informasi Pelabuhan Tahun 2018

b Kegiatan Pembangunan

1. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial
Pada tahun 2018 Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) lokasi, yaitu:

Tabel III.17 Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Utama Pelabuhan

NO	KEGIATAN	JUMLAH	PROVINSI	LOKASI	KET
1	Pembangunan Lanjutan	9 Lokasi	Kepulauan Riau	Subi	
			Jawa Barat	Pangandaran	
				Pelabuhan Ratu	
			NTT	Reo	
			Kalimantan Barat	Padang Tikar	
			Kalimanatan Selatan	Sebuku	
				Pelaihari	
			Kalimantan Timur	Maloy	
			Papua	Depapre	
2	Penyelesaian	22 Lokasi	SUMATERA UTARA	Pulau Tello	
				Parlimbungan Ketek	
			RIAU	Bagan Siapi-API	
				Batu Panjang	
			KEPULAUAN RIAU	Pulau Laut	
			JAMBI	Nipah Panjang	
			BENGKULU	Linau Bintuhan	
			LAMPUNG	Sebalang	
			NUSA TENGGARA TIMUR	Labuan Bajo	
				Ippi	
			SULAWESI SELATAN	Bajoe	
			MALUKU	Tuhaha	
				Saumlaki	

				Moa	
			MALUKU UTARA	Babang	
			PAPUA	Korido	
				Bade	
				Serui	
				Agats	
			PAPUA BARAT	Kaimana	
				Kaibus	
				Wersar Teminabuan	
3	Pembangunan/R ehabilitasi	58 Lokasi	ACEH	Malahayati	
				Kuala Langsa	
				Tapaktuan	
			SUMATERA UTARA	Leidong	
			BENGKULU	Pulau Baai	
			BANTEN	Anyer	
			JAWA TENGAH	Kendal	
				Jepara	
				Rembang	
				Juwana	
			NUSA TENGGARA TIMUR	Calabahi	
				Atapupu	
				Moru	
				Ende	
				Marapokot	

				Waikelo	
				Ndao	
				Batutua	
				Biu	
				Baranusa	
			KALIMANTAN BARAT	Kendawangan	
			KALIMANTAN UTARA	Sungai Nyamuk	
			SULAWESI UTARA	Karatung	
				Labuhan Uki	
			GORONTALO	Gorontalo	
				Kwandang	
				Kwandang	
			SULAWESI TENGAH	Leok	
				Ampana	
				Poso	
				Toli-Toli	
				Luwuk	
				Bungku	
				Tangkiang	
			SULAWESI TENGGARA	Bau-Bau	
				Wanci	
			SULAWESI SELATAN	Palopo	
				Garongkong	
				Kayuadi	

				Pamatata	
MALUKU				Wonreli	
				Namlea	
				Manipa	
				Piru	
				Bemo	
				Tehoru	
				Dobo	
MALUKU UTARA				Laiwui	
				Gebe	
				Tobelo	
				Goto	
				Gita	
PAPUA				Merauke	
				Sarmi	
				Nabire	
				Oransbari	
PAPUA BARAT				Paam	
				Waisai	

2. Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut
 Telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut tahun 2018 pada 8 (delapan) lokasi, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III.18 Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasi Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara TA. 2018	PT. Axis Mundi
2	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Lebiti Kabupaten Tojo Una-Una Prov. Sulteng TA. 2018	PT. Hasfarm Dian Konsultan
3	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Tomia dan Binongko Kabupaten Wakatobi Prov. Sultra TA. 2018	PT. Cita Prisma
4	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Wapoga Kabupaten Waropen Prov. Papua TA. 2018	PT. Rayasurverindo Tirtasarana
5	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Asiki Kabupaten Boven Digoel Prov. Papua TA. 2018	PT. Mettana
6	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kapiraya Kabupaten Mimika Prov. Papua TA. 2018	PT. Ditori Geokarya Teknik
7	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Posi-Posi Kabupaten Morotai Prov. Maluku Utara TA. 2018	PT. Yuchi Kaji Tama
8	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Katundu/Nggonggi Kabupaten Sumba Timur Prov. NTT TA. 2018	PT. Tatabumi Konsultan

3. Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Telah disusun Pekerjaan Penyusunan Studi Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan tahun 2018 pada 10 (sepuluh) paket untuk 11 (sebelas) lokasi, seperti dalam tabel berikut

Tabel III.19 Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1	a. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Lampia Prov. Sulsel TA. 2018 b. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Munte Prov. Sulsel TA. 2018	PT. Artha Demo Engineering Consultant (1 Paket 2 lokasi)
2	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Sikeli Prov. Sultra TA. 2018	PT. Marindo Utama Penata Kawasan
3	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Tobilota Prov. NTT TA. 2018	PT. Kiat Global Ismatika
4	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Sape Prov. NTB TA. 2018	PT. Hasfarm Dian Konsultan
5	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Pemenang Prov. NTB TA. 2018	PT. Cita Prisma
6	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Wini Prov. NTT TA. 2018	PT. Karya Cipta Madani
7	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Moru Prov. NTT TA. 2018	PT. Adhiza Maraton
8	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Miangas Prov. Sulut TA. 2018	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa
9	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Kaiwatu/Moa Prov. Maluku TA. 2018	PT. Rayasurverindo Tirtasarana
10	Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKPK Pulau Bunyu Prov. Kaltara TA. 2018	PT. Ditori Geokarya Teknik

4. Pekerjaan Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID)
 Telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID) tahun 2018 pada 3 (tiga) lokasi, yaitu:

Tabel III.20 Pekerjaan Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3
1	Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID) Lebiti, Sulawesi Tengah	PT. CITA PRISMA
2	Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID) Mesuji, Lampung	PT. AGUSTA PRIMAKARSA
3	Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID) Pulau Bunyu, Kalimantan Utara	PT. RAYASURVERINDO TIRTASARANA

5. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED)

Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan

Telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan tahun 2018 pada 22 (dua puluh dua) lokasi, yaitu:

Tabel III.21 Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tahunan Prov. Sulut TA. 2018	PT. Mettana
2	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Baa Prov. NTT TA. 2018	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa
3	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Jampea Prov. Susel TA. 2018	PT. Hasfarm Dian Konsultan
4	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo Prov. NTT TA. 2018	PT. Heger Daya
5	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Larantuka Prov. NTT TA. 2018	PT. Zifa Engineering Consultant
6	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan	PT. Agusta Primakarsa

	Pelabuhan Moor Prov. Papua TA. 2018	
7	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar Prov. Kalbar TA. 2018	PT. Zifa Engineering Consultant
8	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Prov. Babel TA. 2018	PT. Ditori Geokarya Teknik
9	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Saumlaki dan Molu Malu Prov. Maluku TA. 2018	PT. Agusta Primakarsa
10	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Geser dan Gorom Prov. Maluku TA. 2018	PT. Hasfarm Dian Konsultan
11	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Soasio Prov. Maluku TA. 2018	PT. Ditori Geokarya Teknik
12	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Pemenang dan Gili Trawangan Prov. NTB TA. 2018	PT. Hegar Daya
13	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Baubau dan Wanci Prov. Sultra TA. 2018	PT. Marindo Utama Penata Kawasan
14	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Ampana Prov. Sulteng TA. 2018	PT. Mettana
15	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Wini Prov. NTT TA. 2018	PT. Sapta Adhi Pratama
16	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tabilota Prov. NTT TA. 2018	PT. Mettana
17	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Raijua Prov. NTT TA. 2018	PT. Zifa Engineering Consultant
18	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Prov. Jateng TA. 2018	PT. Zifa Engineering Consultant

19	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Moa Prov. Maluku TA. 2018	PT. Heger Daya
20	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Laut Labuan Bajau Prov. Sumbar TA. 2018	PT. Ditoro Geokarya Teknik
21	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Marabatuan TA. 2018	PT. Rayasurverindo Tirtasarana
22	Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Marore TA. 2018	PT. Rayasurverindo Tirtasarana

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018

6. Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut

Telah dilaksanakan Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut tahun 2018 pada 13 (tiga belas) lokasi, yaitu:

Tabel III.22 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Hollat Prov. Maluku TA. 2018	PT. Munasa Kreasi Nusantara
2	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut P. Moor Prov. Papua TA. 2018	PT. Yuchi Kaji Tama
3	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Mesuji Prov. Sumsel TA. 2018	PT. Bumi Raya Konsultan
4	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Kuala Gaung Prov. Riau TA. 2018	PT. Alocita Mandiri
5	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Mantangisi Prov. Sulteng TA. 2018	PT. Munasa Kreasi Nusantara

6	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Lirung dan Miangas Prov. Sulut TA. 2018	PT. Yuchi Kaji Tama
7	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Agats Prov. Papua TA. 2018	PT. Sigma Ekspresi
8	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Bade Prov. Papua TA. 2018	PT. Cipta Buana Kunshuliayah
9	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Lerokis dan Arwala Prov. Maluku TA. 2018	PT. Ecoplan Rakabumi Interconsult
10	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Oransbari Prov. Papua Barat TA. 2018	PT. Arenco Binatama
11	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Poso Prov. Sulteng TA. 2018	PT. Arenco Binatama
12	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Mansalean Prov. Sulteng TA. 2018	PT. Cipta Buana Kunshuliayah
13	Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Pagerungan Prov. Jatim TA. 2018	PT. Inasa Sakha Kirana

7. Pengerukan Alur Pelayaran di 3 Lokasi

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran pada 3 (tiga) lokasi yaitu:

Tabel III.23 Pengerukan Alur Pelayaran di 3 Lokasi

No.	Lokasi	Volume	Keterangan/Waktu Penyelesaian
1	Pelabuhan Jepara	200,546.29	Nopember
2	Pelabuhan Luwuk	82,303.30	Desember
3	Pelabuhan Kwandang	390,228.10	Desember

8. Proyek Strategis Nasional

Sesuai dengan Perpres 3/2016 J.O. Perpres 58/2017 dan Perpres 56/2018 terdapat 10 (sepuluh) lokasi pelabuhan yang masuk dalam kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pada tahun 2018 masih sama lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu:

Tabel III.24 Proyek Strategis Nasional

NO	PSN (PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS)	LOKASI PROVINSI
1	Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung	Sumatera Utara
2	Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Sumatera Utara Sulawesi Utara
3	Pelabuhan KEK Maloy	Kalimantan Timur
4	Inland Waterways CBL	DKI-Jabar
5	Pelabuhan Patimban	Jawa Barat
6	Pelabuhan Sorong	Papua Barat
7	Makassar New Port	Sulawesi Selatan
8	Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Sulawesi Tengah
9	Terminal Kijing	Kalimantan Barat
10	Pelabuhan Kupang	Nusa Tenggara Timur

9. Perencanaan dan Penyiapan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Perencanaan dan Penyiapan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di 14 (empat belas) terdiri dari 12 (dua belas) lokasi menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan 2 (dua) lokasi dibantu oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), yaitu :

Tabel III.25 Perencanaan dan Penyiapan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs)

NO	LOKASI	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Wanci	PT. Hasfarm Dian Konsultan	Perencanaan
2	Banggai	PT. Hasfarm Dian Konsultan	Perencanaan
3	Belang-Belang	PT. Hasfarm Dian Konsultan	Perencanaan
4	Dobo	PT. Raya Surverindo Tirtasarana	Perencanaan
5	Pomako	PT. Raya Surverindo Tirtasarana	Perencanaan
6	Kaimana	PT. Raya Surverindo Tirtasarana	Perencanaan
7	Serui	PT. Raya Surverindo Tirtasarana	Perencanaan
8	Namlea	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa	Perencanaan
9	Tahuna	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa	Perencanaan
10	Tobelo	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa	Perencanaan
11	Saumlaki	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa	Perencanaan
12	Labuan Bajo	PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa	Perencanaan

Tabel III.26 lokasi yang dibantu oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

NO	LOKASI	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Anggrek	PT. PII (Persero)	Perencanaan dan Penyiapan
2	Baubau	PT. PII (Persero)	Penyiapan

10. Studi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Ahli Perawatan Fasilitas Pelabuhan

Telah disusun Studi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Ahli Perawatan Fasilitas Pelabuhan oleh PT. DITORI GEOKARYA TEKNIK KSO PT RAYASURVERINDO TIRTASARANA.

Studi tersebut berisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) pada subklasifikasi Ahli Perawatan Fasilitas Pelabuhan.

Salah satu lingkup pekerjaan adalah Konvensi merupakan proses pengakuan atau konsensus nasional dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan jabatan kerja yang disusun. Rancangan yang telah disepakati dalam konvensi dan telah diperbaiki oleh tim perumus diidentifikasi menjadi Rancangan SKKNI-3 dan KKNI-3. Konvensi dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Grand Mercure



Gambar III.18 Studi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Ahli Perawatan Fasilitas Pelabuhan

11. *The Development of Belawan Port Project*

Kegiatan *The Development Of Belawan Port Project Phase I* merupakan kegiatan pembangunan terminal peti kemas Pelabuhan Belawan yang merupakan pembiayaan dari *Islamic Development Bank (IDB)*, dengan lingkup pekerjaan antara lain:

- a. *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)* dilaksanakan selama 81 (delapan puluh satu) bulan;
- b. *PMU Expert Support* selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- c. Pekerjaan Fisik 1 Paket dilaksanakan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dan sesuai kontrak selesai pada tanggal 14 Februari 2019;

- d. *Financial Auditor Consultant* dilaksanakan selama 30 bulan 14 hari oleh BPKP;
- e. Progress pekerjaan fisik sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 94,03 % dengan tingkat deviasi +0,79 %.



Gambar III.19 *The Development Of Belawan Port Project Phase I*

12. Predredge Sounding Pekerjaan Penggerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan

Telah dilaksanakan Predredge Sounding Pekerjaan Penggerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan tahun 2018 pada 5 (lima) lokasi :

Program untuk pekerjaan penggerukan alur / kolam pelabuhan setiap tahunnya diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. Sebelum pelaksanaan penggerukan diperlukan survey hidrografi berupa survey predredge sounding yang bertujuan untuk mengetahui kondisi alur pelayaran pada awal pekerjaan.

Predredge sounding (pemeruman awal) dilaksanakan sebelum diadakan pekerjaan penggerukan oleh Pemberi Tugas. Data yang dihasilkan berupa Peta Bathimetri dan perhitungan volume keruk yang digunakan sebagai dasar penentuan perhitungan volume dan desain kedalaman pekerjaan penggerukan.

- Tahapan Pelaksanaan :

- a. Survey Bathimetri
 - ✓ Lapor kepada Kepala UPT dan minta pendampingan dari UPT dan Navigasi setempat
 - ✓ Koordinasi untuk referensi Benchmark dan titik acuan
 - ✓ Pengamatan pasang surut / selama pelaksanaan surveyor
 - ✓ Plot Area Survey

- ✓ Persiapan alat Echo Sounder & GPS di kapal
 - ✓ Test Bar
 - ✓ Survey Bathimetri
 - ✓ Hasil Rawdata dan Garmin Data Base (GDB)
- b. Tim Surveyor Subdit Pengerkuan dan Reklamasi memproses hasil Survey Bathimetri, sebagai berikut:
- ✓ Pengolahan data hasil Survey Bathimetri (GDB) dengan hasil pengamatan pasang surut
 - ✓ Penggambaran kedalaman area survey dengan Autocad
 - ✓ Presentasi internal hasil survey dihadapan Tim Teknis Subdit Pengerkuan dan Reklamasi
 - ✓ Pembuatan laporan untuk disampaikan ke Direktur Kepelabuhanan
- c. Pembahasan Desain Alur Pelayaran/ Kolam Pelabuhan, dengan tahapan sebagai berikut:
- ✓ Rapat pembahasan mengundang Kepala UPT/KPA/PPK dan User
 - ✓ Pemaparan hasil survey Bathimetri
 - ✓ Penyampaian kebutuhan akan desain Alur Pelayaran/ Kolam Pelabuhan oleh Kepala UPT disesuaikan dengan alokasi dana
 - ✓ Pembuatan desain Alur Pelayaran/ Kolam Pelabuhan (lebar, panjang, dan kedalaman)
 - ✓ Disepakati oleh Kepala UPT dan tim teknis dalam berita acara
 - ✓ Pembuatan profil melintang Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan kemudian dihitung volume pengerkuan
 - ✓ Penentuan jenis peralatan keruk dan penyampaian RKS (Rencana Kerja dan Syarat)

- ✓ Tanda tangan tim surveyor, KaSi I, KaSubDit 3, dan Ka UPT/KPA untuk diajukan ke Direktur Kepelabuhanan untuk mendapatkan persetujuan
- ✓ Setelah disetujui, di copy 3 (tiga) rangkap dan di scan untuk disimpan di Subdit Pengerukan dan Reklamasikan
- ✓ Diserahterimakan ke Kepala UPT sebagai dokumen Pre-Dredge Sounding berupa gambar Bathimetri lengkap dan desain pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan, volume keruk, dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat)

Tabel III.27 Kegiatan Predredge Sounding Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan tahun 2018

NO	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Luwuk	10 – 12 Januari 2018
2	Kolonedale	13 – 19 Januari 2018
3	Kwandang	24 – 27 Januari 2018
4	Sukadana	1 – 4 Februari 2018
5	Jepara	19 – 23 Februari 2018



Gambar III.20 Kegiatan *Predredge Sounding* Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan tahun 2018

c Pelayanan Pihak ke-3

Terdapat pelayanan perizinan dilingkungan Direktorat Kepelabuhanan yang terdiri dari 11 (sebelas) perizinan, yaitu :

Tabel III.28 Pelayanan pihak ke-3 yang telah ditetapkan Tahun 2018

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN
1.	Permohonan Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus	69
2.	Permohonan Izin Keja Keruk (SIKK) Permohonan Izin Kerja Reklamasi (SIKR)	23 9
3.	Penetapan Operasional 24 Jam pada Terminal Khusus	9
4.	Permohonan izin pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	23
5.	Penetapan Terminal Khusus (Tersus) yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri	2
6.	Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).	128
7.	Izin Pengoperasian Tersus, Izin Perpanjangan Pengoperasian Tersus	44 42
8.	Persetujuan Pelabuhan Umum tahun 2018	5
9.	Jumlah Persetujuan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Tersus tahun 2018	39
10.	Izin Penggunaan Tersus Untuk Melayani Umum Sementara Izin Penggunaan TUKS Untuk Melayani Umum Sementara	6 7
11.	Izin Penggunaan Garis Pantai	58

3. Kegiatan Tidak Terlaksana

- a. Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Teknis Pembangunan Pelabuhan bagi KPA, PPK, Staf Teknis, Konsultan Pelaksana, Supervisi dan Kontraktor Pelaksana Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan seyogyanya bimbingan teknis ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk memberikan pengarahan teknis kepada para Pelaksana Kegiatan, namun dikarenakan waktu mulai Pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan yang berbeda-beda, maka kegiatan ini menjadi kurang efektif. Waktu mulai pekerjaan fasilitas pelabuhan berbeda-beda dan mengalami keterlambatan
- b. Pemutakhiran Data Hasil Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tidak terlaksana dikarenakan pekerjaan telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan

4. Kegiatan Lainnya (tidak memiliki alokasi anggaran pada DIPA tetapi bersifat Strategis)

- a. Perencanaan dan Penyiapan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ada 2 (dua) lokasi yang dibantu oleh PT. Penjaminan Infra Struktur Indonesia (Persero) yaitu :

Tabel III.29 Perencanaan dan Penyiapan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

NO	LOKASI	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Anggrek	PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)	Perencanaan dan Penyiapan
2	Bau-Bau	PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)	Penyiapan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel III.30 Lampiran SIKK

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
1	PT. Pelindo II (persero) Cabang Pontianak	BX - 02 / PP 207 tgl 15 Jan 2018
2	PT. Semen Padang	BX-04/PP 207 tgl 19 Jan 2018
3	PT Jorong Barutama Greston	BX-03/PP 207 tgl 19 Jan 2018
4	PT. Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu	PP.207/1/1/DJPL-18 tgl 14 Feb 2018 Pengganti SK No. BX-41/PP-207
5	PT Surya Sakti Darma Kencana	BX-21/PP 207 tgl 15 Mar 2018
6	PT ASDP Indonesia Ferry	BX-75/PP 207 tgl 9 Apr 2018
7	PT Sumber Segara Primadaya	BX-98/PP 207 tgl 18 Apr 2018
8	PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Bengkayang, Kalbar	BX-130/PP 207 tgl 14 Mei 2018
9	PT. Pelindo II (persero) Cabang Gresik	BX-129/PP 207 tgl 14 Mei 2018
10	PT Maritim Barito Perkasa	BX-135/PP 207 tgl 18 Mei 2018
11	PT. Pelindo III (persero) Cabang Benoa	BX-144/PP 207 tgl 30 Mei 2018 Pengganti SK No. BX 505/PP207
12	PT Mitra Bangka Resources Bangka Belitung	BX-157/PP 207 tgl 22 Jun 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
13	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	BX-154/PP 207 tgl 7 Jun 2018
14	PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) Pacitan	BX-166/PP 207 tgl 4 Jul 2018
15	KUPP Kelas III Luwuk	B-XI-174/PP 207 tgl 11 Jul 2018
16	PT. Pelindo III (Persero) APBS	BX-175/PP 207 tgl 11 Jul 2018
17	BP BERAU. Ltd .	BX-255/PP 207 tgl 27 Agt 2018
18	PT. Lautan Phinisi Resources	BX-321/PP 207 tgl 24 Sept 2018
19	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia	BX-322/PP 207 tgl 26 Sept 2018
20	Satker Pembangunan Pelabuhan Patimban	BX-325/PP 207 tgl 27 Sept 2018
21	PT. Pelindo III (Persero) Semarang	BX-384/PP 207 tgl 8 Nop 2018
22	PT Agra Bareksa Indonesia	BX-389/PP 207 tgl 14 Nop 2018
23	PT Ambang Barito Nusapersada	BX-388/PP 207 tgl 14 Nop 2018

Tabel III.31 Lampiran SIKR

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
1	PT. Pelindo IV (persero) Cabang Kendari	KP 532 TAHUN 2018 tgl 26 Mar 2018
2	PT. Bintan Alumina Indonesia	KP 627 TAHUN 2018 tgl 11 Apr 2018
3	PT. Batam Sentralindo	KP 764 TAHUN 2018 tgl 3 Mei 2018
4	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	KP 810 TAHUN 2018 tgl 17 Mei 2018
5	ASDP Indonesia Ferry (Persero)	KP 812 TAHUN 2018 tgl 17 Mei 2018
6	PT. Maspion Industrial Estat	KP 959 TAHUN 2018 tgl 21 Jun 2018
7	Satker Pembangunan Pelabuhan Patimban	KP 1620 TAHUN 2018 tgl 3 Okt 2018
8	PT Surya Sarana Marina	KP 1707 TAHUN 2018 tgl 16 Okt 2018
9	PT Dok Marina Bungus	KP 1923 TAHUN 2018 tgl 28 Nop 2018

Tabel III.32 lampiran BUP

NO	NAMA BADAN USAHA	NOMOR SK	TANGGAL
1	PT. Sumber Armada Tunda	2/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	24 Januari 2018
2	PT. Snepac Indo Service	3/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	2 Februari 2018
3	PT. Indonesia Multi Purpose Terminal	19/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	5 Juni 2018
4	PT. Tata Bumi Khatulistiwa	16/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	5 Juni 2018
5	PT. Indo Kontainer Sarana	8/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	3 April 2018
6	PT. Mega Agung Liong Nusantara	4/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	22 Maret 2018
7	PT. Seraya Terminal	5/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	22 Maret 2018
8	PT. Gresik Jasatama	7/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	3 April 2018
9	PT. Dire Pratama	6/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	3 April 2018
10	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	10/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	26 April 2018
11	PT. Titian Labuan Anugrah	9/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	26 April 2018
12	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia	1/1/IU-PELABUHAN/PMA/2018	26 April 2018
13	PT. Terminal Borneo Indonesia	14/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	4 Juni 2018
14	PT. Bias Delta Pratama	11/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	26 April 2018
15	PT. Bandar Bakau Jaya	12/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	27 April 18
16	PT. Sarana Lintas Bahari	17/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	5 Juni 18
17	PT. Pelabuhan Samudera Palaran	20/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	7 Juni 18
18	PT. Andhika Andalantama	18/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	5 Juni 18
19	PT. Borneo Internasional Terminal	21/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	7 Juni 18
20	PT. Pribumi Citra Megah Mandiri	15/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	5 Juni 18

21	PT. Citra Mandiri Terminal	22/I/IU-PELABUHAN/PMDN/2018	21 Juni 18
22	PT. Siam Maspion Terminal	2/I/IU-PELABUHAN/PMA/2018	5 Juni 18
23	PT. Indonesia Bulk Terminal	3/I/IU-PELABUHAN/PMA/2018	5 Juni 18

Tabel III.33 Penetapan Pengoperasian 24 Jam

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. Panca Amara Utama (PAU)	BX - 394 / PP 008	13 November 2018
2	PT. Trimegah Bangun Persada (TBP)	BX - 450 / PP 008	14 Desember 2018
3	PT. Pertamina (Persero)	BX - 488 / PP 008	20 Desember 2018
4	PT. Pertamina (Persero)	BX - 490 / PP 008	20 Desember 2018
5	PT. Pertamina (Persero)	BX - 491 / PP 008	20 Desember 2018
6	PT. Pertamina (Persero)	BX - 492 / PP 008	20 Desember 2018
7	PT. Pertamina (Persero)	BX - 493 / PP 008	20 Desember 2018
8	PT. Pertamina (Persero)	BX - 494 / PP 008	20 Desember 2018
9	PT. Pertamina (Persero)	BX - 495 / PP 008	20 Desember 2018

Tabel III.34 Izin Pembangunan Pelabuhan Umum

NO	NAMA KANTOR/ PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	UPP KUALA TANJUNG	BX-341/PP.008	16 Oktober 2018
2	PT. BINTANG 99 PERSADA	BX-364/PP.008	2 Nopember 2018
3	UPP MAUMERE	BX-404/PP.008	27 Nopember 2018
4	UPP BANTEN	BX-483/PP.008	18 Desember 2018
5	UPP TANJUNG BALAI KARIMUN	BX-489/PP.008	20 Desember 2018

Tabel III.35 Pengelolaan TUKS

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	BX-06 / PP.008	01 Februari 2018
2	PT. SRIBOGA FLOUR MILL	BX-17 / PP.008	21 Februari 2018
3	PT. FARIIKA STEEL	BX-29 / PP.008	22 Maret 2018
4	PT. KUTAI CHIP MILL	BX-33 / PP.008	23 Maret 2018
5	PT. SYUKUR BERSAUDARA	BX-37 / PP.008	26 Maret 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
6	PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA	BX-38 / PP.008	26 Maret 2018
7	PT. JANATA MARINA INDAH	BX-39 / PP.008	26 Maret 2018
8	PT. BAROKAH GALANGAN PERKASA	BX-40 / PP.008	26 Maret 2018
9	PT. NIAGA BARU GALANGAN	BX-41 / PP.008	26 Maret 2018
10	PT. SEGARA JAYA LERTARI	BX-43 / PP.008	26 Maret 2018
11	PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA SHIPYARD	BX-44 / PP.008	29 Maret 2018
12	PT. KUMALA BAHARI DOCKYARD	BX-45 / PP.008	29 Maret 2018
13	PT. PAL INDONESIA	BX-46 / PP.008	29 Maret 2018
14	PT. MARLIN KAPUAS BAHARI	BX-47 / PP.008	29 Maret 2018
15	PT. KARYA PACIFIC TEKNIK	BX-48 / PP.008	29 Maret 2018
16	PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD	BX-49 / PP.008	29 Maret 2018
17	PT. YASA WAHANA	BX-50 / PP.008	29 Maret 2018
18	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BX-54 / PP.008	02 April 2018
19	PT. INDONESIA POWER	BX-55 / PP.008	02 April 2018
20	PT. PLN (PERSERO) TELUK BAYUR	BX-57 / PP.008	02 April 2018
21	PT. SAMUGARA MULTIKARYA	BX-59 / PP.008	02 April 2018
22	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD	BX-60 / PP.008	02 April 2018
23	PT. NUSANTARA DOCKING SEJAHTERA	BX-61 / PP.008	02 April 2018
24	CV. BARUTAMA	BX-76 / PP.008	13 April 2018
25	CV. KARYA PACIFIC TEKNIK	BX-77 / PP.008	13 April 2018
26	PT. GARAM	BX-78 / PP.008	13 April 2018
27	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BX-79 / PP.008	13 April 2018
28	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BX-81 / PP.008	13 April 2018
29	PT. SEMEN INDONESIA	BX-86 / PP.008	13 April 2018
30	PT. STEADFAST MARINE	BX-87 / PP.008	13 April 2018
31	PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA	BX-88 / PP.008	13 April 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
32	PT. CHANDRA ASRI PERTROCHEMICAL	BX-91 / PP.008	13 April 2018
33	PT. TIMAH	BX-93 / PP.008	13 April 2018
34	PT. BUMI LIPUTAN PENDINGIN	BX-101 / PP.008	24 April 2018
35	PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA	BX-102 / PP.008	24 April 2018
36	PT. MARALES JAYA SENTOSA	BX-105 / PP.008	24 April 2018
37	PT. MAXIMA TIGA BERKAT	BX-113 / PP.008	02 Mei 2018
38	PT. SEGARA JAYA LERTARI	BX-115 / PP.008	02 Mei 2018
39	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA	BX-124 / PP.008	14 Mei 2018
40	PT. SEMEN INDONESIA	BX-127 / PP.008	14 Mei 2018
41	PT. MULTI NABATI ASAHAH	BX-132 / PP.008	25 Mei 2018
42	PT. DWIMATAMA MULTIKARYA	BX-142 / PP.008	25 Mei 2018
43	PT. MITRA PATRA BORNEO	BX-152 / PP.008	06 Juli 2018
44	SKK MIGAS PETROGAS (BASIN) LTD ARAR MARINE TERMINAL	BX-155 / PP.008	08 Juli 2018
45	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BX-177 / PP.008	16 Juli 2018
46	PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU	BX-179 / PP.008	16 Juli 2018
47	PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA	BX-182 / PP.008	18 Juli 2018
48	PT. JEMBAYAN MUARABARU	BX-186 / PP.008	26 Juli 2018
49	PT. PURTA SULTRA SAMUDERA	BX-191 / PP.008	26 Juli 2018
50	PT. PACIFIC GRANITAMA	BX-192 / PP.008	26 Juli 2018
51	PT. BASIRIH INDUSTRIAL	BX-205 / PP.008	08 Agustus 2018
52	PT. ADIMITRA BARATAMA	BX-208 / PP.008	08 Agustus 2018
53	PT. MAYON SAMUDERA PACIFIK	BX-210 / PP.008	08 Agustus 2018
54	PT. ALFARA DELTA PERSADA	BX-213 / PP.008	08 Agustus 2018
55	SKK MIGAS DUMAI	BX-203 / PP.008	08 Agustus 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
56	PT. PELAYARAN SUMBER REJEKI	BX-215/ PP.008	09 Agustus 2018
57	PT. SINAR JAYA INTI MULYA	BX-217/ PP.008	10 Agustus 2018
58	PT. MULIA BAHARI SEJAHTERA	BX-228/ PP.008	20 Agustus 2018
59	PT. POLYCHEM INDONESIA	BX-236/ PP.008	21 Agustus 2018
60	PT. SINAR ALAM DUTA PERSADA	BX-238/ PP.008	21 Agustus 2018
61	PT. PETROKIMIA GRESIK	BX-240/ PP.008	21 Agustus 2018
62	PT. TITAN WIJAYA	BX-241/ PP.008	21 Agustus 2018
63	PT. ASPAL INDONESIA	BX-242/ PP.008	23 Agustus 2018
64	PT. DHARMA KARYA PERDANA	BX-243/ PP.008	23 Agustus 2018
65	PT. KRAKATU STEAL	BX-252/ PP.008	27 Agustus 2018
66	PT. ASPALINDO HAMPARANPUTRA	BX-253/ PP.008	27 Agustus 2018
67	PT. ITHACI KARTIKA UTAMA	BX-254/ PP.008	27 Agustus 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
68	PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION	BX-298/PP.008	10 September 2018
69	PT. DOK PENDINGIN	BX-310/PP.008	19 September 2018
70	PT. RAJA KUTAI MAKMUR	BX-314/PP.008	20 September 2018
71	PT. ALOE VERA INDONESIA	BX-318/PP.008	21 September 2018
72	PT. KTH MINING ENGINEERING	BX-330/PP.008	27 September 2018
73	PT. INDAH KIAT PUL AND PAPER	BX-343/PP.008	17 Oktober 2018
74	PT. WARUNA SHIPYARD	BX-354/PP.008	24 Oktober 2018
75	PT. CITRA RAJA AMPAT	BX-348/PP.008	24 Oktober 2018
76	PT. WATU SINAI ABADI	BX-356/PP.008	24 Oktober 2018
77	PT. CITRA BAHARI SHIPYARD	BX-334/PP.008	03 Oktober 2018
78	PT. PULAU SAMBU	BX-355/PP.008	03 Oktober 2018
79	PT. DOK DAN PERKAPALAN WAIAME	BX-350/PP.008	24 Oktober 2018
80	PT. PANTAI DAMAI SEJAHTERA	BX-363/PP.008	02 November 2018
81	PT. PLN PANGKALAN SUSU	BX-365/PP.008	02 November 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
82	PT. PETROSEA TBK	BX-396/PP.008	15 November 2018
83	PT. PETROSEA TBK	BX-397/PP.008	15 November 2018
84	PT. H & H UTAMA	BX-393/PP.008	15 November 2018
85	PT. SOMA DAYA UTAMA	BX-399/PP.008	21 November 2018
86	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES	BX-401/PP.008	27 November 2018
87	PT. WARU KALTIM PLANTATIONS	BX-406/PP.008	27 November 2018
88	PT. DIAN YARPAN JAYA MANDIRI	BX-402/PP.008	27 November 2018
89	PT. ARBE STYRINDO	BX-411/PP.008	29 November 2018
90	PT. TANJUNG REDEP HUTANI	BX-415/PP.008	29 November 2018
91	PT. CITRA BAHARI SHIPYARD	BX-413/PP.008	29 November 2018
92	PT. SARANA SEJAHTERA SHIPYARD	BX-416/PP.008	29 November 2018
93	PT. RANJI KARYA SAKTI	BX-421/PP.008	30 November 2018
94	PT. PANTAI MULIA SEMESTA	BX-417/PP.008	05 Desember 2018
95	PT. MUTIARA ETAM COAL	BX-425/PP.008	10 Desember 2018
96	PT. INSANI BARA PERKASA	BX-434/PP.008	10 Desember 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
97	PT. BUKIT BAIDURI ENERGI	BX-429/PP.008	10 Desember 2018
98	PT. BUMI PERMAI LESTARI	BX-437/PP.008	10 Desember 2018
99	PT. NOAHTU SHIPYARD	BX-439/PP.008	10 Desember 2018
100	PT. CAHAYA SANTRACO UTAMA	BX-428/PP.008	10 Desember 2018
101	PT. SEMEN TONASA	BX-427/PP.008	10 Desember 2018
102	PT. JASA ANDIKA RAYA	BX-440/PP.008	10 Desember 2018
103	PT. ALAMJAYA BARA PRATAMA	BX-458/PP.008	14 Desember 2018
104	PT. HARLIS TATA TANTA	BX-473/PP.008	14 Desember 2018
105	CV. BATU MULIA	BX-448/PP.008	14 Desember 2018
106	PT. GERBANG DAYA MANDIRI	BX-447/PP.008	14 Desember 2018
107	PT. BERKAT SWADAYA MANDIRI	BX-445/PP.008	14 Desember 2018
108	PT. CAHAYA FAJAR KALTIM	BX-455/PP.008	14 Desember 2018
109	CV. KARYA CAHAYA MANDIRI	BX-462/PP.008	14 Desember 2018
110	PT. MNC INFRASTRUKTUR	BX-456/PP.008	14 Desember 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
111	PT. ANUGERAH BARA INSAN	BX-451/PP.008	14 Desember 2018
112	PT. APEX INDOPACIFIC	BX-454/PP.008	14 Desember 2018
113	PT. RADIOS APIRJA SORONG	BX-472/PP.008	14 Desember 2018
114	PT. MAHKAM COAL TERMINAL	BX-459/ PP.008	14 Desember 2018
115	PT. BARHIND	BX-461/ PP.008	14 Desember 2018
116	PT. INDOKAL PRIMA JAYA	BX-460/ PP.008	14 Desember 2018
117	PT. MULTI HARAPAN UTAMA	BX-465/PP.008	14 Desember 2018
118	PT. BORNEO KARYA PERSADA	BX-449/PP.008	14 Desember 2018
119	PT. PANCARAN SURYA ABADI	BX-446/ PP.008	18 Desember 2018
120	PT. INDO PERKASA	BX-457/ PP.008	14 Desember 2018
121	PT. LOTTE CHEMICAL INDONESIA	BX-476/ PP.008	18 Desember 2018
122	PT. MERAK ENERGI INDONESIA	BX-481/PP.008	18 Desember 2018
123	PT. MERAK ENERGI INDONESIA	BX-481/PP.008	18 Desember 2018
124	PT. SULFINDO ADI USAHA	BX-471/PP.008	18 Desember 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
125	PT. BUKIT SANUR WIJAYA	BX-486/PP.008	18 Desember 2018
126	PT. VOPAK TERMINAL MERAK	BX-480/PP.008	18 Desember 2018
127	PT. RODA MAS KALBAR	BX-503/PP.008	20 Desember 2018
128	PT. ANGKASA RAYA DJAMBI	BX-509/PP.008	26 Desember 2018

Tabel III. 36 JUMLAH PERSETUJUAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERSUS TAHUN 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. BHUMI JATI POWER	BX-12 / PP.008	07 Februari 2018
2	PT. AGRA BARESKA INDONESIA	BX-18 / PP.008	08 Maret 2018
3	SKK MIGAS CST	BX-23 / PP.008	19 Maret 2018
4	PT. NONGSA JAYA BIUANA	BX-30 / PP.008	22 Maret 2018
5	PT. KUARINDO PRATAMA JAYA	BX-35 / PP.008	23 Maret 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
6	PT. CIREBON ENERGI PRASARANA	BX-51 / PP.008	29 Maret 2018
7	PT. BIO INTI AGRINDO	BX-53 / PP.008	02 April 2018
8	PT. PLN (PERSERO) BENGKAYANG	BX-65 / PP.008	02 April 2018
9	PT. HOLCIM INDONESIA TBK	BX-89 / PP.008	13 April 2018
10	PT. HARMONY ENERGI INDONESIA	BX-107 / PP.008	24 April 2018
11	PT. AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL	BX-110 / PP.008	02 Mei 2018
12	PT. KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA	BX-111 / PP.008	02 Mei 2018
13	PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA	BX-114 / PP.008	02 Mei 2018
14	PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR	BX-133 / PP.008	17 Mei 2018
15	PT. LAMAN MINING	BX-134 / PP.008	17 Mei 2018
16	PT. BINTANG SINAR PERKASA	BX-141 / PP.008	25 Mei 2018
17	PT. CIKARANG LISTRINDO	BX-160 / PP.008	25 Juni 2018
18	PT. BAKAL MAKMUR SEJAHTERA	BX-161 / PP.008	25 Juni 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
19	PT. BUMI MOROWALI UTAMA	BX-181 / PP.008	18 Juli 2018
20	PT. PIPIT MUTIARA JAYA	BX-189/ PP.008	26 Juli 2018
21	PT. THRVENI	BX-206/ PP.008	08 Agustus 2018
22	PT. INTEGRA MINING	BX-218/ PP.008	10 Agustus 2018
23	PT. JATI DHARMA INDAH	BX-2220/ PP.008	13 Agustus 2018
24	PT. ILMI BANGUN MARINE	BX-223/ PP.008	14 Agustus 2018
25	PT. INTI BENUA PERKASATAMA	BX-224/ PP.008	15 Agustus 2018
26	PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA	BX-227/ PP.008	20 Agustus 2018
27	PT. BAHARI BERKAH MADANI	BX-262/ PP.008	29 Agustus 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
28	PT. WIHARCO PRIMA	BX-263/ PP.008	29 Agustus 2018
29	PT. PIPIT MUTIARA INDAH	BX-267/ PP.008	29 Agustus 2018
30	PT. CITRA LAMPIA MANDIRI	BX-268/ PP.008	03 September 2018
31	PT. KHARISMA ALAM PERSADA	BX-299/ PP.008	10 September 2018
32	PT. REKIND DAYA MAMUJU	BX-296/PP.008	10 September 2018
33	PT. BUMI SUKSESINDO	BX-303/PP.008	13 September 2018
34	PT. HOFFMAN ENERGI PERKASA	BX-312/PP.008	19 September 2018
35	PT. WIJAYA SENTOSA	BX-326/PP.008	27 September 2018
36	PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL	BX-331/PP.008	01 Oktober 2018
37	PT. MARINE DEL RAY	BX-361/PP.008	15 Oktober 2018
38	PT. PANCA USAHA PALOPO	BX-420/PP.008	30 November 2018
39	PT. HUADI NIKEL -ALLOY INDONESIA	BX-424/PP.008	07 Desember 2018

Tabel III.37 IZIN PENGOPERASIAN TERSUS

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	SKK MIGAS CAMAR MARINE TERMINAL	BX-19 / PP.008	13 Maret 2018
2	SKK MIGAS	BX-20 / PP.008	13 Maret 2018
3	PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA	BX-42 / PP.008	26 Maret 2018
4	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BX-56 / PP.008	02 April 2018
5	PT. FORTUNA ASIA GAS	BX-62 / PP.008	02 April 2018
6	PT. MADANI CITRA MANDIRI	BX-74 / PP.008	06 April 2018
7	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BX-80 / PP.008	13 April 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
8	SKK MIGAS KASIM MARINE TERMINAL	BX-90 / PP.008	13 April 2018
9	PT. YANI JAYA SUKSES	BX-103 / PP.008	24 April 2018
10	PT. PARNA AGRO MAS	BX-106 / PP.008	24 April 2018
11	PT. DAYA MAJU LESTARI	BX-139 / PP.008	21 Mei 2018
12	PT. SILVA RIMBA LESTARI	BX-140 / PP.008	25 Mei 2018
13	PT. MARITA MAKMUR JAYA	BX-150 / PP.008	06 Juni 2018
14	PT. ISLAND CONNECTIONS	BX-151 / PP.008	06 Juni 2018
15	PT. KUALA HARAPAN BERSAMA	BX-164 / PP.008	29 Juni 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
16	SKK MIGAS TUBAN	BX-179 / PP.008	18 Juli 2018
17	PT. KIDECO JAYA AGUNG	BX-183 / PP.008	18 Juli 2018
18	PT. BAULA PETRA BUANA	BX-207 / PP.008	08 Agustus 2018
19	PT. CITA MINERAL INVESTINDO	BX-237/ PP.008	21 Agustus 2018
20	PT. PLN (PERSERO)	BX-246/ PP.008	23 Agustus 2018
21	PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING	BX-246/ PP.008	23 Agustus 2018
22	PT. HIHUAU LESTARI RAYA	BX-205/PP.008	10 September 2018
23	PT. DAYA TANI KALBAR	BX-319/PP.008	21 September 2018
24	PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL	BX-320/PP.008	21 September 2018
25	PT. SINDO LUMBER	BX-317/PP.008	21 September 2018
26	PT. AMEDCO JAYA MAKMUR	BX-316/PP.008	21 September 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
27	PT. MANDIRI SUKSESINDO JAYA	BX-348/PP.008	19 Oktober 2018
28	PT. INDAH KIAT PUL AND PAPER	BX-343/PP.008	17 Oktober 2018
29	PT. SINAR KENCANA INTI	BX-352/PP.008	03 Oktober 2018
30	PT. TELUK BINTUNI MINA AGRO	BX-351/PP.008	24 Oktober 2018
31	PT. PUNDI LAHAN	BX-367/PP.008	02 November 2018
32	PT. KAPUAS ARMADA SARANA	BX-370/PP.008	02 November 2018
33	PT. HINDOLI	BX-405/PP.008	27 November 2018
34	PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA	BX-403/PP.008	27 November 2018
35	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA	BX-407/PP.008	27 November 2018
36	PT. TRANSPACIFIC AGRO	BX-418/PP.008	29 November 2018
37	PT. PINANG WIRMAS SEJATI	BX-419/PP.008	29 November 2018
38	PT. NAGA MAS MAKMUR	BX-426/PP.008	10 Desember 2018
39	PT. MARIANA BAHAGIA	BX-436/PP.008	10 Desember 2018
40	PT. KOTABESI IRON MINING	BX-453/PP.008	14 Desember 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
41	PT. TANJUNG REDEP HUTANI	BX-466/PP.008	14 Desember 2018
42	GDE KADEK BROTHER	BX-471/ PP.008	14 Desember 2018
43	PT. PADA IDI	BX-477/ PP.008	18 Desember 2018
44	PT. CITRANUSA INTI SAWIT	BX-507/PP.008	26 Desember 2018

Tabel III.38 IZIN PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERSUS

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. JORONG BARUTAMA GRESTON	BX-26 / PP.008	21 Maret 2018
2	PT. SUMATERA MAJU JAYA	BX-31 / PP.008	22 Maret 2018
3	PT. KUMALA INDONESIA SHIPYARD	BX-34 / PP.008	23 Maret 2018
4	PT. DUTA TAMBANG REKAYASA	BX-63 / PP.008	02 April 2018
5	PT. ARUTMIN INDONESIA	BX-97 / PP.008	18 April 2018
6	PT. SARANA BINA SEMESTA ALAM	BX-108 / PP.008	24 April 2018
7	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA	BX-112 / PP.008	02 Mei 2018
8	PT. BRITOIL OFFSHORE	BX-116 / PP.008	02 Mei 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
9	PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN	BX-117 / PP.008	02 Mei 2018
10	PT. GUNUNG BARA UTAMA	BX-149 / PP.008	06 Juni 2018
11	PT. PLN (PERSERO) SEBALANG	BX-158 / PP.008	25 Juni 2018
12	PT. GUNUNG EMAS ABADI	BX-162 / PP.008	25 Juni 2018
13	PT. BLACK BEAR RESOURCES	BX-171 / PP.008	10 Juli 2018
14	PT. PERKASA INAKAKERTA	BX-170 / PP.008	09 Juli 2018
15	PT. PIPIT MUTIARA JAYA	BX-190/ PP.008	26 Juli 2018
16	PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA	BX-201/ PP.008	31 Juli 2018
17	PT. BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR	BX-211/ PP.008	08 Agustus 2018
18	PT. TAMTAMA PERKASA	BX-212/ PP.008	08 Agustus 2018
19	PT. BANGUNAN AGUNG	BX-214/ PP.008	08 Agustus 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
20	PT. GALANGAN MERCUSUAR	BX-216/ PP.008	10 Agustus 2018
21	PT. ALFACO INDONESIA	BX-221/ PP.008	13 Agustus 2018
22	PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI	BX-232/ PP.008	21 Agustus 2018
23	PT. TAPIN SARANA JAYA	BX-233/ PP.008	21 Agustus 2018
24	PT. TALENTA BUMI	BX-234/ PP.008	21 Agustus 2018
25	PT. BUMI DHARM KENCANA	BX-235/ PP.008	21 Agustus 2018
26	PT. LEMBU SWANA PERKASA	BX-239/ PP.008	21 Agustus 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
27	PT. JABEL TRI BERSAUDARA	BX-266/ PP.008	29 Agustus 2018
28	PT. SENIMBA BAY RESORT	BX-277/ PP.008	10 September 2018
29	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	BX-332/PP.008	01 Oktober 2018
30	PT. PLN (PERSERO) TUBAN	BX-339/PP.008	12 Oktober 2018
31	PT. PLN (PERSERO) PACITAN	BX-340/PP.008	12 Oktober 2018
32	PT. HERO PROGRES INTERNATIONAL	BX-349/PP.008	23 Oktober 2018
33	PT. ANEKA TAMBANG	BX-375/PP.008	02 November 2018
34	PT. ANEKA TAMBANG	BX-372/PP.008	02 November 2018
35	PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL	BX-386/PP.008	12 November 2018
36	PT. PRIMA MITRA JAYA	BX-435/PP.008	10 Desember 2018
37	PT. ITACHA RESOURCES	BX-468/ PP.008	14 Desember 2018
38	PT. RIMBA KURNIA ALAM	BX-485/PP.008	18 Desember 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
39	PT. SWARNA DWIPA DERMAGA	BX-502/PP.008	21 Desember 2018
40	PT. SAMBAS MINERAL MINING	BX-504/PP.008	26 Desember 2018
41	PT. MCDERMOT INDONESIA	BX-508/PP.008	26 Desember 2018
42	PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA	BX-511/PP.008	26 Desember 2018

Tabel III.39 IZIN PENGGUNAAN TERSUS UNTUK MELAYANI UMUM
SEMENTARA

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. TITAN WIJAYA	KP 540 TAHUN 2018	03 April 2018
2	PT. BORNEO INTER NUSA	KP 669 TAHUN 2018	17 April 2018
3	PT. BORNEO INTER NUSA	KP 669 TAHUN 2018	17 April 2018
4	PT. HASNUR JAYA UTAMA	KP 1568 TAHUN 2018	27 September 2018
5	PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER	KP 1596 TAHUN 2018	28 September 2018
6	PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES	KP 1595 TAHUN 2018	28 September 2018

Tabel III.40 IZIN PENGGUNAAN TUKS UNTUK MELAYANI UMUM SEMENTARA

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. TUNAS INTI ABADI	BX-64 / PP.008	02 April 2018
2	PT. BARA KUMALA	BX-123 / PP.008	11 Mei 2018
3	PT. SEMEN KUTAI KALTIM	BX-153 / PP.008	06 Juli 2018
4	PT. TIARA ABADI SENTOSA	BX-244/ PP.008	23 Agustus 2018
5	PT. BARA KUMALA SAKTI	BX-251/ PP.008	27 Agustus 2018
6	PT. SELLA PUTRI WULANDARI	BX-382/ PP.008	06 November 2018
7	PT. SIAM MASPION TERMINAL	BX-422/PP.008	05 Desember 2018

Tabel III.41 IZIN PENETAPAN LOKASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
1	PT. FAZDA PERTAMBANGAN BEBATUAN	KP. 191 TAHUN 2018 TGL. 30 JANUARI 2018
2	PT. MARITIME INDO LESTARI	KP. 254 TAHUN 2018 TGL. 9 Februari 2018
3	PT. ANEKA SARANA SENTOSA	KP 601 TAHUN 2018 TGL. 10 April 2018
4	PT. CITRA SAWIT LESTARI	KP 696 TAHUN 2018 TGL. 18 April 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
5	PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA	KP 603 TAHUN 2018 TGL. 10 April 2018
6	PT. UNI RAYA TIMBER	KP 600 TAHUN 2018 TGL. 10 April 2018
7	PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS	KP 697 TAHUN 2018 TGL. 18 April 2018
8	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	KP 699 TAHUN 2018 TGL. 18 April 2018
9	PT. HOFFMEN INTERNATIONAL	KP 599 TAHUN 2018 TGL. 10 April 2018
10	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	KP 698 TAHUN 2018 TGL. 18 April 2018
11	PT. TIRAN INDONESIA	KP 667 TAHUN 2018 TGL. 17 April 2018
12	PT. KHARISMA ALAM PERSADA	KP 668 TAHUN 2018 TGL. 17 April 2018
13	PT. BERKAH DAYA MANDIRI	KP 408 TAHUN 2018 TGL. 2 Maret 2018
14	PT. MABAR ELEKTRINDO	KP 602 TAHUN 2018 TGL. 10 April 2018
15	PT. BUMI SUKSESINDO	KP 624 TAHUN 2018 TGL. 11 April 2018
16	PT. KEINZ VENTURA	KP 629 TAHUN 2018 TGL. 11 April 2018
17	PT. BHUMI KARYA UTAMA	KP 628 TAHUN 2018 TGL. 11 April 2018
18	PT. BUANA CIPTA MANDALA	KP 553 TAHUN 2018 TGL. 29 Maret 2018
19	PT. PARNA AGROMAS	KP 623 TAHUN 2018 TGL. 11 April 2018
20	PT. KWARSALAMPUR PRATAMA	KP 411 TAHUN 2018 TGL. 5 Maret 2018
21	PT. CITRA LAMPIA MANDIRI	KP 1119 TAHUN 2018 TGL. 30 Juli 2018
22	PT. CITRA KHUSUMA SULTRA	KP 1120 TAHUN 2018 TGL. 30 Juli 2018
23	PT. MEGAH BANGUN SEJAHTERA	KP 1070 TAHUN 2018 TGL. 24 Juli 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
24	PT. SUKSES KARYA SAWIT	KP 1311 TAHUN 2018 TGL. 21 Agustus 2018
25	PT. HAMPARAN ANUGRAH ABADI	KP 1285 TAHUN 2018 TGL. 13 Agustus 2018
26	PT. BUMI MAS KAWINDA JAYA	KP 1567 TAHUN 2018 TGL. 26 September 2018
27	PT. BINANGA HARTAMA RAYA	KP 1566 TAHUN 2018 TGL. 20 September 2018
28	PT. TRITUNAS SINAR BENUA	KP 1527 TAHUN 2018 TGL. 24 September 2018
29	PT. TUAH GLOBE MINING	KP 1484 TAHUN 2018 TGL. 13 September 2018
30	PT. PLN (Persero) PLTU LOMBOK PEAKER	KP 1275 TAHUN 2018 TGL. 10 Agustus 2018
31	PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Sektor Pembangkitan Minahasa	KP 711 TAHUN 2018 TGL. 3 Mei 2018
32	PT. MEGA NUR	KP 1333 TAHUN 2018 TGL. 23 Agustus 2018
33	PT. PRIMA UTAMA LESTARI	KP 1402 TAHUN 2018 TGL. 3 September 2018
34	PT. PUTRA HULU LEMATANG	KP 1396 TAHUN 2018 TGL. 31 Agustus 2018
35	PT. SARANA ESA CITA	KP 1600 TAHUN 2018 TGL. 28 September 2018
36	PT. PERMATA PUTERA MANDIRI	KP 1330 TAHUN 2018 TGL. 23 Agustus 2018
37	PT. NATPAC GRAHA ARTHAMAS	KP 1641 TAHUN 2018 TGL. 4 Oktober 2018
38	PT. AKR CORPORANDO, Tbk	KP 1485 TAHUN 2018 TGL. 13 September 2018
39	PT. TANJUNG JATI POWER COMPANY	KP 1483 TAHUN 2018 TGL. 13 September 2018
40	PT. WEDA BAY	KP 1403 TAHUN 2018 TGL. 3 September 2018
41	PT. CONCH NORTH SULAWESI CEMENT	KP 953 TAHUN 2018 TGL. 8 Juni 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
42	PT. MITRA PERSADA RESOURCES	KP 897 TAHUN 2018 TGL. 31 Mei 2018
43	PT. ANUGRAH SUKSES MINING	KP 826 TAHUN 2018 TGL. 21 Mei 2018
44	PT. KEMILAU INDAH NUSANTARA	KP 1598 TAHUN 2018 TGL. 28 September 2018
45	PT. KALIMANTAN RIA SEJAHTERA	KP 1593 TAHUN 2018 TGL. 28 September 2018
46	PT. APOLLO NICKEL INDONESIA	KP 805 TAHUN 2018 TGL. 16 Mei 2018
47	PT. TIGER TRANS INTERNATIONAL	KP 756 TAHUN 2018 TGL. 3 Mei 2018
48	PT. PLN (Persero) PLTU AMPANA	KP 768 TAHUN 2018 TGL. 3 Mei 2018
49	PT. GORONTALO LISTRIK PERDANA	KP 773 TAHUN 2018 TGL. 4 Mei 2018
50	PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PALU	KP 769 TAHUN 2018 TGL. 3 Mei 2018
51	PT. ANEKA TAMBANG Tbk	KP 757 TAHUN 2018 TGL. 3 Mei 2018
52	PT. BATOLA PRIMATAMA	KP 1594 TAHUN 2018 TGL. 28 September 2018
53	PT. YUDHA WAHANA ABADI	KP 1165 TAHUN 2018 TGL. 3 Agustus 2018
54	PT. JAWA SATU POWER	KP 1277 TAHUN 2018 TGL. 10 Agustus 2018
55	PT. ENA SARANA ENERGI	KP 1684 TAHUN 2018 TGL. 15 Oktober 2018
56	PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI	KP 1597 TAHUN 2018 TGL. 28 September 2018
57	PT. BOBBY CHANDRA GLOBAL INDONESIA	KP 1279 TAHUN 2018 TGL. 13 Agustus 2018
58	PT. BIMA AGRI SAWIT	KP 1276 TAHUN 2018 TGL. 10 Agustus 2018
59	PT. GEMA KREASI PERDANA	KP 1334 TAHUN 2018 TGL. 23 Agustus 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	SK MENTERI
60	PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI	KP 1331 TAHUN 2018 TGL. 23 Agustus 2018
61	PT. DWIE WARNA KARYA	KP 1456 TAHUN 2018 TGL. 10 September 2018
62	PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sintang	KP 1481 TAHUN 2018 TGL. 13 September 2018
63	PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sanggau	KP 1482 TAHUN 2018 TGL. 13 September 2018
64	PT. ROSHINI INDONESIA	KP 1627 TAHUN 2018 TGL. 3 Oktober 2018
65	PT. GOLDEN BLOSSOM SUMATRA	KP 1599 TAHUN 2018 TGL. 28 September 2018
66	PT. PLN (Persero) PLTU 2 Kal-Bar	KP 1650 TAHUN 2018 TGL. 8 Oktober 2018
67	PT. OKI PULP & PAPER MILLS	KP 1816 TAHUN 2018 TGL. 30 Oktober 2018
68	PT. GCL INDO TENAGA	KP 1922 TAHUN 2018 TGL. 29 November 2018
69	PERUSDA BENUA TAKA	KP 1798 TAHUN 2018 TGL. 29 Oktober 2018

Tabel III.42 IZIN PENGGUNAAN GARIS PANTAI

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
1	PT. PLN (PERSERO) PANGKALAN SUSU	BX-125 / PP.008	14 Mei 2018
2	PT. INHUTANI I (PERSERO)	BX-126 / PP.008	14 Mei 2018
3	PT. KARYA JAYA PARAKAWAN	BX-167 / PP.008	09 Juli 2018
4	PT. RODA MAS SUMBER KALIMANTAN	BX-260/ PP.008	29 Agustus 2018
5	PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER	BX-261/ PP.008	29 Agustus 2018
6	PT. SEBAUNG SAWIT	BX-264/ PP.008	29 Agustus 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
7	KSU MERANTI	BX-265/ PP.008	29 Agustus 2018
8	PT. Klawit Mana Lestari	BX-279/ PP.008	10 September 2018
9	PT. DASA INTIGA	BX-288/ PP.008	10 September 2018
10	PT. OCEANIS TIMBER PRODUCTS	BX-283/ PP.008	10 September 2018
11	PT. BARITO PUTERA	BX-284/PP.008	10 September 2018
12	PT. DIAMOND RAYA TIMBER	BX-289/PP.008	10 September 2018
13	PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI	BX-280/PP.008	10 September 2018
14	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	BX-282/PP.008	10 September 2018
15	PT. PEMATANG ABADITAMA	BX-286/PP.008	10 September 2018
16	PT. AGROMAS KENCANA ABADI	BX-287/PP.008	10 September 2018
17	PT. NUSAPADMA CORPORATION	BX-285/PP.008	10 September 2018
18	PT. KAYU TRIBUANA RAMA	BX-278/PP.008	10 September 2018
19	PT. GEMA HUTANI LESTARI	BX-293/PP.008	10 September 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
20	PT. KAHAYAN TERANG ABADI	BX-292/PP.008	10 September 2018
21	PT. AUSTRAL BYNA	BX-294/PP.008	10 September 2018
22	PT. BERKAT CAHAYA TIMBER	BX-300/PP.008	10 September 2018
23	PT. BELAYAN RIVER TIMBER	BX-281/PP.008	10 September 2018
24	PT. KAYU ARA JAYA RAYA	BX-290/PP.008	10 September 2018
25	PT. GEMA HUTANI LESTARI	BX-291/PP.008	10 September 2018
26	PT. SUMALINDO LESTARI JAYA	BX-301/PP.008	10 September 2018
27	PT. WAHANA LESTARI	BX-306/PP.008	14 September 2018
28	PT. ADEMERO JAYA LESTARI	BX-207/PP.008	17 September 2018
29	PT. BARITO NUSANTARA INDAH	BX-308/PP.008	17 September 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
30	PT. ACACIA ANDALAN UTAMA	BX-309/PP.008	17 September 2018
31	PT. GAG NIKEL	BX-311/PP.008	19 September 2018
32	PT. AGATHIS ALAM INDONESIA	BX-313/PP.008	19 September 2018
33	PT. MUTIARA KAIJA PERMAI	BX-327/PP.008	27 September 2018
34	PT. WANA JAYA ABADI	BX-328/PP.008	27 September 2018
35	PT. TUNAS ALAM NUSANTARA	BX-333/PP.008	01 Oktober 2018
36	PT. DIADYANI TIMBER	BX-335/PP.008	03 Oktober 2018
37	PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA	BX-337/PP.008	11 Oktober 2018
38	PT. RATAH TIMBER	BX-371/PP.008	02 November 2018
39	PT. AYA YAYANG INDONESIA	BX-369/PP.008	02 November 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
40	PT. RATAH TIMBER	BX-368/PP.008	02 November 2018
41	PT. PANCA KARYA	BX-366/PP.008	02 November 2018
42	PT. AUSTRAL BYNA	BX-373/PP.008	02 November 2018
43	PT. INDOSUBUR SUKSES MAKMUR	BX-381/PP.008	07 November 2018
44	PT. WAHANA HIJAU PESAGUAN	BX-385/PP.008	12 November 2018
45	PT. RIMBA RAYA LESTARI	BX-374/PP.008	02 November 2018
46	PT. MERANTI SAKTI INDONESIA	BX-390/PP.008	15 November 2018
47	PT. BERKAT CAHAYA TIMBER	BX-391/PP.008	15 November 2018
48	PT. GLOBAL TRUST ABADI	BX-414/PP.008	29 November 2018
49	PT. ISTANA KAWI KENCANA	BX-412/PP.008	29 November 2018
50	PT. BINA BALANTAK UTAMA	BX-438/PP.008	10 Desember 2018
51	PT. TRIWIRASTA BARATA	BX-431/PP.008	10 Desember 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	SK	TANGGAL TERBIT
52	PT. HARAPAN KALTIM LESTARI	BX-432/PP.008	10 Desember 2018
53	PT. BUMI BERKAT SEJAHTERA	BX-469/PP.008	14 Desember 2018
54	PT. KARYA DELTA PERMAI	BX-470/PP.008	14 Desember 2018
55	PT. DAISY TIMBER	BX-467/PP.008	14 Desember 2018
56	PT. AUSTRAL BYNA	BX-452/PP.008	14 Desember 2018
57	PT. RIMBA KARYA RAYATAMA	BX-463/PP.008	14 Desember 2018
58	PT. NARKATA RIMBA	BX-464/PP.008	14 Desember 2018

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

I. PROGRAM

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Penyusunan Program di Lingkungan Perkapalan dan Kepelautan;
2. Penyusunan Target dan Verifikasi Data PNBP Jasa Perkapalan;
3. Uji Petik Bidang Kelaiklautan Kapal;
4. Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan;
5. Monitoring dan Evaluasi Class Autorisasi Terkait Statutory;
6. Monitoring dan Evaluasi Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar;
7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISM Code sesuai dengan NCVS;
8. Kegiatan Gerai Perijinan dalam Rangka Percepatan Proses Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal dan Sertifikasi Terhadap Kapal Ikan;
9. Pengukuhan Auditor, Pendidik dan Praktisi Medis;
10. Pengukuhan Auditor ISM Code;
11. Pengukuhan Ahli Ukur Kapal Metode Dalam Negeri;
12. Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
13. Bimbingan Teknis PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran dari Kapal;
14. Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran;
15. Konsinyering Penyusunan Peraturan Terhadap Kapal pada Konstruksi Kapal Berbahan Fiber Glass;
16. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2017;
17. Konsyinering Penyusunan Peraturan Tentang Implementasi *Maritime Labour Convention (MLC)*, 2006;

18. Penyiapan Bahan Sidang IMO Terkait Keselamatan Kapal dan Publikasi IMO;
19. *In House Training DPA*;
20. *Consultative Meeting* Persiapan Bahan Sidang IMO Tentang Perlindungan Lingkungan, MEPC 72 dan MEPC 73.

B. Bidang Pembangunan

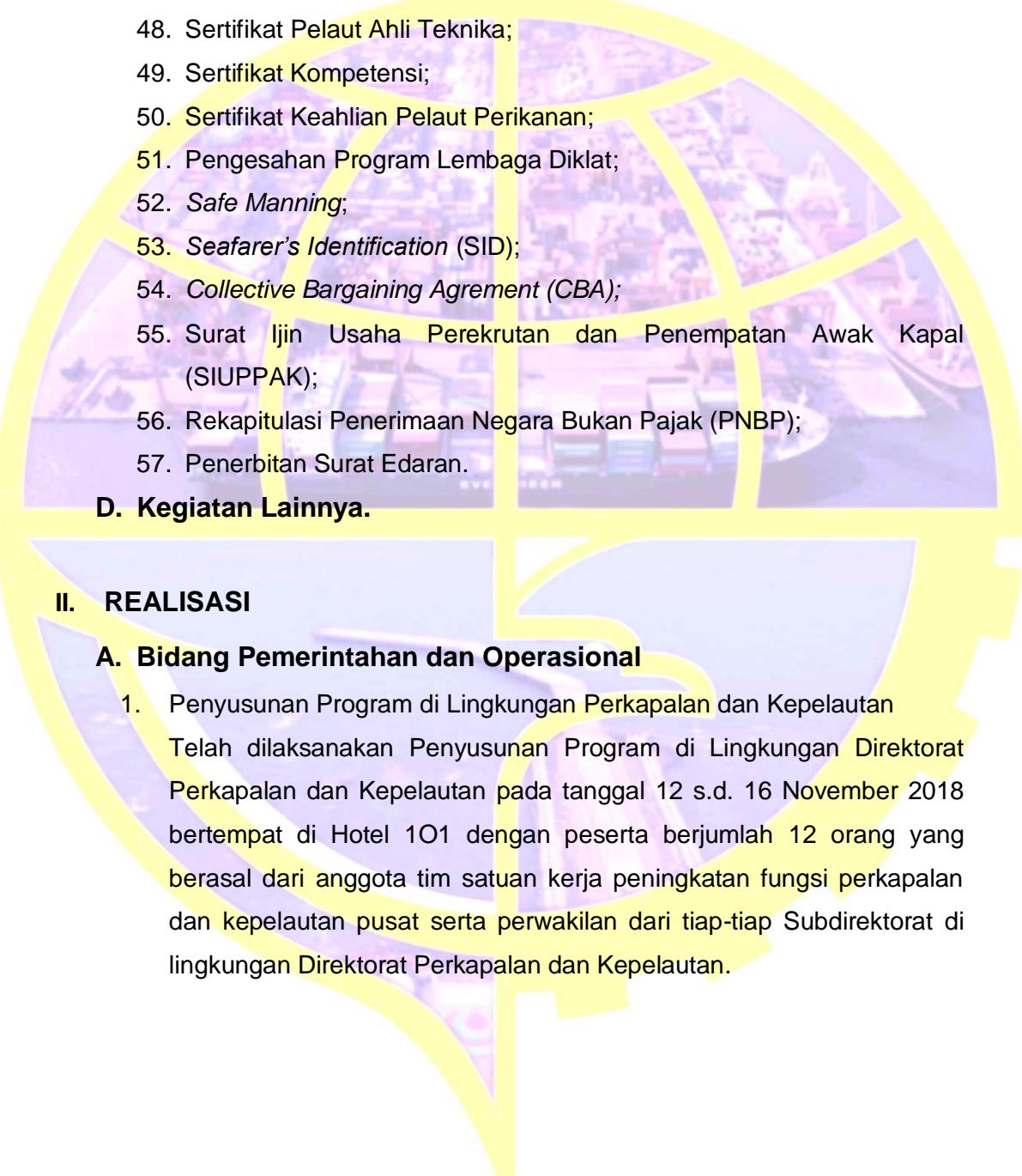
1. Pengembangan dan Penambahan Perangkat Sistem Informasi SID;
2. Penambahan Perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut;
3. Pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL).

C. Pelayanan Pihak ke-3

Berikut merupakan jenis pelayanan yang dilakukan, yaitu:

1. Pengesahan Gambar:
 - ✓ Kapal Bangunan Baru
 - ✓ Kapal Bangunan Lama
 - ✓ Perombakan Kapal
 - ✓ Ganti Bendera
 - ✓ Safety and Fire Control Plan
2. Garis Muat Kapal;
3. Surat Otorisasi;
4. Surat Laut;
5. *Continius Ship's Record* (CSR);
6. *Call Sign*;
7. Daftar Ukur;
8. Akta Pendaftaran Kapal;
9. Akta Baliknama Kapal;
10. Halaman Tambahan;
11. Hipotek Kapal;
12. Penghapusan Kapal;
13. Ganti Bendera Kapal;
14. Penggunaan Bendera Kapal;

- 
15. Ganti Nama Kapal;
 16. Penggunaan Nama Kapal;
 17. Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal;
 18. Sertifikat Keselamatan terkait Konstruksi Kapal;
 19. Sertifikat Keselamatan terkait Perlengkapan Kapal;
 20. Radio GMDSS;
 21. Barang Berbahaya;
 22. Barang Berbahaya Curah;
 23. Sertifikat Pembebasan;
 24. Kapal Penumpang;
 25. Spesial Purpose;
 26. Lepas Pantai Berpindah (MODU);
 27. Sertifikat Muatan Kimia;
 28. Sertifikat Muatan Padat Curah;
 29. Otorisasi Kapal Pengangkut Biji-bijian;
 30. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP);
 31. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC);
 32. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLC-B);
 33. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Untuk Pengangkutan Bahan Cair Beracun Dalam Bentuk Curah (NLS);
 34. Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS);
 35. Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS);
 36. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP);
 37. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP);
 38. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP);
 39. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP);
 40. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC);
 41. *Ships Recycling (SR)*;
 42. *Ballast Water Management (BWM)*;

- 
43. *Attestation Removal of Wrecks 2007;*
 44. Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tanki Kapal (*Tank Cleaning*);
 45. Dokumen Penyesuaian (*Document of Compliance – DOC*);
 46. Manajemen Keselamatan Kapal (SMC);
 47. Sertifikat Pelaut Ahli Nautika;
 48. Sertifikat Pelaut Ahli Teknika;
 49. Sertifikat Kompetensi;
 50. Sertifikat Keahlian Pelaut Perikanan;
 51. Pengesahan Program Lembaga Diklat;
 52. *Safe Manning*;
 53. *Seafarer's Identification (SID)*;
 54. *Collective Bargaining Agreement (CBA)*;
 55. Surat Ijin Usaha Perekutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK);
 56. Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 57. Penerbitan Surat Edaran.

D. Kegiatan Lainnya.

II. REALISASI

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Penyusunan Program di Lingkungan Perkapalan dan Kepelautan
Telah dilaksanakan Penyusunan Program di Lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada tanggal 12 s.d. 16 November 2018 bertempat di Hotel 101 dengan peserta berjumlah 12 orang yang berasal dari anggota tim satuan kerja peningkatan fungsi perkapalan dan kepelautan pusat serta perwakilan dari tiap-tiap Subdirektorat di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.



Gambar IV.1 Kegiatan Penyusunan Program di Lingkungan Perkapalan dan Kepelautan

2. Penyusunan Target dan Verifikasi Data PNBP Jasa Perkapalan

Telah dilaksanakan Penyusunan Target dan Verifikasi Data PNBP Jasa Perkapalan pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Februari 2018 bertempat di Hotel Lor In Sentul, Bogor dengan peserta berjumlah 24 orang yang merupakan petugas pencatat PNBP perwakilan dari tiap-tiap Subdirektorat di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta petugas dari Subbagian Tata Usaha.



Gambar IV.2 Kegiatan Penyusunan Target dan Verifikasi Data PNBP Jasa Perkapalan

3. Uji Petik Bidang Kelaiklautan Kapal

Sesuai dengan penerbitan pedoman standar keselamatan pelayaran transportasi laut yaitu:

- Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/27/11/DJPL-18 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang dalam rangka Angkutan Lebaran Tahun 2018;
- Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/84/3/DJPL-18 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Rangka Natal 2018 dan Tahun Baru 2019;

- c. Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/18/5/DK-18 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Kewajiban Pengesahan Gambar sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal; dan
- d. Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor SK.41/DKP/PPKP/X/18 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan pemeriksaan kelaiklautan kapal dalam rangka natal 2018 dan tahun baru 2019.

telah dilaksanakan rangkaian uji petik kapal di sejumlah lokasi untuk memastikan kelaiklautan kapal, khususnya bagi kapal penumpang selama menghadapi masa libur Lebaran 2017, Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Adapun lokasi pemeriksaan kapal tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Uji petik angkutan lebaran

Tabel IV.1 Daftar Lokasi Uji Petik Lebaran 1429 H

NO.	LOKASI	TANGGAL
1	Pontianak	14 s.d. 16 Mei 2018
2	Banjarmasin	30 Mei s.d. 1 Juni 2018
3	Tarakan	30 Mei s.d. 1 Juni 2018
4	Sampit	23 s.d. 25 Mei 2018
5	Kumai	30 Mei s.d. 1 Juni 2018
6	Batam/Tanjung Balai Karimun	30 Mei s.d. 1 Juni 2018
7	Merak	9 s.d. 11 Mei 2018
8	Semarang	24 s.d. 26 Mei 2018
9	Makassar	8 s.d. 10 Mei 2018
10	Ambon	4 s.d. 6 Juni 2018
11	Lembar	4 s.d. 6 Juni 2018
12	Gilimanuk	21 s.d. 23 Mei 2018
13	Surabaya	17-18 Mei 2018
14	Bau-Bau	4 s.d. 6 Juni 2018
15	Gorontalo	4 s.d. 6 Juni 2018
16	Balikpapan/Samarinda	14 s.d. 16 Mei 2018

**Gambar IV.3 Kegiatan Uji Petik Lebaran 1429 H**

b. Uji Petik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (NATARU)

Tabel IV.2 Daftar Lokasi Uji Petik NATARU

NO.	LOKASI	TANGGAL	JUMLAH KAPAL
1	Sorong	5 s.d. 8 November 2018	2 (dua)
2	Kalianget	13 s.d. 14 November 2018	2 (dua)
3	Padang Bai	14 s.d. 16 November 2018	2 (dua)
4	Surabaya	19 s.d. 21 November 2018	2 (dua)
5	Bitung/Manado	19 s.d. 21 November 2018	2 (dua)
6	Bau-Bau	21 s.d. 23 November 2018	2 (dua)
7	Ambon	21 s.d. 23 November 2018	2 (dua)
8	Makassar	21 s.d. 23 November 2018	2 (dua)
9	Kupang	28 s.d. 30 November 2018	2 (dua)
10	Tanjung Pinang	27 s.d. 29 November 2018	4 (empat)
11	Tarakan	28 s.d. 29 November 2018	2 (dua)
12	Sibolga	5 s.d. 7 Desember 2018	3 (tiga)
13	Kali Adem	13 s.d. 14 Desember 2018	15 (lima belas)
14	Merak	27 s.d. 28 Desember 2018	2 (dua)

**Gambar IV.4** Kegiatan Uji Petik NATARU

4. Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan di 3 (tiga) lokasi Lembaga Diklat Kepelautan yaitu:

- Politeknik Perikanan Bitung tanggal 1 s.d. 3 Februari 2018;
- Focus Maritime Training Center* tanggal 15 s.d. 16 Maret 2018;
- Semaya Maritime Training Center*, Banjarmasin tanggal 15 s.d. 17 Maret 2018.

**Gambar IV.5** Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan

5. Monitoring dan Evaluasi Class Autorisasi Terkait Statutory

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Class Autorisasi Terkait Statutory di dua lokasi Badan Klasifikasi yang memiliki kewenangan statutori yaitu Kantor BKI Cabang Utama Samarinda pada tanggal 25 s.d 26 Oktober 2018 dan Kantor BKI Cabang Batam pada tanggal 25 s.d. 26 Oktober 2018.



Gambar IV.6 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Class Autorisasi Terkait Statutory

6. Monitoring dan Evaluasi Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar di 12 (dua belas) lokasi UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.3 Daftar Lokasi Monitoring dan Evaluasi Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar

NO.	LOKASI	TANGGAL
1.	KSOP Pontianak	28 Februari s.d. 2 Maret 2018
2.	Kanpel Batam	27 s.d. 29 Maret 2018
3.	Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak	12 s.d. 14 Februari 2018
4.	Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar	18 s.d. 20 Juli 2018
5.	Bengkulu	1 s.d. 3 Agustus 2018
6.	Sorong, Papua Barat	8 s.d. 10 Agustus 2018

7.	KSOP Samarinda	29 s.d. 31 Agustus 2018
8.	Padang Bai	5 s.d. 7 September 2018
9.	Ternate, Maluku	12 s.d. 14 September 2018
10.	Cilacap	14 s.d. 16 November 2018
11.	Cirebon	12 s.d. 14 Desember 2018
12.	UPP Waikelo	14 s.d. 17 Desember 2018



Gambar IV.7 Kegiatan Monev Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar

7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISM Code sesuai dengan NCVS
Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISM Code sesuai dengan NCVS di 6 (enam) lokasi UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.4 Daftar Lokasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISM Code sesuai dengan NCVS

NO.	LOKASI	TANGGAL
1.	Kantor Pelabuhan Batam	21 s.d. 23 Maret 2018
2.	Kantor Pelabuhan Sibolga	20 s.d. 21 Agustus 2018
3.	KSU Tanjung Perak	6 s.d. 8 September 2018
4.	KSOP Ambon	26 s.d. 28 September 2018
5.	KSOP Kelas II Bitung	7 s.d. 9 November 2018

Code sesuai dengan NCVS

NO. LOKASI TANGGAL

1. Kantor Pelabuhan Batam 21 s.d. 23 Maret 2018

2. Kantor Pelabuhan Sibolga 20 s.d. 21 Agustus 2018

3. KSU Tanjung Perak 6 s.d. 8 September 2018

4. KSOP Ambon 26 s.d. 28 September 2018

5. KSOP Kelas II Bitung 7 s.d. 9 November 2018

6. KSOP Kumai

5 s.d. 7 November 2018



Ambon



Bitung

Gambar IV.8 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISM Code sesuai dengan NCVS

8. Kegiatan Gerai Perijinan dalam Rangka Percepatan Proses Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal dan Sertifikasi Terhadap Kapal Ikan Telah dilaksanakan kegiatan Gerai Perijinan dalam Rangka Percepatan Proses Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal dan Sertifikasi Terhadap Kapal Tradisional di 11 (sebelas) lokasi UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.5 Daftar Lokasi Gerai Perijinan dalam Rangka Percepatan Proses Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal dan Sertifikasi Terhadap Kapal Tradisional

NO.	LOKASI	TANGGAL
1.	Batang (Periode I)	7 s.d. 9 Maret 2018
	Batang (Periode II)	14 s.d. 16 Maret 2018
2.	Semarang	4 s.d. 6 April 2018
3.	Kalibaru	24 s.d. 26 April 2018
4.	Merauke	16 s.d. 18 Juli 2018
5.	Bulukumba	13 s.d. 16 Agustus 2018
6.	Labuhan Bajo	24 s.d. 28 September 2018
7.	Kepulauan Seribu	12 s.d. 14 September 2018
8.	Lhokseumawe	5 s.d. Nopember 2018
9.	Bau-Bau	12 s.d. 16 Nopember 2018
10.	Cilacap	19 s.d. 23 Nopember 2018

11. Banyuwangi

26 s.d. 30 Nopember 2018



Bulukumba



Batang



Kep. Seribu



Bau-Bau

Gambar IV.9 Kegiatan Gerai Perijinan Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal Tradisional

9. Pengukuhan Auditor, Pendidik dan Praktisi Medis

Telah diadakan kegiatan Pengukuhan Auditor, Pendidik dan Praktisi Medis yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 September 2018 bertempat di Hotel A-One Jakarta dengan peserta berjumlah 45 orang yang berasal dari tenaga medis BKKP, pendidik di lingkungan BPSDM Hubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta auditor di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Gambar IV.10 Kegiatan Pengukuhan Auditor, Pendidik dan Praktisi Medis

10. Pengukuhan Auditor ISM Code

Telah dilaksanakan Pengukuhan Auditor ISM Code yang dibagi ke dalam 2 (dua) periode, yaitu:

a. Periode I

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Mei 2018 bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung. Peserta kegiatan ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan para Auditor ISM Code di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah mengikuti diklat Auditor Ism Code.

b. Periode II

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2018 bertempat di Arch Hotel Bogor. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang yang merupakan para Auditor ISM Code di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah mengikuti diklat Auditor Ism Code.



Periode I



Periode II

Gambar IV.11 Kegiatan Pengukuhan Auditor ISM Code

11. Pengukuhan Ahli Ukur Kapal Metode Dalam Negeri

Telah dilaksanakan Pengukuhan Ahli Ukur Kapal Metode dalam Negeri Angkatan III dan IV pada tanggal 5 s.d. 9 Maret 2018 bertempat di Wisma Primkokarmar Bogor. Peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang yang merupakan para Ahli Ukur Kapal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah mengikuti diklat pengukuran metode dalam negeri.



Gambar IV.12 Kegiatan Pengukuhan Ahli Ukur Kapal Metode dalam Negeri

12. Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

Telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang dibagi ke dalam 2 (dua) periode, yaitu:

a. Periode I

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Juli 2018 bertempat di Hotel Santika Bekasi dengan peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan Marine Inspector Type A dan B di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Periode II

Kegiatan pengukuhan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s.d. 3 Agustus 2018 bertempat di Bandara Internasional Hotel Soekarno-Hatta, Tangerang. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan Marine Inspector Type A dan B di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Periode I



Periode II

Gambar IV.13 Kegiatan Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

13. Bimbingan Teknis PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran dari Kapal

Telah dilakukan Bimbingan Teknis PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran dari Kapal pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2018 bertempat di The Atrium Hotel and Resort, Yogyakarta. Dengan peserta berjumlah 45 orang yang merupakan perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan para operator kapal.



Gambar IV.14 Kegiatan Bimbingan Teknis PM 29 Tahun 2014

14. Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran

Telah dilakukan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di 9 (sembilan) lokasi di Indonesia yang terinci sebagai berikut:

Tabel IV.6 Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran

NO.	LOKASI	TANGGAL	JUMLAH PESERTA
1.	Selayar	12 s.d. 17 Agustus 2018	80 orang
2.	Bulukumba	13 s.d. 17 Agustus 2018	80 orang
3.	Danau Toba	24 s.d. 27 Juli 2018	80 orang
4.	Kaliadem	5 s.d. 7 September 2018	70 orang
5.	Madura	11 s.d. 15 September 2018	42 orang
6.	Surabaya	11 s.d. 15 September 2018	42 orang
7.	Tanjung Pinang	24 s.d. 28 September 2018	80 orang
8.	Bau-Bau	1 s.d. 5 Oktober 2018	80 orang
9.	Tarakan	4 s.d. 7 Desember 2018	80 orang

Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran diadakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap para operator kapal dan stakeholder mengenai pentingnya keselamatan pelayaran agar tidak terjadi lagi kecelakaan kapal dan menelan korban jiwa.



Gambar IV.15 Kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran

15. Konsinyering Penyusunan Peraturan Terhadap Kapal pada Konstruksi Kapal Berbahan Fiber Glass

Telah dilaksanakan Konsinyering Penyusunan Peraturan Terhadap Kapal pada Konstruksi Kapal Berbahan Fiber Glass pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2018 bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung. Peserta berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang merupakan para akademisi di bidang perkapalan dan perwakilan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Gambar IV.16 Kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Konstruksi Kapal Berbahan Fiber Glass

16. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2017

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Tahun 2017 pada tanggal 28 Februari s.d. 4 Maret 2018 bertempat di Hotel 101 Suryakencana Bogor. Peserta berjumlah 25 orang yang merupakan tim LKIP dan Laptah perwakilan dari tiap-tiap Subdirektorat di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.



Gambar IV.17 Kegiatan Penyusunan LKIP dan Laptah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Tahun 2017

17. Konsinyering Penyusunan Peraturan Tentang Implementasi *Maritime Labour Convention* (MLC), 2006

Telah dilaksanakan Konsinyering Penyusunan Peraturan tentang Implementasi *Maritime Labour Convention (MLC)*, 2006, yang dibagi ke dalam 2 (dua) gelombang, yaitu:

a. Gelombang I

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2018 bertempat di Hotel Santika Premiere Bekasi. Peserta berjumlah 25 orang yang merupakan perwakilan dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Biro Hukum Kemenhub serta para akademisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Gelombang II

Konsinyering dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d. 3 Mei 2018 bertempat di Hotel Mirah, Bogor. Peserta berjumlah 15 orang yang merupakan perwakilan dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Biro Hukum Kemenhub serta para akademisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Gelombang I



Gelombang II

Gambar IV.18 Kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Implementasi MLC 2006

18. Penyiapan Bahan Sidang IMO Terkait Keselamatan Kapal dan Publikasi IMO

Telah dilaksanakan Penyiapan Bahan Sidang IMO terkait Keselamatan Kapal dan Publikasi IMO yang dibagi ke dalam 3 (tiga) gelombang, yaitu:

a. Gelombang I

Dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2018 bertempat di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta. Agenda rapat membahas tentang penyiapan bahan sidang IMO Subkomite Sub-

Committee on Ship Systems And Equipment (SSE) ke-5. Peserta berjumlah 15 (lima belas) orang yang merupakan perwakilan internal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan penanggung jawab dari Subdirektorat Keselamatan Kapal, perwakilan dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Badan Klasifikasi Indonesia.

b. Gelombang II

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2018 bertempat di Hotel Santika Gajah Mada, Jakarta. Agenda rapat mengenai penyiapan bahan sidang IMO Subkomite *Implementation of IMO Instruments III-5.* Peserta berjumlah 15 (lima belas) orang yang merupakan perwakilan internal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan penanggung jawab dari Subdirektorat Keselamatan Kapal serta perwakilan dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c. Gelombang III

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 November 2018 bertempat di Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Agenda rapat membahas tentang penyiapan bahan sidang IMO Subkomite *Maritime Safety Committee (MSC) ke-100.* Peserta berjumlah 15 (lima belas) orang yang merupakan perwakilan internal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan penanggung jawab dari Subdirektorat Keselamatan Kapal serta perwakilan dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Gambar IV.19 Kegiatan Penyiapan Bahan Sidang IMO terkait Keselamatan Kapal dan Publikasi IMO

19. *In House Training DPA*

Telah dilaksanakan kegiatan *In House Training DPA* pada tanggal 13 s.d. 16 Desember 2018 yang diadakan di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan. Peserta berjumlah 70 (tujuh puluh) orang yang merupakan *Designated Person Ashore (DPA)* Perusahaan Pelayaran dan Manajemen Operator Kapal. Personil Darat Yang Ditunjuk (*Desinited Person Ashore/DPA*) merupakan seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan berdasarkan Permenhub No. PM 45 Tahun 2012



Gambar IV.20 Kegiatan *In House Training DPA*

20. *Consultative Meeting Persiapan Bahan Sidang IMO Tentang Perlindungan Lingkungan, MEPC 72 dan MEPC 73*

Telah dilaksanakan kegiatan *Consultative Meeting Persiapan Bahan Sidang IMO* tentang Perlindungan Lingkungan Subkomite *Marine Environment Protection Committee* ke-72 dan 73. Kegiatan bertempat di Hotel Alila Pecenongan pada tanggal 27 s.d. 29 Maret 2019 dengan peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Peserta merupakan perwakilan internal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan penanggung jawab dari Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan serta perwakilan dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Gambar IV.21 Kegiatan *Consultative Meeting* Persiapan Bahan Sidang IMO MEPC 72 dan 73

II.II.2 Bidang Pembangunan

1. Pengembangan dan Penambahan Perangkat Sistem Informasi SID

Telah dilakukan Pengembangan dan Penambahan Perangkat Sistem Informasi SID dengan penyedia jasa berasal dari PT. LEN Industri (Persero) dengan kontrak tanggal 14 Mei 2018. Perangkat dipasang di 9 (sembilan) Lokasi, yaitu:

Tabel IV.7 Daftar Lokasi Pengembangan SID

No.	Lokasi
1	Kantor Pusat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
2	KSU Tanjung Perak
3	KSU Makassar
4	KSU Belawan
5	KSU Tanjung Priok
6	KSOP Khusus Batam
7	KSOP Semarang
8	KSOP Benoa
9	KSOP Bitung



Gambar IV. 22 Perangkat Sistem informasi SID yang telah Terpasang

Termasuk dalam paket pekerjaan, dilaksanakan juga Workshop dan Pelatihan Sistem Informasi *Seafarers Identity Document* (SID) yang diadakan oleh PT. LEN Industri bersama dengan Subdirektorat Kepelautan dengan peserta merupakan para operator sistem informasi SID di UPT yang telah melayani penerbitan SID untuk pelaut. Kegiatan

dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2018 bertempat di Hotel Novotel Ngurai Rai Airport, Bali, dengan jumlah peserta sebanyak 69 orang.



Gambar IV. 23 Kegiatan Workshop dan Pelatihan Sistem Informasi

SID

2. Pengadaan Perangkat Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi Buku Pelaut

Untuk mempermudah masyarakat memiliki Buku Pelaut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah meningkatkan pelayanan di bidang subsektor perhubungan laut dengan menggunakan aplikasi permohonan buku pelaut *online*. Melalui SK Dirjen Nomor HK.103/2/19/DJPL-16, telah dilimpahkan kewenangan ke UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan kelaiklautan kapal di daerah, termasuk dalam penerbitan buku pelaut. Pada tahun 2018 dilakukan penambahan perangkat sistem informasi buku pelaut di 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga jumlah unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat memberikan pelayanan buku pelaut *online* berjumlah 69 (enam puluh sembilan) lokasi.

Tabel 1.8

2015 KSU Tg. Priok, KSU Tg. Perak, KSU Makassar, KSU Belawan, KSOP Kelas I Tg Emas, KSOP Kelas II Benoa, Ditkapel, KSOP Kelas I Bitung, Kanpel Batam	2016 KSOP Kelas I Banten, KSOP Kelas II Palembang, KSOP Kelas I Dumai, KSOP Kelas II Cilacap, KSOP Kelas II Gresik, KSOP Kelas II Cirebon, KSOP Kelas III Sunda Kelapa, KSOP Kelas III Jambi, Athub Tokyo, Athub Singapura	2017 Athub Den Haag, Athub Kuala Lumpur, KSOP Kelas I Ambon, KSOP Kelas I Balikpapan, KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Kelas I Panjang, KSOP Kelas I Sorong, KSOP Kelas II Biak, KSOP Kelas II Jayapura, KSOP Kelas II Kendari, KSOP Kelas II Kijang, KSOP Kelas II Pontianak, KSOP Kelas II Samarinda, KSOP Kelas II Tg. Balai Karimun, KSOP Kelas II Tg. Pinang, KSOP Kelas II Teluk Bayur, KSOP Kelas II Ternate, KSOP Kelas III Kuala Enok, KSOP Kelas III Kupang, KSOP Kelas III Lembar, KSOP Kelas III Lhokseumawe, KSOP Kelas III Manado, KSOP Kelas III Pantoloan, KSOP Kelas III Pare-pare, KSOP Kelas III Pekanbaru, KSOP Kelas III Pulau Baai, KSOP Kelas III Pulau Sambu, KSOP Kelas III Sampit, KSOP Kelas III Sungai Pakning, KSOP Kelas III Tg. Wangi, KSOP Kelas III Tarakan, KSOP Kelas IV Tegal, KUPP Kelas I Bau-bau	2018 KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Padang Bai, KSOP Kelas IV Bima, KSOP Kelas IV Kumai, KSOP Kelas IV Kotabaru, KSOP Kelas IV Nunukan, KSOP Kelas IV Gorontalo, KSOP Kelas IV Merauke, KSOP Kelas IV Manokwari, KSOP Kelas V Bagan Siapi-api, KSOP Kelas V Marunda , KSOP Kelas V Ende, KUPP Kelas II Palopo, KUPP Kelas II Tual, KUPP Kelas II Saumlaki, KUPP Kelas II Dobo, KUPP Kelas III Larantuka
---	--	--	---

Daftar Lokasi Penambahan Perangkat Buku Pelaut

Dengan diberikannya perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut ditunjuk satu orang supervisor dan satu orang operator dari masing-masing UPT dan Atase Perhubungan. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pemasangan perangkat Buku Pelaut Online:

- Foto UPT setempat



Gambar IV.24 UPT Penerima Buku Pelaut

- b. Foto Perangkat sebelum Terpasang



Gambar IV.25 Perangkat Buku Pelaut sebelum Terpasang

- c. Foto Kegiatan Instalasi Perangkat



Gambar IV.26 Kegiatan Instalasi Perangkat Buku Pelaut

- d. Foto setelah Instalasi Perangkat



Gambar IV.27 Perangkat Pelaut yang Telah Terpasang

- e. Foto Kegiatan *Training*



Gambar IV.28 Kegiatan *Training Peoperasian Buku Pelaut*

PT. LEN Industri (Persero) bersama dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan c.q. Subdirektorat Kepelautan juga melaksanakan Workshop dan Pelatihan Sistem Informasi Buku Pelaut Online yang berlangsung pada tanggal 26 s.d. 29 November 2018 bertempat di Surabaya. Peserta berjumlah 80 orang yang merupakan operator aplikasi buku pelaut online UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah memiliki perangkat system informasi buku pelaut online.



Gambar IV.29 Kegiatan Workshop dan Pelatihan Sistem Informasi Buku Pelaut Online

3. Pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL)
Telah dilakukan pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) dengan penyedia jasa dari PT. Sigma Metrasys Solution dengan kontak tanggal 2 Juli 2018. Dalam proses pembuatan aplikasi SIMKAPEL telah diadakan serangkaian kegiatan training pengoperasian aplikasi yang dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, yaitu:
 - a. Gelombang I

Merupakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua

Jakarta pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2018. Kegiatan ini merupakan training untuk operator aplikasi yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap Kantor Kesyahbandaran Utama, KSOP Khusus, KSOP dan UPP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan jumlah peserta sebesar 185 orang.



Gambar IV.30 Kegiatan Workshop dan Pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) Gelombang I

b. Gelombang II

Telah dilakukan kegiatan *Training of Trainer* (TOT) Administrator dan Operator SIMKAPEL pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Kampoeng Bangka, Jakarta Selatan. Kegiatan ini ditujukan untuk internal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dihadiri oleh perwakilan administrator dan operator dari tiap-tiap Subdirektorat di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan peserta berjumlah 15 orang.



Gambar IV.31 Kegiatan Workshop dan Pengadaan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) Gelombang I

II.II.3 Pelayanan Pihak Ketiga

Berikut merupakan capaian pelayanan kepada pihak pada tahun 2018, diantaranya adalah:

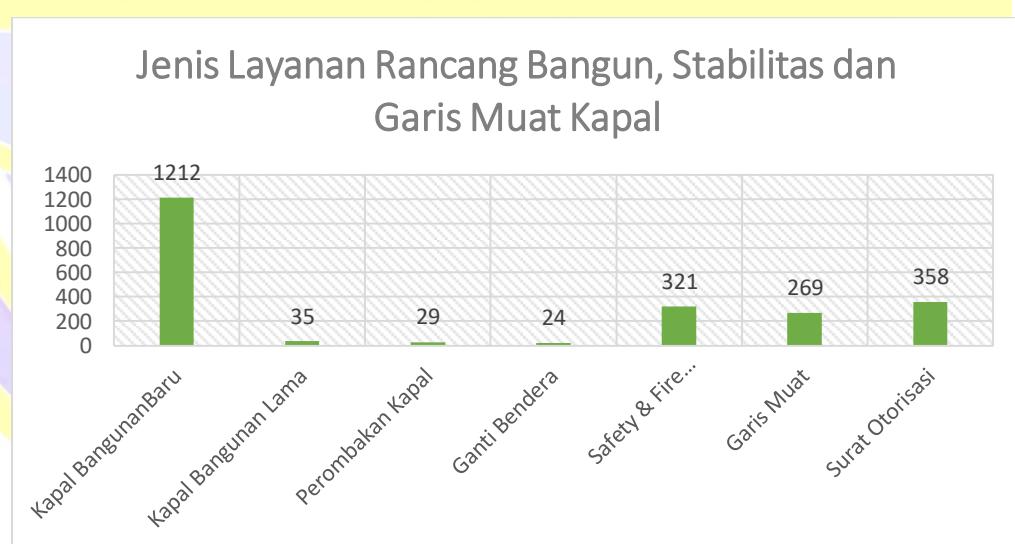
1. Penerbitan dokumen rancang bangun, stabilitas dan garis muat

Tabel IV.9 Jumlah Layanan Rancang Bangun, Stabilitas&Garis Muat

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen/Sertifikat
1	Pengesahan Gambar :	
	✓ Kapal Bangunan Baru	1.212
	✓ Kapal Bangunan Lama	35
	✓ Perombakan Kapal	29
	✓ Ganti Bendera	24
	✓ Safety and Fire Control Plan	321
2	Garis Muat	269
3	Surat otorisasi	358

Dalam grafik tergambar di bawah ini:

Grafik IV.1 Jumlah Layanan Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat



2. Penerbitan dokumen pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal

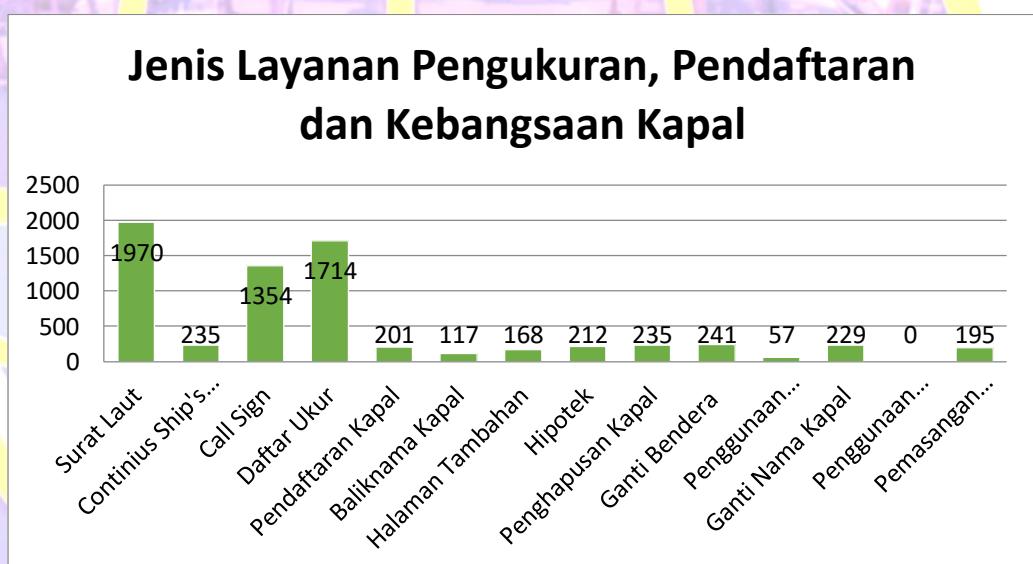
Tabel IV.10 Jumlah Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Sertifikat/Dokumen
1	Surat Laut	1.970

2	Continuus Ship's Record (CSRC)	235
3	Call Sign	1.354
4	Daftar Ukur	1.714
5	Akta Pendaftaran Kapal	201
6	Akta Baliknama Kapal	177
7	Halaman Tambahan	168
8	Hipotek Kapal	212
9	Penghapusan Kapal	235
10	Ganti Bendera Kapal	241
11	Penggunaan Bendera Kapal	57
12	Ganti Nama Kapal	229
13	Penggunaan Nama Kapal	0
14	Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal	195

Dalam grafik tergambar sebagai berikut:

Grafik IV.2 Jumlah Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal



3. Penerbitan dokumen keselamatan kapal

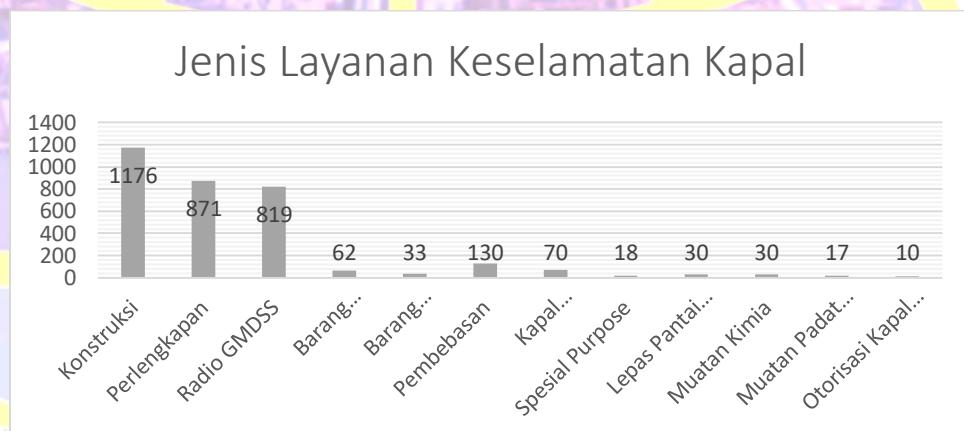
Tabel IV.11 Jumlah Dokumen Keselamatan Kapal

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Sertifikat/Dokumen
1	Konstruksi	1.176
2	Perlengkapan	871
3	Radio GMDSS	819
4	Barang Berbahaya	62
5	Barang Berbahaya Curah	33
6	Sertifikat Pembebasan	130

7	Kapal Penumpang	70
8	Spesial Purpose	18
9	Lepas Pantai Berpindah (MODU)	30
10	Sertifikat Muatan Kimia	30
11	Sertifikat Muatan Padat Curah	17
12	Otorisasi Kapal Pengangkut Biji-bijian	10

Dalam grafik tergambar sebagai berikut:

Grafik IV.3 Jumlah Dokumen Keselamatan Kapal



4. Penerbitan dokumen pencegahan pencemaran, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan

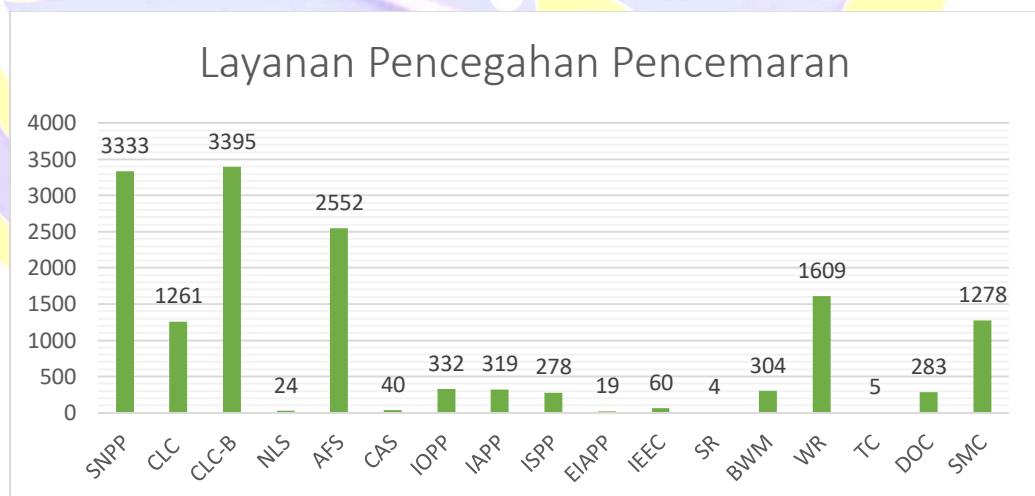
Tabel IV.12 Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran, Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan

No	Jenis Pelayanan			Jumlah Sertifikat/Dokumen
	Sertifikat Nasional	Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	Dana Jaminan Ganti Rugi	
1	Sertifikat Nasional	Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	Dana Jaminan Ganti Rugi	3.333
2	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi	Pencegahan Pencemaran Minyak (CLC)	Pencegahan Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLC-B)	1.261
3	Sertifikat Internasional	Pencegahan Pencemaran Untuk Pengangkutan Bahan Cair Beracun Dalam Bentuk Curah (NLS)		3.395
4				24

5	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	2.552
6	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	40
7	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	332
8	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP)	319
9	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	278
10	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	19
11	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	60
12	Jumlah Ships Recycling (SR)	4
13	Ballast Water Management (BWM)	304
14	Attestation Removal of Wrecks, 2007	1.609
15	Jumlah Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal (TC)	5
16	Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance – DOC)	283
17	Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	1.278

Dalam grafik tergambar sebagai berikut:

Grafik IV.4 Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran, Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan



5. Penerbitan dokumen kepelautan

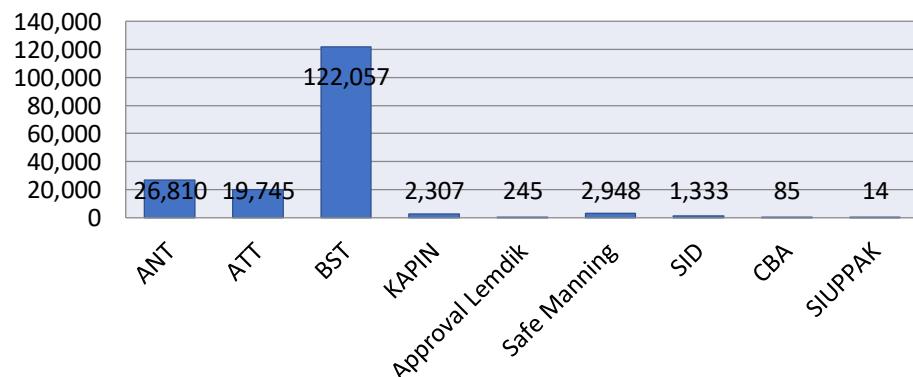
Tabel IV.13 Jumlah Dokumen Kepelautan Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Sertifikat/Dokumen
1	Sertifikat Pelaut Ahli Nautika	ANT I
2		ANT II
3		ANT III Managemen
4		ANT III
5		ANT IV Managemen
6		ANT IV
7		ANT V Managemen
8		ANT V
9		RFN
10		RAD
11	Sertifikat Pelaut Ahli Teknika	ATT I
12		ATT II
13		ATT III Managemen
14		ATT III
15		ATT IV Managemen
16		ATT IV
17		ATT V Managemen
18		ATT V
19		RFE
20		RAE
21	Sertifikat Kompetensi	BST
22		BST Ikan
23	Sertifikat Keahlian Pelaut Perikanan	ANKAPIN-I
24		ANKAPIN-II
25		ANKAPIN-III
26		ATKAPIN-I
27		ATKAPIN-II
28		ATKAPIN-III
29	Pengesahan Program Lembaga Diklat	245
30	Safe Manning	2.948
31	Seafarers Identity Document (SID)	1.333
32	Collective Bargaining Agreement (CBA)	85
33	Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)	14

Dalam grafik tergambar sebagai berikut:

Grafik IV.5 Jumlah Dokumen Kepelautan

Jenis Layanan Dokumen Kepelautan



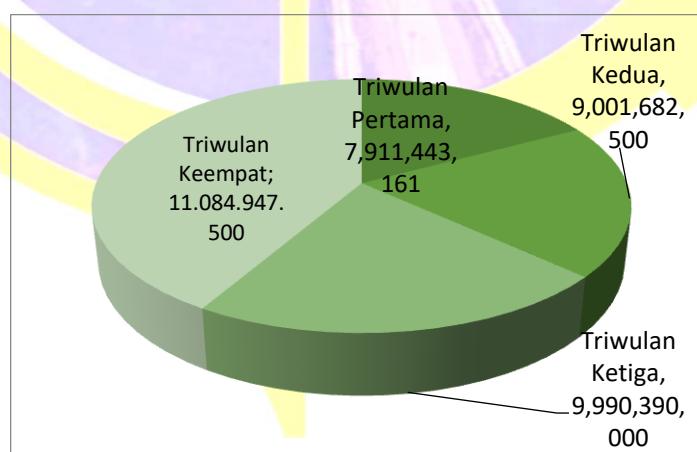
6. Rekapitulasi PNBP selama tahun 2018

Tabel IV.14 Rekapitulasi PNBP PUPK Tahun 2018

Periode	Jumlah
Triwulan Pertama	7,911,443,161
Triwulan Kedua	9,001,682,500
Triwulan Ketiga	9,990,390,000
Triwulan Keempat	19,128,418,501
Total	46,031,934,162

Dalam grafik tergambar sebagai berikut:

Grafik IV.6 Rekapitulasi PNBP PUPK Tahun 2018



7. Penerbitan Surat Edaran

Tabel IV-15 Penerbitan Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan

NO	NAMA	TANGGAL
1	Surat Edaran Nomor UM.003/1/16/DK-18 tentang Penerapan Permenhub Nomor PM 140 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 70 tahun 2013 tentang Diklat Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut	17 Januari 2018
2	Surat Edaran Nomor UM.003/6/1/DK-18 tentang Pengawasan Dokumen Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/ Kapal yang Dibangun secara Tradisional	16 Maret 2018
3	Surat Edaran Nomor UM.003/9/7/DK-18 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kapal Berkecepatan Tinggi (High Speed Craft)	23 April 2018
4	Surat Edaran Nomor UM.003/9/11/DK-18 tentang Penyampaian Hasil Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim (Marine Environment Protection Committee/MEPC) Ke-72 di Markas Besar Organisasi Maritim Internasional (IMO) London pada Tanggal 9 s.d. 13 April 2018	23 April 2018
5	Surat Edaran Nomor UM.003/13/3/DK-18 tentang Klarifikasi Penulisan Kapasitas dan Limitasi pada Sertifikat Endorsement ATT III Manajemen yang dikeluarkan oleh Indonesia sesuai dengan Ketentuan Konvensi STCW 1978 dan Amandemennya (Amandemen Manila)	6 June 2018
6	Surat Edaran Nomor UM.003/18/5/DK-18 tentang Kewajiban Pengesahan Gambar sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal	21 August 2018
7	Surat Edaran Nomor UM.003/20/7/DK-18 tentang Program Diklat Crowd Management Training dan Crisis Management and Human Behaviour Training	5 September 2018
8	Surat Edaran Nomor UM.003/24/11/DK-18 tentang Larangan Perombakan Kapal Tipe Landing Craft Tank(LCT) menjadi Kapal Penumpang dan Barang (Ro-Ro Passanger Cargo)	22 Oktober 2018

II.III KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA

Dikarenakan adanya penghematan anggaran, terdapat kegiatan Perkapalan dan Kepelautan yang tidak terlaksana yaitu Penyusunan Peraturan Bidang Kepelautan.

II.IV KEGIATAN LAINNYA

1. Melakukan pembahasan mengenai *The Improvement of Safety Standard and Inspection for Non Convention Ship* yang diadakan oleh

Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di ruang rapat Anjungan Gedung Karya Lantai 12. Peserta merupakan perwakilan dari tiap-tiap Subdirektorat di lingkungan Ditkapel.

2. Bersama Bagian Hukum dan KSLN melakukan Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Penerbitan Buku Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/ Kapal yang dibangun secara Tradisional Berbendera Indonesia dan Berlayar di Perairan Indonesia.
3. Menghadiri *Consultative Forum on Regional Cooperation Against Human Trafficking, Labour Exploitation, and Slavery at Sea* yang diadakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 s.d. 28 Maret 2018 bertempat di Hotel Padma Resort Legian, Bali. Dalam hal ini Direktorat Perkapalan dan Kepelautan diwakili oleh Subdirektorat Kepelautan.
4. Bersama Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat melakukan Pembahasan Evaluasi dan Penataan Organisasi Dewan Pengudi Keahlian Pelaut (DPKP) pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Gedung Bellatrix Lantai 2, BP3IP Jakarta.
5. Berpartisipasi dalam Kegiatan Tim Ad Hoc pada Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba yang dibentuk pada bulan Juni 2018 bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
6. Mengikuti Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Implementasi Green Port dan Online Port Waste Management yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 3 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Gedung I BPPT Jakarta. Dalam hal ini Direktorat Perkapalan dan Kepelautan diwakili oleh Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Managemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan Perairan.
7. Menghadiri *Invitation to the Expert Group on Green Ships (EGGS)* yang diadakan oleh *Ministry of Land Infrastructure, Transport and*

Tourism (MLIT) pada tanggal 8 Agustus 2018 bertempat di *Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)*.

8. Mengikuti *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kapal Internasional dan Dampaknya Terhadap Navigasi dan Keselamatan Maritim yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018 bertempat di Hotel Bidakara Grand Savoy Homann Bandung. Dalam hal ini Direktorat Perkapalan dan Kepelautan diwakili oleh Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Managemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan Perairan.
9. Melakukan *Oversight* Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Badan Klasifikasi Indonesia (Persero) bertempat di Kantor Pusat PT. BKI (Persero) pada tanggal 25 s.d. 30 Oktober 2018.

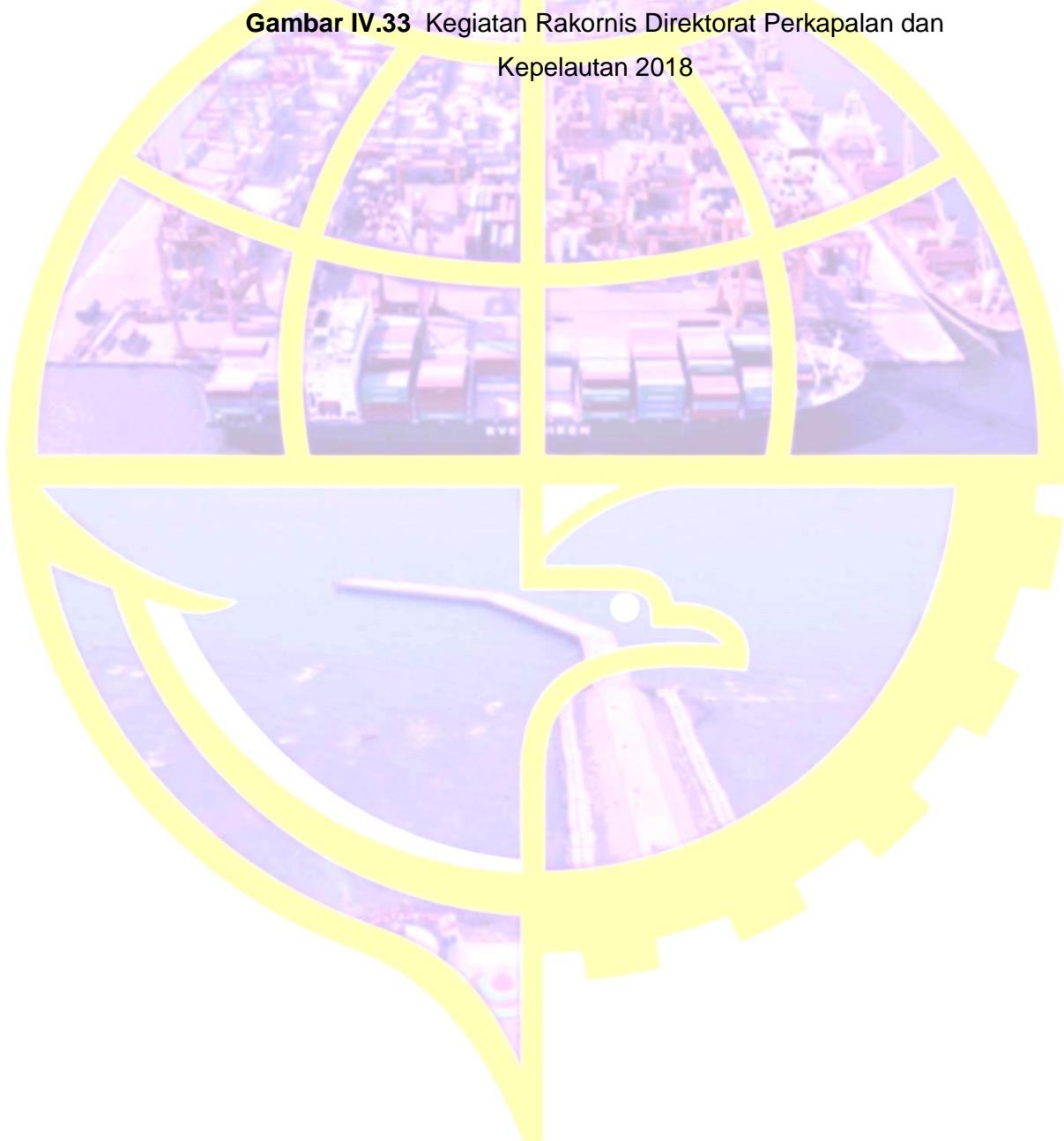


Gambar IV.32 Kegiatan *Oversight* Kerja Sama DJPL dengan PT. BKI (Persero)

10. Telah dilakukan Rakornis Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan tema “Melalui Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Perkapalan dan Kepelautan 2018 Kita Tingkatkan Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Desember 2018 bertempat di Red Top Hotel Pecenongan. Peserta berjumlah 336 orang yang merupakan perwakilan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla yaitu, Kesyahbandaran Utama, KSOP Khusus Batam, KSOP Kelas I s.d. V serta UPP Kelas I s.d. III.



Gambar IV.33 Kegiatan Rakornis Direktorat Perkapalan dan Kepelautan 2018



BAB V

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG KENAVIGASIAN

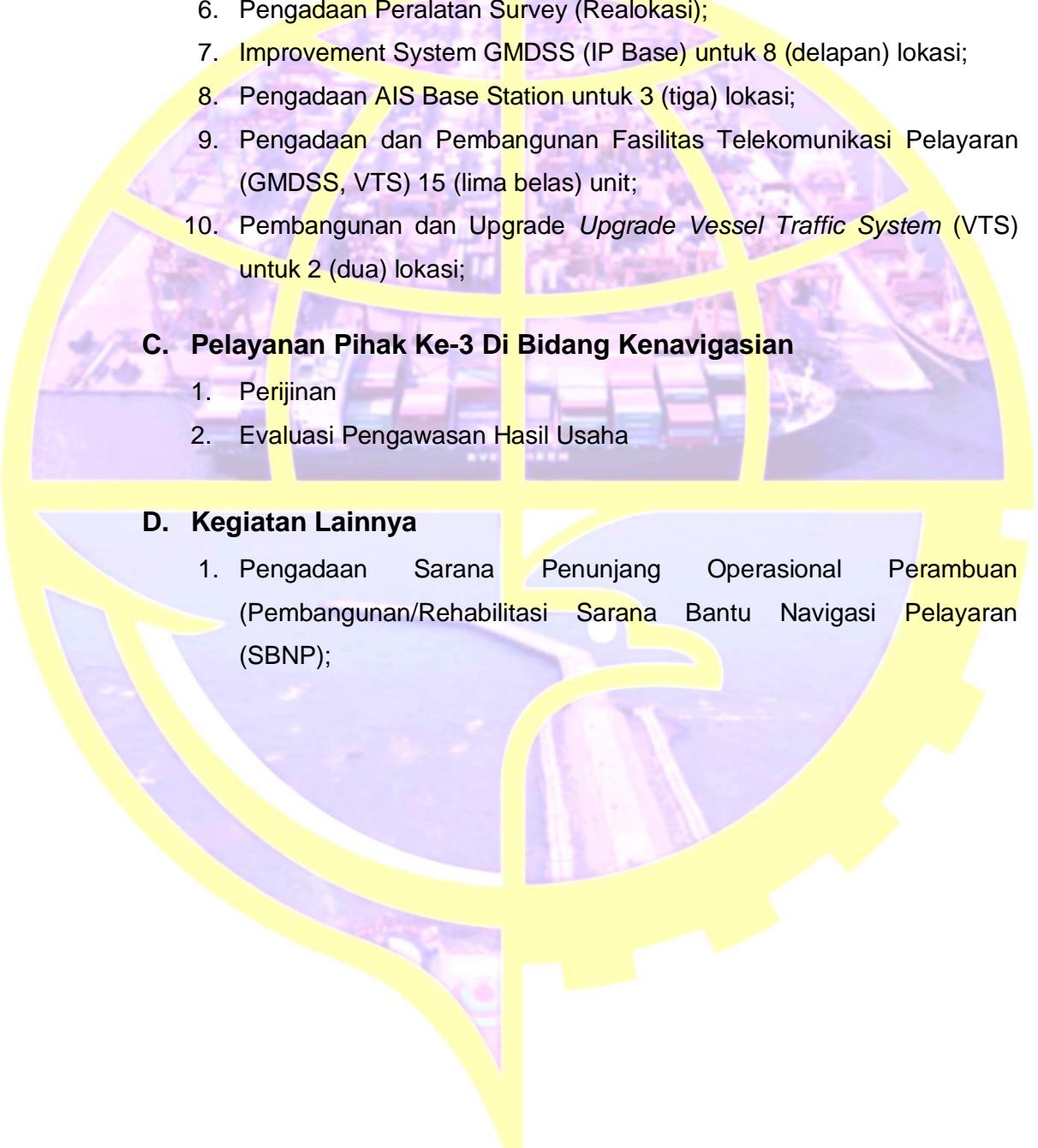
I. PROGRAM KEGIATAN

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian
2. Peningkatan Disiplin Dan Motivasi SDM Kenavigasian;
3. Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian;
4. Sosialisasi SOP Telekomunikasi Pelayaran pada 10 (sepuluh) lokasi
5. Mentoring Operator dan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran
6. Penyertaan Pelatihan Operator VTS sesuai IALA V.103/1
7. Pelatihan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tk-III
8. Penyusunan Buku Sarana Telekomunikasi Pelayaran
9. Pelatihan Refreshment Training Simulator
10. Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian
11. Peningkatan Kompetensi Kartografi Kenavigasian
12. *Focus Group Discussion (FGD)* Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Kalianget, Kijang, Tanjung Pinang dan Probolinggo
13. Penyelenggaraan *The 3rd Implementation Committee Meeting On Joint Hydrographic Survey in The Straits of Malacca and Singapore*
14. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Teknis Armada dan Pangkalan Kenavigasian

B. Kegiatan Pembangunan

1. Docking Kapal Negara Kenavigasian
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
3. Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Pelayaran:
 - a. Pembangunan dan *Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)*
 - b. Pembangunan dan Upgrade *Upgrade Vessel Traffic System (VTS)*

- 
- c. Improvement System GMDSS (IP) Base
 - d. Pengadaan AIS Base Station
 - 4. Penetapan Alur Pelayaran Dan Survey Mandiri Alur Pelayaran
 - 5. Pengadaan Sistem Pengolah Data Survey Hidrografi Kenavigasian;
 - 6. Pengadaan Peralatan Survey (Realokasi);
 - 7. Improvement System GMDSS (IP Base) untuk 8 (delapan) lokasi;
 - 8. Pengadaan AIS Base Station untuk 3 (tiga) lokasi;
 - 9. Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Pelayaran (GMDSS, VTS) 15 (lima belas) unit;
 - 10. Pembangunan dan Upgrade *Vessel Traffic System* (VTS) untuk 2 (dua) lokasi;

C. Pelayanan Pihak Ke-3 Di Bidang Kenavigasian

- 1. Perijinan
- 2. Evaluasi Pengawasan Hasil Usaha

D. Kegiatan Lainnya

- 1. Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Perambuan (Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);

II. REALISASI

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian ke beberapa Distrik Navigasi dan konsinyering untuk peningkatan kualitas Aparatur / Sumber Daya Manusia di bidang Kenavigasian melalui pembinaan atau pelatihan:

Tabel V.1. Lokasi Monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian

No.	Lokasi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	
1	Disnav Kelas I Palembang	10 Januari s.d 13 Januari 2018	Penyusunan Program	Kenavigasian
2	Distrik Navigasi Kelas II Semarang	26 Januari s.d 27 Januari 2018	Pembinaan Kenavigasian	SDM
3	Disnav Kelas I Bitung	28 Februari s.d 2 Maret 2018	Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Kenavigasian	
4	Disnav Kelas II Kupang	21 s.d 23 Maret 2018	Pembinaan Kenavigasian	Teknis
5	Disnav Kelas I Samarinda	3 s.d 4 April 2018	Pembinaan Kenavigasian	Teknis
6	Disnav Kelas II Teluk Bayur	3 s.d 4 April 2018	Pembinaan Kenavigasian	Teknis
7	Disnav Kelas I Surabaya	10 s.d 13 April 2018	Raker Kepegawaian	
8	Disnav Kelas I Belawan	17 s.d 18 Juni 2018	Posko Lebaran	
9	Disnav Kelas I Makassar	11 Juni 2018	Posko Lebaran	

10	Disnav Kelas II Teluk Bayur	7 s.d 9 Juni 2018	Posko Lebaran
11	Disnav Kelas III Tarakan	19 s.d 21 Juni 2018	Posko Lebaran
12	Disnav Kelas I Belawan	25 s.d 26 Juni 2018	Monitoring KM Sinar Bangun
13	Disnav Kelas I Makassar	15 s.d 17 Juli 2018	Bimtek Awak Kapal Patroli
14	Disnav Kelas II Benoa	23 Agustus 2018	Kunjungan Kerja
15	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	4 September 2018	Riview Masterplan JICA
16	Disnav Kelas I Surabaya	20 s.d 21 September 2018	Persiapan Koordinasi Rapat Teknis Kenavigasian
17	Disnav Kelas I Surabaya	22 s.d 24 Oktober 2018	Monitoring SDM Kenavigasian
18	Disnav Kelas I Samarinda	15 s.d 20 Oktober 2018	Review RKAKL Pagu Indikasi TA 2019
19	Disnav Kelas I Surabaya	2 s.d 3 November 2018	Monitoring SDM Kenavigasian
20	Disnav Kelas I Belawan	19 s.d 20 November 2018	Pembinaan Teknis SDM Kenavigasian
21	Disnav Kelas II Semarang	24 s.d 25 November 2018	Pembinaan Teknis SDM Kenavigasian



Gambar V.1. Monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian di Disnav Samarinda dan Disnav Surabaya

Tabel V-2. Lokasi kegiatan konsinyering terkait kegiatan SDM

No.	Nama Kegiatan	Tanggal dan tempat Pelaksanaan
1	Menghadiri undangan terkait pengisian aplikasi e-Revormasi Birokrasi;	24 s.d 27 Januari 2018 Bogor
2	Menghadiri undangan terkait Penyusunan Pra Pagu Kebutuhan tahun 2019;	24 s.d 27 Januari 2018 Bogor
3	Menghadiri undangan terkait Konsinyering Laporan Kinerja;	29 Januari s.d 1 Februari 2018 di Bogor
4	Menghadiri undangan terkait Laporan Realisasi Target PNBP	7 s.d 10 Februari 2018 di Bogor
5	Menghadiri undangan terkait penyusunan RKA/KL 2019	19 s.d 23 Februari 2018 di Bogor
6	Menghadiri undangan terkait Penyusunan Data Statistik Transportasi	1 s.d 3 Maret 2018 di Bogor
7	Menghadiri undangan terkait Pembinaan Teknis Kenavigasian	26 Maret 2018 di Bogor
8	Menghadiri undangan terkait pembahasan contac person Ditjen Hubla	26 s.d 29 Maret 2018 di Bogor
9	Menghadiri undangan terkait penyusunan realisasi Triwulan I	5 s.d 7 April 2018 di Bogor
10	Menghadiri undangan terkait Aplikasi SMART	5 April 2018 di Bogor
11	Evaluasi Saldo Awal Laporan Keuangan Tingkat Wilayah	18 s.d 21 April 2018 di Bogor
12	Menghadiri undangan terkait Penyusunan Tata Cara Perlindungan Hukum	7 s.d 9 Mei 2018 di Bogor
13	Menghadiri undangan terkait Sosialisasi Pelaksanaan PIPK	7 s.d 9 Mei 2018 di Bandung
14	Menghadiri undangan terkait Review APIP dan Penghapusan Catatan Halaman IV	3 s.d 5 Mei 2018 di Bogor
15	Menghadiri undangan terkait Evaluasi Target PNBP	17 s.d 19 Mei 2018 di Bogor
16	Menghadiri undangan terkait penyesuaian ADK Saldo Awal Audit BPK	27 s.d 29 Juni 2018 di Bogor
17	Menghadiri undangan terkait Rekonsiliasi Lap. Keuangan Semester	4 s.d 7 Juli 2018 di Bogor

	I Tingkat Wilayah	
18	Menghadiri undangan terkait Sosialisasi Revormasi Birokrasi	26 s.d 27 Juli 2018 di Bandung
19	Menghadiri undangan terkait Bimtek Keprotokolan	2 s.d 6 Juli 2018 di Bogor
20	Menghadiri undangan terkait Bimtek LAKIP	24 s.d 27 Juli 2018 di Jogyakarta
21	Menghadiri undangan terkait Bimtek Ketata Usahaan	2 s.d 4 Agustus 2018 di Bogor
22	Menghadiri undangan terkait Bimtek e-monay	9 s.d 11 Agustus 2018 di Bogor
23	Menghadiri undangan terkait Penyusunan SOP	15 s.d 16 Agustus 2018 di Bekasi
24	Menghadiri undangan terkait Penyusunan SAKIP	27 s.d 29 Agst 2018 di Semarang
25	Menghadiri undangan terkait Penyusunan Soal CPNS	6 s.d 8 September 2018 di Bogor
26	Menghadiri undangan terkait Sosialisasi KKN	20 s.d 21 September 2018 di Bali
27	Menghadiri undangan terkait Penyusunan Soal CPNS	1 s.d 3 Oktober 2018 di Bogor
28	Menghadiri undangan terkait Diklat Bendahara	24 s.d 28 Sept 2018 di Balikpapan
29	Menghadiri undangan terkait Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi	1 s.d 2 Oktober 2018 di Bekasi
30	Menghadiri undangan terkait Penyusunan Silabus	5 s.d 10 November 2018 di Bogor
31	Menghadiri undangan terkait Penyusunan RUU Transportasi	20 s.d 23 November 2018 di Bogor

2. Peningkatan Disiplin Dan Motivasi SDM Kenavigasian

Telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kenavigasian 2018 pada tanggal 07 s.d 09 Desember 2018 di Villa Ratu, Bogor dan yang ditunjuk sebagai *Professional Conference Organizer (PCO)* adalah PT. Multi Taruna Sejati. Tema Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kenavigasian 2018 adalah “**Melalui kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kenavigasian kita tingkatkan kualitas dan etos kerja di lingkungan Direktorat Kenavigasian.**” Peserta Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kenavigasian 2018 berjumlah 100 orang yang terdiri dari Para

Pejabat di Lingkungan Direktorat Kenavigasian Para Pegawai di Lingkungan Direktorat Kenavigasian



Gambar V.2. Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kenavigasian Tahun 2018

3. Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian yang dikelola oleh PT. Interforum Convex dan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 16 November 2018 di Hotel Whynadom, - Surabaya yang diikuti oleh 180 orang peserta terdiri dari 25 Distrik Navigasi dan para pejabat di lingkungan Direktorat Kenavigasian dan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan mengambil tema **“Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan dalam Mewujudkan Konektivitas dibidang Kenavigasian”**, dengan Narasumber dan materi rapat sebagai berikut:

Tabel V.3 Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian

No.	Materi	Narasumber
1.	Sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (sekaligus membuka acara Rakornis Kenavigasian)	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2.	Pembekalan/Paparan :	
	a. Penyiapan dan Penataan Organisasi BLU	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
	b. Metode Rencana Kerja dan Anggaran BLU	Kepala Biro Keuangan
	c. Peraturan dan Kebutuhan Standarisasi BLU	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Kementerian Keuangan
	d. Digitalisasi Pelayanan Kenavigasian	Kepala Pustikom, Setjen
3.	Pemaparan tentang "Hasil Survey Alur Pelayaran"	Perwakilan dari Distrik Navigasi
4.	Pembahasan Sidang Komisi	Para Kepala Distrik Navigasi
	a. Pembahasan Komisi A (BLU dan Aset)	
	b. Pembahasan Komisi B (Alur Pelayaran)	Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan
	c. Pembahasan Komisi C (e- Navigation)	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan



Gambar V.3.Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian tanggal 15 s.d.16 November 2018 Di Hotel Whynad - Surabaya

4. Sosialisasi SOP Telekomunikasi Pelayaran pada 10 (sepuluh) lokasi
 Telah dilaksanakan Sosialisasi SOP Telekomunikasi Pelayaran pada 10 (sepuluh) lokasi disiapkan oleh PT. Gemahlindo dengan uraian sebagai berikut :

Tabel V.4. SOP Telekomunikasi Pelayaran pada 10 (sepuluh) lokasi

NO	LOKASI KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	FOTO KEGIATAN
1.	Batam	25 Oktober 2018	100	 
2.	Samarinda	31 Oktober 2018	105	 
3.	Balikpapan	2 Nopember 2018	115	 
4.	Panjang	7 Nopember 2018	105	 
5.	Merak	9 Nopember 2018	100	 
6.	Semarang	21 Nopember 2018	115	
7.	Banjarmasin	23 Nopember 2018	105	

8.	Bali	26 Nopember 2018	115	
9.	Makassar	28 Nopember 2018	110	
10.	Manado	30 Nopember 2018	100	

5. Mentoring Operator dan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran

Telah dilaksanakan kegiatan Mentoring Operator dan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran disiapkan oleh PT. Interforum Convex dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.5. Lokasi pelaksanaan kegiatan Mentoring Operator dan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran

NO	LOKASI KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	FOTO KEGIATAN
1.	Jakarta	7 – 8 Nopember 2018	25	
2.	Surabaya	8 – 9 Nopember 2018	25	
3.	Medan	23-24 Nopember 2018	25	
4.	Jayapura	26-27 Nopember 2018	25	

5.	Merauke	29-30 Nopember 2018	25	
6.	Samarinda	3-4 Desember 2018	25	
7.	Bitung	5-6 Desember 2018	25	
8.	Kendari	6-7 Desember 2018	25	
9.	Kupang	10-11 Desember 2018	25	
10.	Tarakan	10-11 Desember 2018	25	

6. Penyertaan Pelatihan Operator VTS sesuai IALA V.103/1

Telah dilaksanakan kegiatan penyertaan Pelatihan Operator VTS sesuai IALA V.103/1 untuk 30 orang peserta dari masing-masing Distrik Navigasi seluruh Indonesia yang dibagi dalam 2 Batch sebagai berikut :

- Batch 1 dimulai pada tanggal 22 Oktober 2018 s.d 16 Nopember 2018;
- Batch 2 dimulai pada tanggal 2 Nopember 2018 s.d 30 Nopember 2018 disiapkan oleh PT. Dinamika Kreasi Sejahtera dan Lembaga Pendidikan PT. Visi Teknologi Samudera .



Gambar V.4. Penyertaan Pelatihan Operator VTS sesuai IALA V.103/1

7. Pelatihan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tk-III

Telah dilaksanakan kegiatan penyertaan Pelatihan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tk-III untuk 40 orang peserta dari masing-masing Distrik Navigasi seluruh Indonesia yang dibagi dalam 2 Batch dimulai dari tanggal 22 Nopember 2018 s.d 22 Desember 2018 disiapkan oleh PT. Tri Artha Mahadya dan Lembaga Pendidikan Universitas Indonesia serta PT. Interforum Convex dan Lembaga Pendidikan Institut Teknologi Surabaya

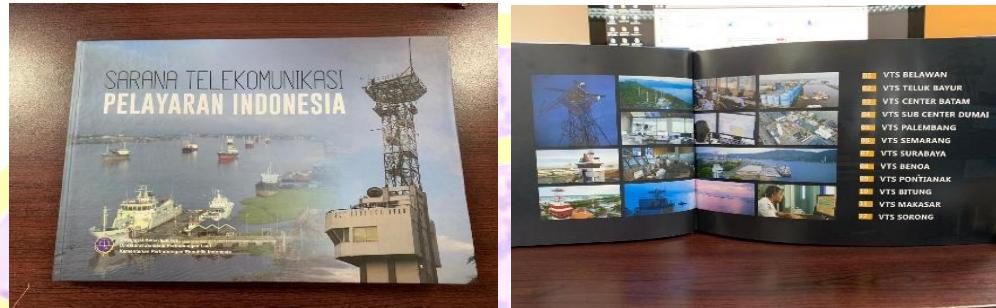


Gambar V.5. Pelatihan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tk-III

8. Penyusunan Buku Sarana Telekomunikasi Pelayaran

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Buku Sarana Telekomunikasi Pelayaran disiapkan oleh PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan guna penyusunan dokumentasi dan publikasi sarana Telekomunikasi Pelayaran

(VTS dan SROP) di wilayah kerja Distrik Navigasi, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;



Gambar V.6. Buku Sarana Telekomunikasi Pelayaran

9. Pelatihan Refreshment Training Simulator

Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan Refreshment Training Simulator di Batam untuk 16 orang peserta yang dibagi dalam 4 batch disiapkan oleh PT. Tri Artha Mahadya :



Gambar V.7. Pelatihan Refreshment Training Simulator

10. Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian

Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian, dilaksanakan di Surabaya, pada tanggal 12 September s.d. 23 Oktober 2018 dan di Yogyakarta dan Semarang pada tanggal 4 Oktober s.d. 14 November 2018 dengan tujuan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan alur pelayaran berupa tingkat keakuratan dalam processing dan pengambilan data survey hidrografi dengan menggunakan peralatan survey yang berteknologi tinggi serta ditunjang oleh SDM yang berkualitas.

Pelatihan ini terselenggara bersama ITS dan UGM diselenggarakan oleh Geodesi Fakultas Teknik

atas kerjasama (Dalam hal ini Departemen Teknik UGM dan ITS);



Gambar V.8. Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian

11. Peningkatan Kompetensi Kartografi Kenavigasian

Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Kartografi Kenavigasian, dilaksanakan di Surabaya, pada tanggal 24 Oktober s.d. 23 November 2018 dengan tujuan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan alur pelayaran berupa tingkat keakuratan dalam penggambaran peta hasil pengolahan data survey hidrografi dengan menggunakan software serta ditunjang oleh SDM yang berkualitas. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama bersama ITS.



Gambar V.9. Peningkatan Kompetensi Kartografi Kenavigasian

12. Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Kalianget, Kijang, Tanjung Pinang dan Probolinggo

Telah dilaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Kalianget, Kijang, Tanjung Pinang dan Probolinggo terlaksana;



Gambar V.10 Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran

Pelabuhan Kalianget, Kijang, Tanjung Pinang dan Probolinggo

13. Penyelenggaraan

*3rd Implementation Committee
Meeting On Joint Hydrographic
Survey in The Straits of Malacca
Singapore.*



Gambar V.11 Penyelenggaraan The 3rd Implementation Committee Meeting On Joint Hydrographic Survey in The Straits of Malacca and Singapore

14. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Teknis Armada dan Pangkalan Kenavigasian

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi Penilaian Teknis Armada dan Pangkalan Kenavigasian, serta melaksanakan pembinaan teknis di beberapa Distrik Navigasi yaitu:

Tabel V.6. Lokasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis Armada dan Pangkalan Kenavigasian

No.	Lokasi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Foto dan Objek Kegiatan
1.	Distrik Navigasi Kelas III Merauke	13 s.d. 16 Maret 2018	  KN. MERPATI   KN. BINTANGUR
2.	Distrik Navigasi Kelas I Belawan	26 s.d.28 Maret 2018	  KN. ARCTURUS   KN. SUAR 008

				
				KN. B - 118
3.	Distrik Navigasi Kelas I Tg. Pinang	17 s.d. 20 April 2018	 	KN. ADHARA KN. MITRA IV
			 	KN. SUAR 004 KN. MANTANG
			 	KN. NONGSA
4.	Distrik Navigasi Kelas I Bitung	2 s.d. 4 Mei 2018	 	KN. MERAK KN. SUAR 005
			 	KN. B-134
5.	Distrik Navigasi Kelas II Jayapura	22 s.d 25 Mei 2018	 	KN. ALDEBARAN

6.	Distrik Navigasi Kelas II Sabang	25 s.d 27 Juni 2018		
7.	Distrik Navigasi Kelas II Semarang	18 s.d. 20 Juli 2018		

B. Bidang Pembangunan

1. Docking Kapal Kenavigasian

Telah dilaksanakan pemeliharaan / perawatan Kapal Kenavigasian sebanyak 6 (enam) unit kapal dengan anggaran sebesar Rp.46.496.323.700 (Empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

**Tabel V.7.
Docking Kapal Kenavigasian**

No	Nama Kapal	Lokasi	(Pelaksanaan Pekerjaan) Kontrak
1	Rehab Crane KN Mandalika	Sibolga	Mei s.d. Desember 2018
2	KN Adhara	Tg. Pinang	Oktober s.d. November 2018
3	KN Prajapati	Surabaya	Setember s.d. Oktober 2018
4	KN Al Nilam	Pontianak	Juli s.d. Desember 2018
5	Repowering KN Mahkota	Tual	Mei s.d. Desember 2018
6	KN Merpati	Merauke	Mei s.d. Agustus 2018

Sumber data : Direktorat Kenavigasian



Gambar V.12. Docking Kapal Kenavigasian

2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 224 unit.

Telah dillaksanakan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 224 unit pada lokasi sebagai berikut:

Tabel V.8
Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

NO	Distrik Navigasi (DISNAV)	Menara Suar (MENSU)	Rambu Suar (RAMSU)	Pelampung Suar (PELSU)	TOTAL
1.	SABANG	-	1	-	1
2.	BELAWAN	-	1	-	1
3.	DUMAI	-	5	10	15
4.	TELUK BAYUR	-	8	-	8
5.	TG. PRIOK	-	2	-	2
6.	SEMARANG	-	4	-	4
7.	CILACAP	-	4	2	6
8.	BENOA	-	13	-	13
9.	KUPANG	-	9	14	23
10.	BANJARMASIN	-	2	10	12
11.	SAMARINDA	-	14	-	14
12.	TARAKAN	-	4	9	13
12.	BITUNG	-	6	-	6
13.	KENDARI	-	12	-	12
14.	MAKASSAR	-	10	-	10
15.	TUAL	-	5	5	10
16.	MERAUKE	-	4	3	7
17.	JAYAPURA	-	2	9	11
18.	PALEMBANG	-	1	20	21
19.	TG. PINANG	-	8	5	13
20.	SURABAYA	-	-	17	17
21.	AMBON	-	-	5	5
JUMLAH		0	115	109	224

Sumber data : Direktorat Kenavigasian





Gambar V.13. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

3. Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Pelayaran sebagai berikut:

a. Pembangunan dan *Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)*

Telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan dan *Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* pada tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.9.
Pembangunan dan *Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* TA 2018

NO	URAIAN	DISTRIK NAVIGASI	JUMLAH
1.	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan GMDSS	Sabang (SROP Kelas IV Meulaboh)	1 paket
		Tg. Pinang (SROP Kelas IV Tg. Balai Karimun)	1 paket
		Sibolga (SROP Kelas IV Tello)	1 paket
		Semarang (SROP Rembang)	1 paket
		Benoa (SROP Kelas IV Labuan Lombok)	1 paket
		Kupang (SROP Atapupu)	1 paket
		Banjarmasin (Kapal KN.)	1 paket

			Altair)	
			Makassar (SROP Kelas IV Selayar)	1 paket
			Makassar (SROP Kelas IV Palopo)	1 paket
			Bitung (SROP Kelas IV-A Gorontalo dan Tahuna)	2 paket
			Ambon (SROP Kelas IV Banda)	1 paket
			Jayapura (SROP Kelas IV Sarmi)	1 paket
2.	Upgrade sistem GMDSS		Belawan (SROP Kelas III Kuala Tanjung)	1 paket
			Tual (SROP Kelas III Tual)	1 paket



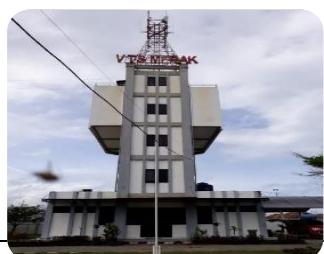
Gambar V.14. Upgrade GMDSS SROP Kelas III Kuala Tanjung

b. Pembangunan dan Upgrade *Upgrade Vessel Traffic System (VTS)*

Telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan dan *Upgrade Vessel Traffic System (VTS)* pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu :

URAIAN	NO	DISTRIK	Tabel V.10 Pembangunan dan Upgrade <i>Upgrade Vessel Traffic System (VTS)</i>	
			1	2
<i>Upgrade Vessel Traffic System (VTS)</i>	1	Distrik Navigasi Merak		
	2	Distrik Navigasi Merak		

Sumber data : Direktorat Kenavigasian





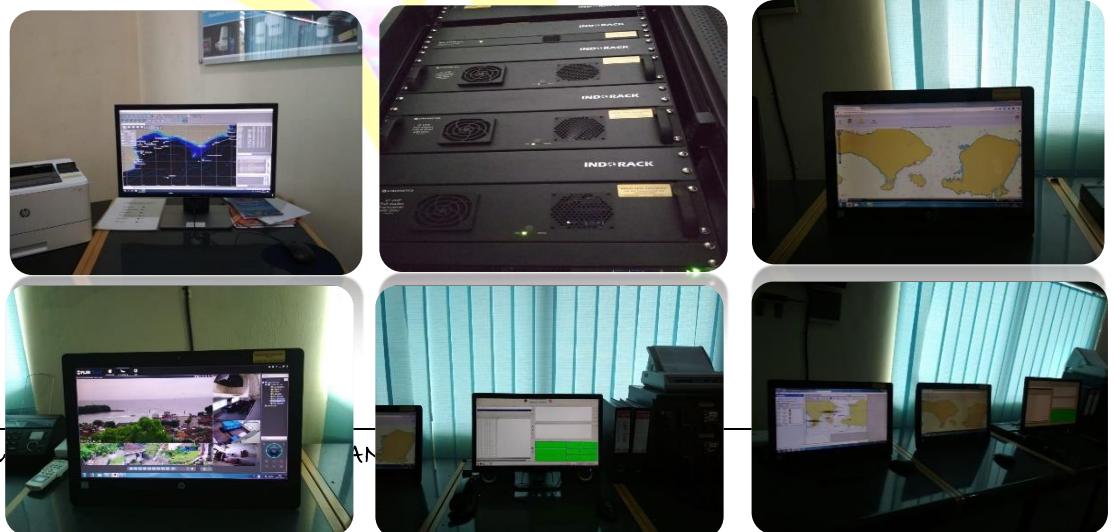
Gambar V.15 VTS Merak, VTS Panjang dan VTS Tarakan

c. ***Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi***

Telah dilaksanakan kegiatan ***Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi*** pada tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) lokasi, yang terintegrasi dengan *Marine Command Center (MCC)* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

**Tabel V.11.
*Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi***

NO	URAIAN	DISTRIK NAVIGASI	JUMLAH
1.	DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA	SROP CELUKAN BAWANG	1 paket
		SROP PADANG BAI	1 paket
		SROP GILIMANUK	1 paket
2.	DISTRIK NAVIGASI KELAS III SIBOLGA	SROP SIBOLGA	1 paket
		SROP TELUK DALAM	1 paket
		SROP GUNUNG SITOLI	1 paket
3	DISTRIK NAVIGASI KELAS III KENDARI	SROP KOLAKA	1 paket
4	DISTRIK NAVIGASI KELAS III TARAKAN	SROP TARAKAN	1 paket





Gambar V.16 *Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi*

d. Pengadaan A/S Base Station untuk 3 Lokasi

Telah dilaksanakan Pengadaan A/S Base Station pada tahun 2018 sebanyak 3 Lokasi yaitu :

Tabel V.12.
Pengadaan A/S Base Station

NO	URAIAN	DISTRIK NAVIGASI	JUMLAH
1	DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA	SROP BENOA	1 paket
2	DISTRIK NAVIGASI KELAS III TUAL	SROP TUAL	1 paket
3	DISTRIK NAVIGASI KELAS III KENDARI	SROP BAU-BAU	1 paket

Sumber data : Direktorat Kenavigasian



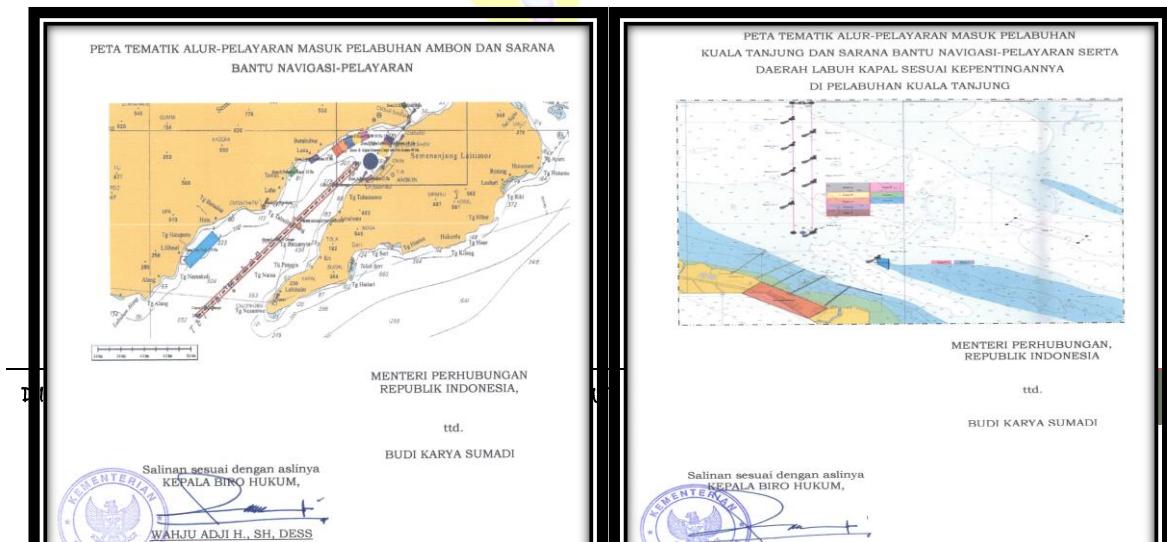
Gambar V- 17. Pengadaan AIS Base Station

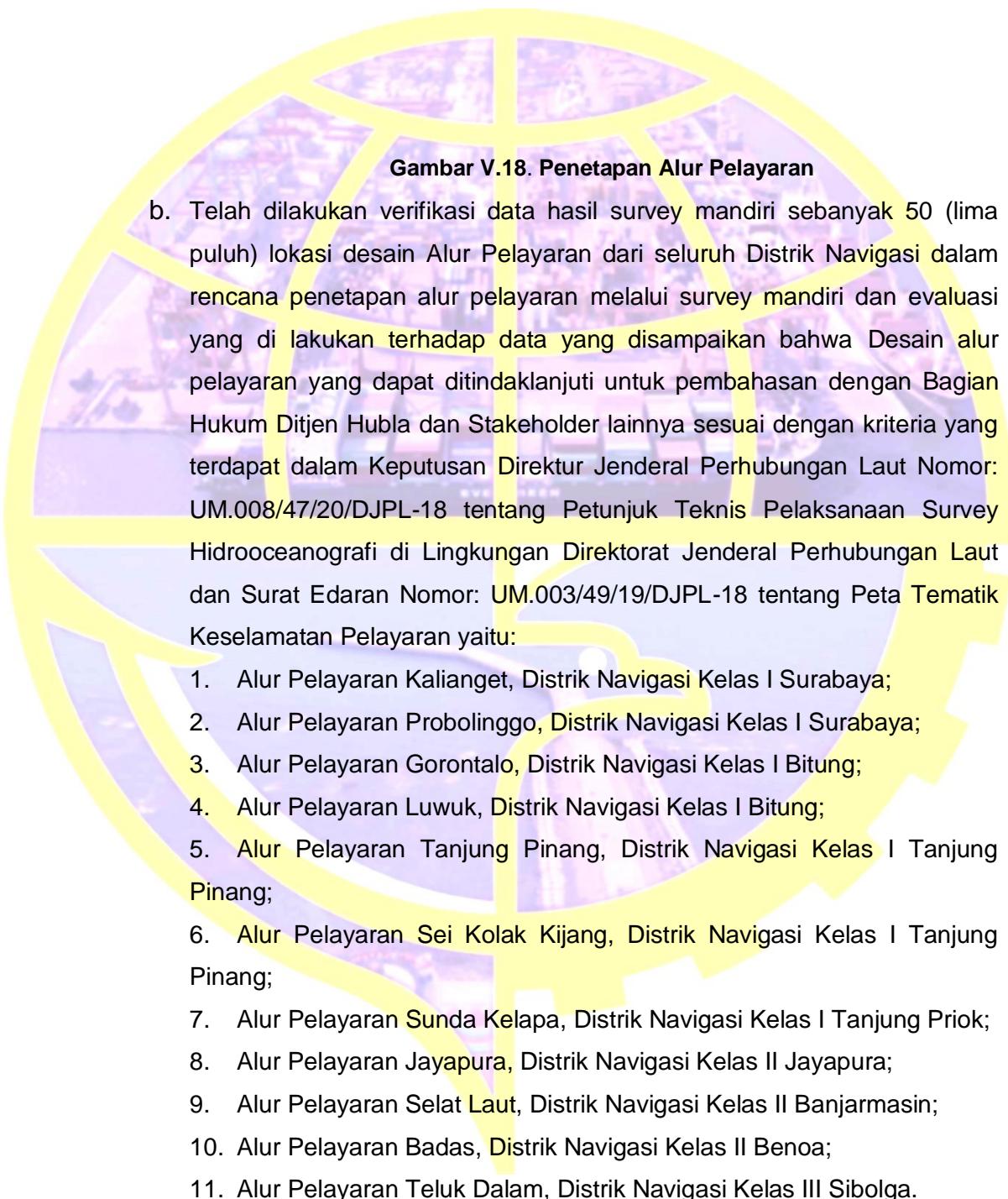
8. Penetapan Alur Pelayaran (10 lokasi) Dan Survey Mandiri Alur Pelayaran (50 lokasi)

a. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pelabuhan Utama, 240 (dua ratus empat puluh) Pelabuhan Pengumpul dan 962 (sembilan ratus enam puluh dua) Pelabuhan Pengumpan, yang kesemuanya memerlukan penetapan alur pelayaran. Pada tahun 2018 telah ditetapkan alur pelayaran sebanyak 10 (sepuluh) lokasi pelabuhan pelayaran melalui Keputusan Menteri Perhubungan yaitu :

**Tabel V.13
Penetapan Alur Pelayaran**

NO	LOKASI	KEPUTUSAN MENTERI
1	PELABUHAN AMBON	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 822 TAHUN 2018
2	ALUR-PELAYARAN TIMUR SURABAYA	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 821 TAHUN 2018
3	PELABUHAN LEMBAR	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 820 TAHUN 2018
4	PELABUHAN DUMAI	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 819 TAHUN 2018
5	PELABUHAN BATAM	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 775 TAHUN 2018
6	PELABUHAN SAMARINDA	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 722 TAHUN 2018
7	PELABUHAN KUALA TANJUNG	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 723 TAHUN 2018
8	PELABUHAN LABUAN BAJO DAN P. KOMODO	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 898 TAHUN 2018
9	PELABUHAN TELUK BINTUNI	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 1095 TAHUN 2018
10	PELABUHAN MANADO DAN TN BUNAKEN	KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 1097 TAHUN 2018





C. Pelayanan Pihak Ke-3 Di Bidang Kenavigasian

1. Perijinan

Subdit Telekomunikasi Pelayaran tahun 2018, telah memproses permohonan Rekomendasi Ijin Stasiun Radio (Rek.ISR) pantai dan kapal yang baru/perpanjangan sebanyak **4.118 buah** yang terdiri atas:

Rekomendasi Baru = 3.142 buah

Perpanjangan = 976 buah

Untuk permohonan MMSI tahun 2018 sebanyak **1477 buah**

Mulai bulan Agustus 2016 Subdit Telekomunikasi Pelayaran sudah melakukan pemrosesan permohonan Rekomendasi Ijin Stasiun Radio (Rek.ISR) pantai dan kapal yang baru/perpanjangan secara **ONLINE**

2. Evaluasi Pengawasan Hasil Usaha

Telah dilaksanakan evaluasi & pengawasan Hasil Usaha Kuasa Perhitungan Jasa TELKOMPEL. Adapun Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran untuk Tahun Anggaran 2018 dengan hasil penerimaan sebesar PNBP Jasa Telegram Radio Rp. **335.981.698** dan PNBP Jasa LRIT Rp. **68.692.800** yang disetorkan ke Kas Negara melalui Kode Billing. Selama tahun 2018 pengoperasian telekomunikasi pelayaran dapat dikatakan terselenggara dengan baik yaitu :

Hubungan Dinas Bergerak pelayaran (Mobile Service)

Hubungan Dinas Tetap / Point to Point (Fixed Service)

Hubungan Pembicaraan Telepon Radio (Telephone Call)

D. Kegiatan Lainnya

1. Telah dilaksanakan pengawasan & evaluasi pembangunan & rehabilitasi peralatan Telkompel;
2. Telah diinventarisasi usulan UPT untuk pemasangan sarana Telkompel;

3. Telah dilaksanakan evaluasi laporan kerusakan perangkat radio di SROP;
4. Telah dilaksanakan analisa & evaluasi laporan & bimbingan serta pengawasan operasional SROP, SROK dan SBNP Elektronika;
5. Telah menyusun rencana penggantian jabatan KASROP, Ka. Teknik SROP yang memasuki pensiun/penyegaran'
6. Telah dilakukan pendataan pelanggaran peraturan radio ITU Genewa melalui laporan SROP Kelas I;
7. Telah dilaksanakan penyusunan Data Statistik telegram kirim/terima dari SROP Ditjenhubla;
8. Telah dilaksanakan penyusunan pemutahiran data SROP Indonesia. Telah diadakan pemutakhiran data Stasiun Radio Pantai Indonesia dan telah diserahkan ke Ditjen postel guna diteruskan ke ITU (List of Coast Stations of Indonesia);
9. Telah dilaksanakan penyusunan rencana kebutuhan Service Document;
10. Telah dilaksanakan evaluasi sistem peralatan SROP
11. Telah dilaksanakan bimbingan teknis secara langsung ataupun melalui kawat / telepon kepada teknisi SROP dalam mengatasi kesulitan atau kerusakan pada pesawat, serta berkoordinasi dengan kontraktor terkait guna perbaikan pesawat (yang masih menjadi tanggung jawabnya/ garansi)
12. Telah dilaksanakan Penyusunan Standar dan Kriteria Desain Kapal Survey.





laksanakan Feasibility Study (FS) Pembangunan Jetty Menara Suar Wilayah Distrik Navigasi Kelas I Samarinda.

Gambar IV.20. Feasibility Study (FS) Pembangunan Jetty Menara Suar Wilayah Distrik Navigasi Kelas I Samarinda



14. Telah dilaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas Menara Suar Pulau Sebatik Distrik Navigasi Kelas III Tarakan.



Gambar V.22 Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas Menara Suar Pulau Sebatik Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, disiapkan oleh PT. Rayasurverindo Tirtasarana Konsultan Teknik

15. Telah dilaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas Menara Suar Pulau Mangkalihat Distrik Navigasi Kelas I Samarinda.



Gambar V.23 Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas Menara Suar Pulau Mangkalihat Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, disiapkan oleh PT. Bahari Jaya Sejahtera

16. Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Basic Safety Training (BST).



Gambar V.24 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Basic Safety Training (BST) pada tanggal 17 s/d 25 Oktober 2018 berjumlah 40 peserta bertempat di Pertamina Training Maritim Center

17. Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Diklat Marine Surveyor Tk. Dasar.

18



Gambar V.25 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Diklat Marine Surveyor Tk. Dasar di BKI Academy

ilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Radar ARPA dan Radar Simulator.

19



Gambar V.26 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Radar ARPA dan Radar Simulator di Pertamina Training Maritim Center

ilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Electronic Chart Display and Information System (ECDIS).



Gambar V.27 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) di Pertamina Training Maritim Center

ilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Electrician



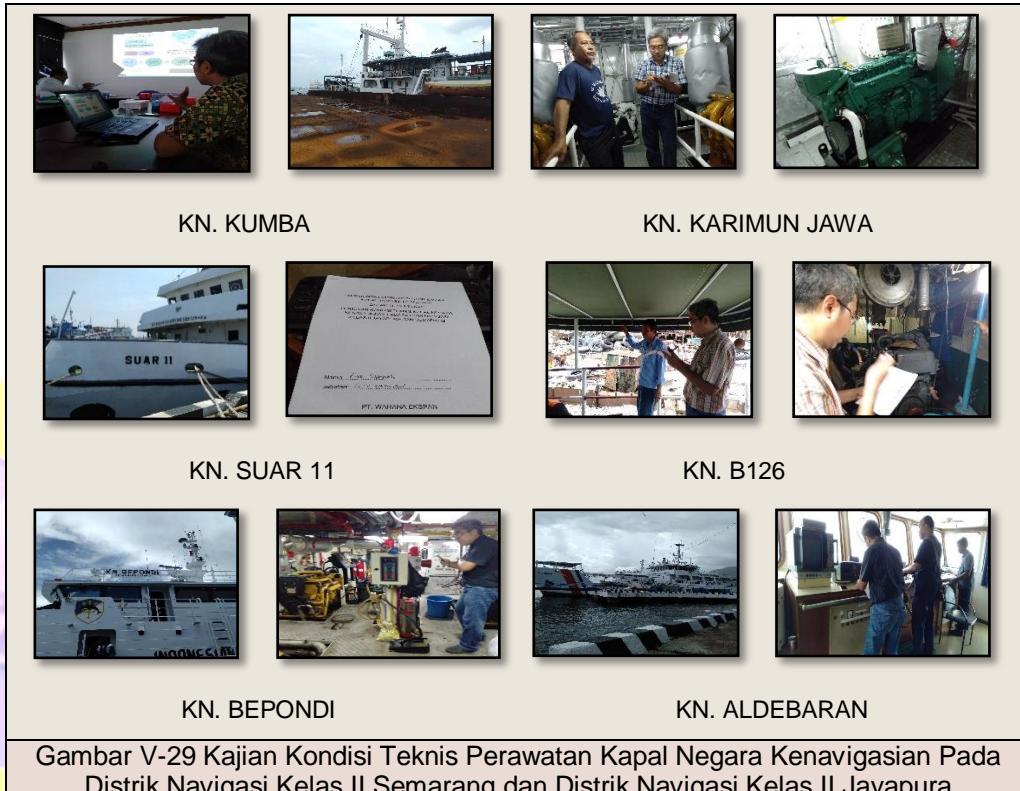
Gambar V.28 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Electrician di Pertamina Training Maritim Center

laksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Medical First Aid (MFA)

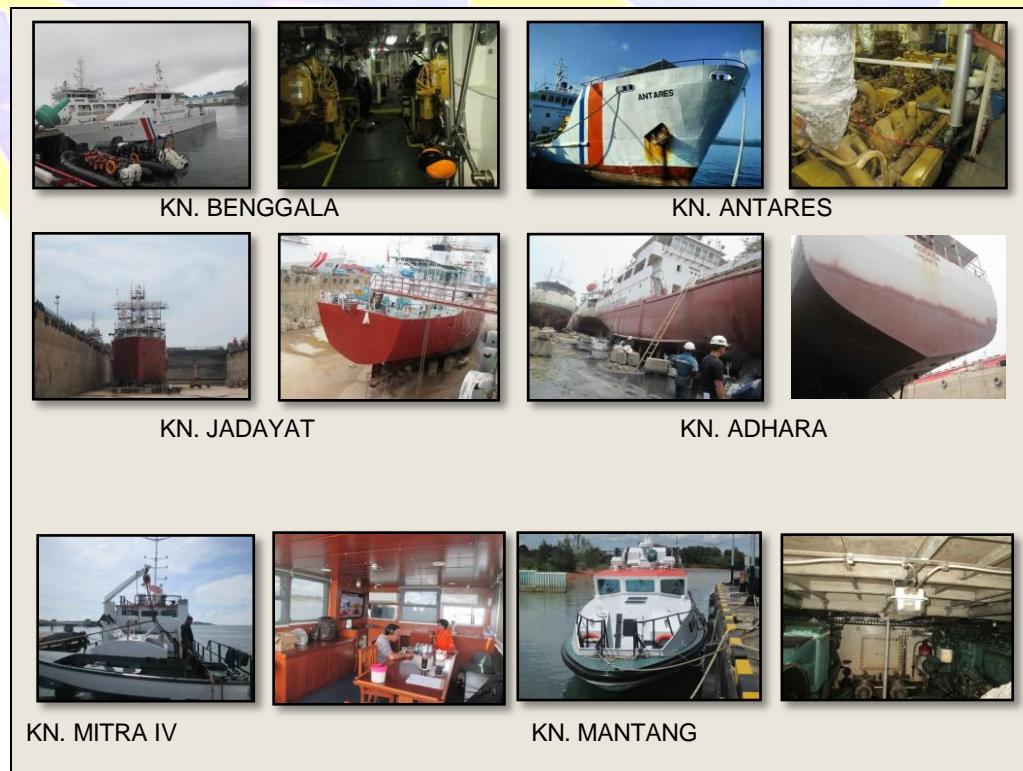


Gambar V.29 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Medical First Aid (MFA) di Pertamina Training Maritim Center

laksanakan Kajian Kondisi Teknis Perawatan Kapal Negara Kenavigasian Pada Distrik Navigasi Kelas II Semarang dan Distrik Navigasi Kelas II Jayapura.



Kan Kajian Kondisi Teknis Perawatan Kapal Negara Kenavigasian Pada
Distrik Navigasi Kelas II Semarang dan Distrik Navigasi Kelas II Jayapura.



Gambar V.30 Kajian Kondisi Teknis Perawatan Kapal Negara Kenavigasian Pada Distrik Navigasi Pada Distrik Navigasi Kelas II Sabang dan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang

E. KEGIATAN TIDAK TERLAKSANA

Kegiatan yang tidak dilaksanakan dialihkan untuk kegiatan lain yang mempunyai mata anggaran yang sama



BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

I. PROGRAM

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Peningkatan Keterampilan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*
2. Bimbingan Teknis Boarding Officer
3. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Reguler (Pola 400 Jam Pelajaran) dan Manajerial (Pola 200 Jam Pelajaran)
4. Pembentukan Petugas Intelijen
5. Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai
6. Penyusunan Pedoman Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukan Ahli Bidang Pelayaran
7. Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
8. Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)
9. Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan Muatan Barang Berbahaya pada Pelayaran.
10. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya
11. Peningkatan Keterampilan Penyelam KPLP Bidang Salvage dan PBA
12. Latihan nasional penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak (Marine Pollution Exercise)
13. Focus Group Discussion (FGD) Rapat Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Puskodalnas)

-
14. Rapat Kerja Teknis Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (RAKERNIS KPLP)
 15. Konsinyering Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Subbidang Sarana dan Prasarana Direktorat KPLP
 16. Bimbingan Teknis (Bimtek) Awak Kapal Patroli KPLP
 17. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pemeliharaan Kapal Patroli KPLP
 18. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran
 19. Penyusunan LKIP dan LAPTAH
 20. Serah Terima Operasional Kapal Patroli Kelas III dan RIB (Rigid Inflatable Boat) 12 Meter
 21. Studi Kelayakan Crane Kapal Kelas I
 22. Studi Retrovit

B. Kegiatan Pembangunan

- Pengadaan RBB (Rigid Bouyant Boat) 6,7 Meter

C. Pelayanan Pihak ke-3

1. Penerbitan *International Ship Security Certificate (ISSC)*
2. Penerbitan Statement of Compliance Port Security (SoCPF)
3. Penetapan Recognized security Organitation (RSO)
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang modal seluruhnya dalam negeri
5. Pemberian Ijin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

D. Kegiatan Lainnya

1. Port Security Regulatory Deep Dive Group Discussion
2. Kunjungan ke fasilitas pelabuhan oleh U.S. Coast Guard dan Port Security Advanced Audit Workshop
3. Passenger Screening Skills Course

E. KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA

- Pembangunan 3 Unit Kapal Patroli Kelas III (Multiyears 2018-2019)

II. REALISASI

A. Bidang Pemerintahan dan Operasional

1. Peningkatan Keterampilan *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code

Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Keterampilan ISPS Code dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia khususnya bidang pemeriksaan Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan pada tanggal 16-21 September 2018 di Hotel Amaroossa Bekasi, dengan jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI.1 DOKUMENTASI PENINGKATAN KETERAMPILAN ISPS CODE

2. Bimbingan Teknis *Boarding Officer*

Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis *Boarding Officer* dengan tujuan memberikan pembekalan terhadap awak kapal patroli tentang prosedur pemeriksaan kapal, pada tanggal 06-12 Agustus 2018 di Hotel Mercure Jakarta dan Pangkalan PLP Kelas I Tg. Priok, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI.2 DOKUMENTASI BIMBINGAN TEKNIS BOARDING OFFICER

3. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Reguler (Pola 400 Jam Pelajaran) dan Manajerial (Pola 200 Jam Pelajaran)

Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan PPNS Reguler (Pola 400 Jampel) dan Manajerial (Pola 200 Jampel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menjalankan fungsi sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pelayaran dan memenuhi kebutuhan PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang dilaksanakan pada :

- a. Pada tanggal 01 Oktober-29 November 2018 di Pusat Diklat Reskrim Polri Megamendung, Bogor – Jawa Barat dengan Jumlah peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari Unit Pelaksana

- Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (PPNS Regular).
- b. Pada tanggal 8 Oktober-6 November 2018 di Pusat Diklat Reskrim Polri Megamendung, Bogor – Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (PPNS Manajerial).



GAMBAR VI.3 DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBENTUKAN PPNS REGULER (POLA 400 JAMPEL)

4. Pembentukan Petugas Intelijen

Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Petugas Intelijen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan memenuhi kebutuhan Petugas Intelijen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai langkah preventif/deteksi dini pencegahan pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran pada tanggal 17 Juli-15 Agustus 2018. Kegiatan dilaksanakan di Graha Waskita Satinduk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Cilendek – Bogor, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI-4 DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBENTUKAN PETUGAS INTELLIJEN DITJEN HUBLA CILENDEK, BOGOR

5. Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai



GAMBAR VI.5 DOKUMENTASI PENYUSUNAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai serta usulan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari-02 Maret 2018 di Hotel Golden Boutique Jakarta, dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang peserta yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, TNI AL, Dit. Polairud Baharkam Polri dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Penyusunan Pedoman Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukan Ahli Bidang Pelayaran.

Telah dilaksanakan Penyusunan Pedoman Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukan Ahli Bidang Pelayaran yang bertujuan untuk peningkatan efektifitas dalam pendampingan hukum, penunjukan ahli dan tata cara pendampingan hukum di bidang pelayaran yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Mei 2018 di Hotel Lorin Sentul Bogor Jawa Barat, dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI.6 DOKUMENTASI PENYUSUNAN PEDOMAN TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI BIDANG PELAYARAN

7. Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Telah dilaksanakan Kegiatan Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan kapal dengan tujuan membantu pelaksanaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) pada kejadian Kecelakaan Kapal di Unit Pelaksana Teknis yang terjadi kecelakaan kapal pada 8 (delapan) lokasi sebagai berikut :

Tabel VI.1 : Kegiatan Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan kapal

NO	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	KSOP Palembang	26-28 Februari 2018
2	UPP Jepara	28-30 Maret 2018
3	UPP Masalembu	11-13 April 2018
4	KSOP Gresik	27-29 Juni 2018

5	UPP Calabai	16-19 Juli 2018
6	KSOP Tanjung Pandan	27-29 Agustus 2018
7	UPP Tg Redeb	3-5 Oktober 2018
8	UPP Amurang	9-11 Desember 2018



GAMBAR VI-7 DOKUMENTASI ASISTENSI PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

8. Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing *Port State Control Officer (PSCO)*

Telah dilaksanakan Kegiatan Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing *Port State Control Officer (PSCO)* yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan pada petugas PSC dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan laporan dari Tokyo MOU. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 (enam) lokasi sebagai berikut :

Tabel VI.2 : Kegiatan Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO)

NO	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	KSOP Dumai	16-18 September 2018
2	KSU Tg Perak	19-20 September 2018
3	KSOP Panjang	23-25 September 2018
4	UPP Buli	23-25 September 2018
5	KSOP Gresik	5-7 November 2018
6	KSOP Kotabaru	6-8 Desember 2018



GAMBAR VI-8 DOKUMENTASI INVESTIGASI PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING (PSCO)

9. Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan Muatan Barang Berbahaya pada Pelayaran

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan Muatan Barang Berbahaya pada Pelayaran dengan tujuan menyusun draft terkait Penanganan Muatan Barang Berbahaya di pelabuhan, kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) lokasi sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21-23 November 2018 di Hotel Novotel Jakarta dengan Jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b. Pada tanggal 25-27 November 2018 di Hotel Golden Boutique Jakarta dengan Jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



GAMBAR VI.9 DOKUMENTASI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENANGANAN MUATAN BARANG BERBAHAYA PADA PELAYARAN

10. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya dengan tujuan untuk menangani permasalahan di lapangan terkait dengan pengawasan muatan barang berbahaya sehingga dipandang perlu untuk dilakukan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya, Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) lokasi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13-16 Agustus 2018 di Hotel Aston Bandung dengan Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b. Pada tanggal 25-28 September 2018 di Hotel Aston Bandung dengan Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



GAMBAR VI-10 DOKUMENTASI BIMBINGAN TEKNIK (BIMTEK) TATA CARA PENGAWASAN DAN PENANGANAN MUATAN BARANG BERBAHAYA

11. Peningkatan Keterampilan Penyelam KPLP Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA)

Telah dilaksanakan Peningkatan Keterampilan Penyelam KPLP Bidang salvage dan PBA dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan personil penyelam KPLP di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar para penyelam dapat mengerti dan memahami prosedur-prosedur keamanan dan melakukan tindakan yang tepat dalam melakukan pekerjaan bawah air, dengan jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 2-6 Desember 2018 teori di kelas di Golden Butik Hotel Jakarta
- b. Tanggal 7-9 Desember 2018 latihan kolam di Kolam Renang Lakespra
- c. Tanggal 10-12 Desember 2018 latihan perairan terbuka di Kepulauan Seribu



GAMBAR VI-1 DOKUMENTASI PENINGKATAN KETERAMPILAN PENYELAM KPLP BIDANG SALVAGE DAN PBA

12. Latihan nasional penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak (*Marine Pollution Exercise*)

Telah dilaksanakan Latihan nasional penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak (*Marine Pollution Exercise*) Tahun 2018, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2018 bertempat di Surabaya dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan instansi lain antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan SAR Nasional, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT.Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Gresik dan cabang Surabaya dan Pengelola Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya dengan tujuan untuk :

- a. Menguji coba dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- b. Menguji coba dan mengevaluasi kemampuan dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- c. Melatih dan meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak di laut, penanggulangan dampak tumpahan minyak dan pengajuan tuntutan ganti rugi pencemaran di laut.
- d. Melatih personil dalam perencanaan, komando dan pengendalian operasi penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- e. Mendorong partisipasi dan keterlibatan *stakeholder* dari perusahaan migas dan perusahaan pelayaran dalam usaha bersama mengontrol dan menanggulangi tumpahan minyak di laut.



GAMBAR VI-12 DOKUMENTASI LATIHAN NASIONAL PENANGGULANGAN PENCEMARAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK (MARINE POLLUTION EXERCISE)

13. *Focus Group Discussion (FGD) Rapat Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Puskodalnas)*

Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* Pusat Komando dan Pengendalian Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (FGD PUSKODALNAS) dalam rangka pembahasan terkait permasalahan yang terjadi serta hambatan yang dihadapi oleh masing-masing instansi anggota PUSKODALNAS kaitannya dengan usaha penanggulangan tumpahan minyak di laut, pada tanggal 12-13 Desember 2018 di Hotel Alila Jakarta, diikuti oleh 50 (lima

puluhan) orang peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI-13 DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RAPAT PUSAT KOMANDO DAN PENGENDALIAN NASIONAL (PUSKODALNAS)

14. Rapat Kerja Teknis Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (RAKERNIS KPLP)

Telah dilaksanakan Rapat Kerja Teknis Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (RAKERNIS KPLP) pada tanggal 28-30 November 2018 di Hotel Merlyn Park Jakarta dengan tema “Penguatan Regulasi Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Tertib Berlayar dan Pengamanan Guna Mendukung Keselamatan Pelayaran Nasional” yang dihadiri oleh 90 (Sembilan Puluh orang) peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI-14 DOKUMENTASI RAPAT KERJA TEKNIS KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (RAKERNIS KPLP)

15. Konsinyering Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP)

Subbidang Sarana dan Prasarana Direktorat KPLP

Telah dilaksanakan Kegiatan Konsinyering Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) Subbidang Sarana dan Prasarana Direktorat KPLP dengan tujuan untuk membahas SOP terkait Pengawakan Kapal Patroli, Pemeliharaan dan docking Kapal Patroli serta penghitungan BBM Kapal Patroli pada tanggal 21-24 November 2018 di Hotel Akmani Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI-15 DOKUMENTASI KONSINYERING PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) SUBBIDANG SARANA DAN PRASARANA DIREKTORAT KPLP

16. Bimbingan Teknis (Bimtek) Awak Kapal Patroli KPLP

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Awak Kapal Patroli KPLP dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, sikap, kewibawaan, kemampuan dan kecakapan peserta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional awak kapal patroli pada UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bimbingan Teknis Awak Kapal Patroli dilaksanakan dalam empat tahap dengan rincian lokasi sebagai berikut:

Tabel VI-3 :
Kegiatan Bimbingan Teknis Awak Kapal Patroli

No	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI	PESERTA
1	16-21 April 2018	Hotel Santika Bekasi	50 Orang
2	16-21 Juli 2018	Hotel Grand Keisha Yogyakarta	50 Orang
3	27-31 Agustus 2018	Hotel Arya Duta Makassar	50 Orang
4	16-21 April 2018	Hotel Sahira Butik Bogor	50 Orang



GAMBAR VI-16 DOKUMENTASI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) AWAK KAPAL PATROLI KPLP

17. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pemeliharaan Kapal Patroli KPLP

Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeliharaan Kapal Patroli KPLP dengan tujuan Untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, kemampuan dan kecakapan peserta diklat dalam pemeliharaan kapal patroli KPLP, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian lokasi sebagai berikut:

- a. Pada Tanggal 6-12 Mei 2018 di Hotel Alila Jakarta dengan jumlah peserta 45 (empat puluh lima) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Pada Tanggal 6-10 Agustus 2018 di Hotel Anaya Bogor dengan jumlah peserta 45 (empat puluh lima) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



GAMBAR VI-17 DOKUMENTASI BIMBINGAN TEKNIK (BIMTEK) TATA CARA PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI KPLP

18. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran

Telah dilaksanakan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dalam rangka menyampaikan standar-standar keselamatan kepada para operator ataupun pengguna jasa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan wawasan mengenai keselamatan pelayaran semakin meningkat dan diharapkan hal ini dapat diperhatikan oleh seluruh *stakeholder* dalam rangka menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan

pelayaran. Kegiatan ini juga dibarengi dengan pemberian *life jacket* kepada para pengusaha pelayaran rakyat. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI-4 : Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran

No	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	KSOP Sibolga	5 April 2018
2	KSOP Muara Angke	12 Juli 2018
3	KSOP Selayar	13 Agustus 2018
4	KSOP Kumai	7-8 Oktober 2018
5	KSOP Bau Bau	3 Oktober 2018
6	KSOP Sorong	26 November 2018
7	KSOP Kalianget dan Probolinggo	5-6 Desember 2018



GAMBAR VI-18 DOKUMENTASI SOSIALISASI KESELAMATAN PELAYARAN

19. Penyusunan LKIP dan LAPTAH

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan LKIP dan LAPTAH sebagai laporan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai pada tanggal 7-9 Maret 2018 di Hotel 101 Bogor dengan peserta perwakilan Subdit Direktorat KPLP dan Bagian Perencanaan sebagai narasumber.



GAMBAR VI-19 DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN LKIP DAN LAPTAH

20. Serah Terima Operasional Kapal Patroli Kelas III dan RIB (Rigid Inflatable Boat) 12 Meter

Telah dilaksanakan kegiatan Serah Terima Operasional Kapal Patroli Kelas III dan RIB (*Rigid Inflatable Boat*) 12 Meter dengan tujuan untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pencatatan aset SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehubungan dilakukannya serah terima aset secara operasional dari Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (PKPLP) kepada UPT Penerima Hasil Pekerjaan Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (PKPLP) yaitu Kapal Patroli Kelas III Paket A (Banten), Kapal Patroli Kelas III Paket C (Cilacap), RIB 12 Meter (Pangkalan PLP Tg.

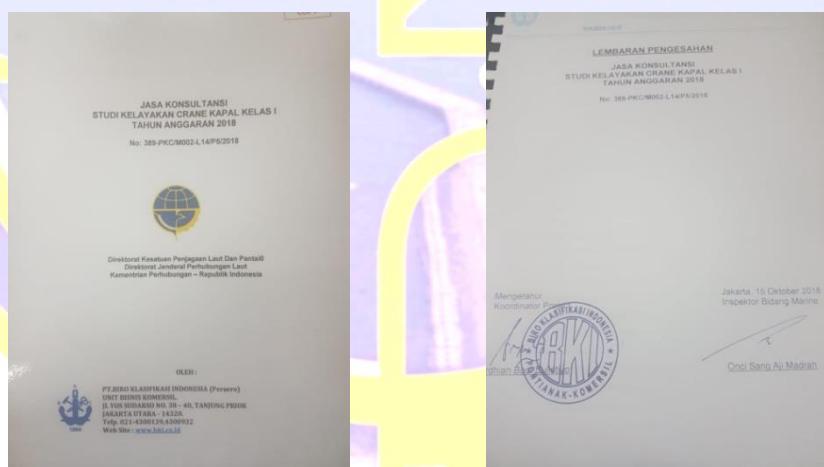
Priok, Pangkalan PLP Tual, Pangkalan PLP Tg. Uban dan Pangkalan PLP Bitung) pada tanggal 4-6 Oktober 2018 di Hotel D'Anaya Bogor dengan peserta 18 (delapan belas) orang.



GAMBAR VI-20 DOKUMENTASI SERAH TERIMA OPERASIONAL KAPAL PATROLI KELAS III DAN RIB (*RIGID INFLATABLE BOAT*) 12 METER

21. Studi Kelayakan Crane Kapal Kelas I

Telah dilaksanakan Studi Kelayakan Crane Kapal Kelas I yang bertujuan untuk menganalisa efisiensi stabilitas kapal pada saat menggunakan crane di Kapal Patroli Kelas I (KN.P Chundamani, KN.P Kalawai, KN.P Gandiva) dan dilaksanakan pada tanggal 4 September-18 Oktober 2018.

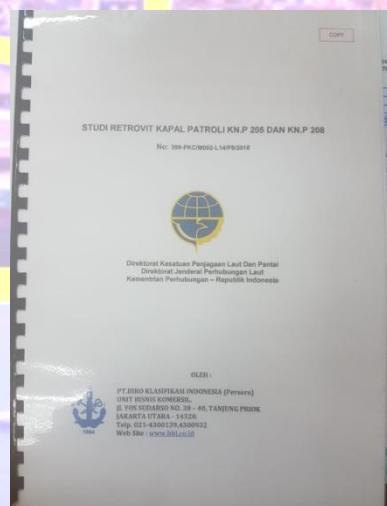


GAMBAR VI-21 DOKUMENTASI STUDI KELAYAKAN CRANE KAPAL KELAS I

22. Studi Retrovit

Telah dilaksanakan Kegiatan studi retrovit yang bertujuan untuk menganalisa kondisi teknis kapal baik konstruksi, permesinan dan peralatan navigasi komunikasi saat ini dan menentukan kelayakan retrovit atau penghapusan. Hasil studi dari PT. BKI kapal tidak layak diretrovit karena terlalu mahal dan kondisi sudah tua. Pada tahun ini dilaksanakan studi retrovit pada 2 (dua) kapal yaitu : (KAPAL di TANJUNG PINANG)

- a. KN.P 205 di Pangkalan PLP Tg. Priok (28 Oktober 2018)
- b. KN.P 208 di Pangkalan PLP Tg. Priok (28 Oktober 2018)
- C.KN.P 323 di KSOP Tanjung Pinang (17 September-1 Oktober 2018)



GAMBAR VI-22 DOKUMENTASI STUDI RETROVIT

B. BIDANG PEMBANGUNAN

- Pengadaan RBB (*Rigid Bouyant Boat*) 6,7 Meter

Telah dilaksanakan Pengadaan 7 (tujuh) unit RBB (*Rigid Bouyant Boat*) 6,7 Meter yang ditempatkan di 7 (tujuh) lokasi dan berfungsi untuk melakukan patroli keselamatan dan keamanan di perairan sebagai berikut

Tabel VI-5 : Kegiatan Pengadaan RBB (*Rigid Bouyant Boat*) 6,7 Meter

No	LOKASI	PAKET
1	Kanpel Batam	RBB Paket A
2	KSOP Kelas I Tanjung Emas	RBB Paket A
3	KSOP Kelas I Dumai	RBB Paket A
4	KSOP Kelas IV Kumai	RBB Paket A
5	KSOP Kelas I Sorong	RBB Paket B
6	UPP Kelas II Poso	RBB Paket B
7	UPP Kelas III Labuhan Lombok	RBB Paket B



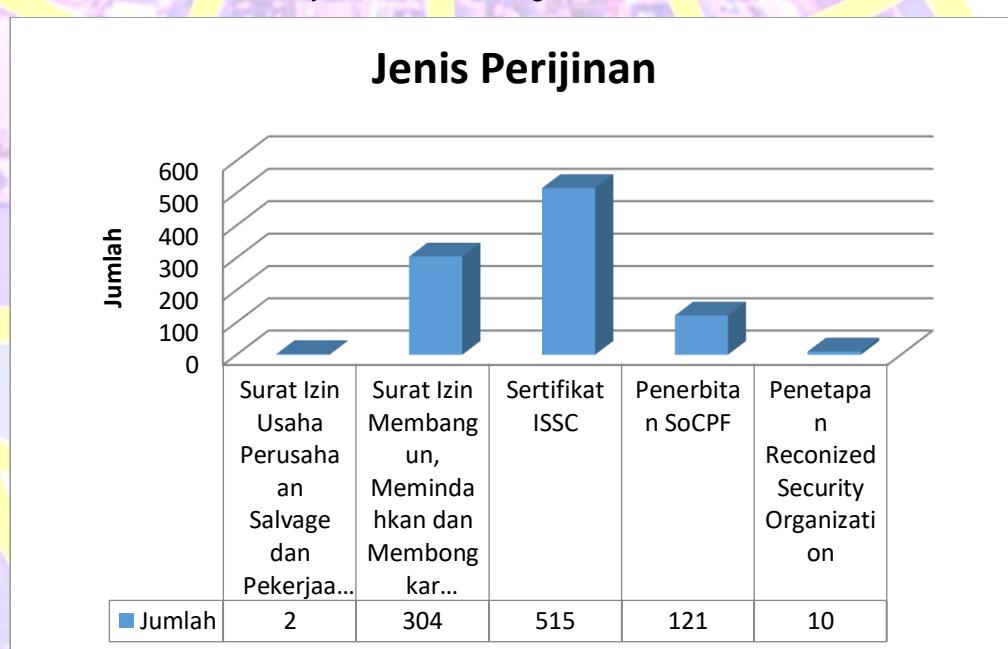
GAMBAR VI-23 DOKUMENTASI PENGADAAN RBB (RIGID BOUYANT BOAT) 6,7 METER

C. PELAYANAN PIHAK KETIGA

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai terkait pelayanan pihak ketiga meliputi :

1. Penerbitan *International Ship Security Certificate (ISSC)*;
2. Penerbitan *Statement of Compliance Port Security (SoCPF)*;
3. Penetapan *Recognized Security Organization (RSO)*;
4. Surat Izin Usaha Perusahaan *Salvage* dan Pekerjaan Bawah Air yang modal seluruhnya dalam negeri;
5. Pemberian Ijin Kegiatan *Salvage* dan Pekerjaan Bawah Air.

Grafik VI.1 Pelayanan Pihak Ketiga



D. Kegiatan Lainnya :

1. *Port Security Regulatory Deep Dive Group Discussion*

Kegiatan workshop dimaksud merupakan tindak lanjut dari kerja sama *Capacity Building* antara Indonesia dan Australia yang telah disepakati dalam *Australia-Indonesia Transport Sector Forum*, yang bertujuan

mengkaji produk peraturan Kementerian Perhubungan terkait implementasi ISPS Code melalui *gap analysis* untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ada pada tanggal 14-15 Agustus 2018 yang dilaksanakan di Anvaya Hotel and Resort, Kuta Bali dan diikuti oleh peserta sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari pejabat/staf, antara lain :

- a. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
- c. Bagian Humas dan;
- d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa.



GAMBAR VI-24 DOKUMENTASI PORT SECURITY REGULATORY DEEP DIVE GROUP DISCUSSION

2. Kunjungan ke fasilitas pelabuhan oleh *U.S. Coast Guard* dan *Port Security Advanced Audit Workshop*

Kegiatan *workshop* dimaksud adalah dalam rangka kerja sama bidang Keamanan Pelabuhan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan *United States Coast Guard*, yang bertujuan untuk observasi penerapan ISPS Code di fasilitas pelabuhan PT. Pertamina-Belawan dan PT. Terminal Peti Kemas Domestik Belawan serta dalam rangka meningkatkan kapasitas para auditor *ISPS Code*, baik auditor internal fasilitas pelabuhan maupun

auditor eksternal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui *Port Security Advanced Audit Workshop*, pada tanggal 4-10 November 2018 yang dilaksanakan di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, dan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari :

- Para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Officer / PFSO*) di Pelabuhan Belawan;
- Staf Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan;
- Staf Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.



GAMBAR VI-25 DOKUMENTASI KUNJUNGAN KE FASILITAS PELABUHAN OLEH U.S. COAST GUARD DAN PORT SECURITY ADVANCED AUDIT WORKSHOP

3. Passenger Screening Skills Course

Kegiatan kursus dimaksud adalah dalam rangka kerja sama *capacity building* bidang Keamanan Maritim antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pemerintah Inggris melalui *United Kingdom Department for Transport*, sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *Port Security Survey* oleh Tim *International Maritime Security Operations Team (IMSOT)*, *UK. Department for Transport* yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petugas keamanan di titik akses dan operator mesin *X-Ray* tentang tata cara

pemeriksaan penumpang dan barang bawaan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-30 Maret 2018, di Ruang VIP Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok dan diikuti oleh peserta berjumlah 18 (delapan belas) orang terdiri dari :

- Petugas keamanan Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok,
- Operator CCTV Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, serta
- Petugas Keamanan Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas.



GAMBAR VI-26 DOKUMENTASI PASSENGER SCREENING SKILLS COURSE

B. Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal Kelas III (*Multiyears 2018-2019*) tidak terlaksana dikarenakan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pelelangan.



BAB VII

**PROGRAM KERJA
TAHUN 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT																
I. PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS																
1	Lanjutan Pembangunan 1 unit kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 54															
2	Supervisi Lanjutan Pembangunan 1 unit kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 54															
II. PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT																
1.	Lanjutan Pembangunan 32 unit kapal Pelayaran Rakyat															
2.	Supervisi Lanjutan Pembangunan 32 unit kapal Pelayaran Rakyat															
3.	Mobilisasi dan Familiiriasasi Hasil Pembangunan 94 unit kapal Pelayaran Rakyat Tahun 2018															
III. SUBSIDI																
1.	Subsidi Pengoperasian 20 unit Kapal Rede															
2.	Penyelenggaraan Mudik Gratis Sepeda Motor Dengan Kapal Laut															
3.	Subsidi Pengoperasian Kapal Khusus Angkutan Ternak Pada 6 Trayek															
4.	Subsidi Angkutan Barang Tol Laut Pada 25 Trayek															
5.	Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Melalui Penugasan Pada 46 Trayek															

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV. PENGUMPULAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI ANGKUTAN LAUT														
1.	Pencetakan Penyajian Data Angkutan Laut													
V. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja														
1.	Rakornas Pelayaran Perintis													
2.	Penyelenggaraan Sail Indonesia													
3.	Rapat Koordinasi Tol Laut													
4.	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Lala													
VI. PENYUSUNAN DOKUMEN NORMA/STANDAR/PROSEDUR/KETENTUAN LALA														
1.	Kajian Kebutuhan Trayek, Tipe Kapal dan Penempatan Kapal untuk Pelayaran Perintis													
2.	Kajian Analisa Kebutuhan Data Dan Proyeksi Perkembangan Angkutan Laut Nasional Untuk Merebut Pangsa Pasar Internasional Dalam Rangka Menuju Beyond Cabotage													
3.	Kajian Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Dan Peralatan Usaha Jasa Terkait													
4.	Kajian Penataan dan Penyelenggaraan TKBM													
5.	Kajian Penggunaan Kapal Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Dalam Negeri													
6.	Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Tol Laut													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Kajian Review Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Perintis													
8.	Kajian Evaluasi Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Laut Khusus Ternak													
9.	Kajian Evaluasi Tarif Penugasan Pelayaran Kapal Ternak													
10.	Kajian Teknis Desain Kapal Type LCT (Landing Craft Tank) Sebagai Feeder Dalam Pengangkutan Barang Tol Laut Di Wilayah Sungai													
11.	Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Kontainer													
12.	Kajian Analisa Kebutuhan Armada Kapal Rede													
13.	Kajian Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Muatan Mineral Dan Batubara													
14.	Kajian Penyusunan Pelaksanaan Biaya Asuransi Perkapalan Angkutan Penumpang Dan Barang Pada Armada Kapal Nasional													
15.	Kajian Pemanfaatan Kapal - Kapal Eksisting Untuk Mendukung Keperintisan Dan Tol Laut													
VII. Pengembangan/ Pembangunan Sistem Informasi														
1.	Perawatan CCTV dan Command Center Pemantauan Angkutan Laut													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Pemeliharaan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik													
3.	Perpanjangan Lisensi Sistem Informasi Pelayanan Publik													
4.	Pengembangan Sistem Inaportnet dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPADU)													
5.	Pembayaran Airtime Tracking System													
VIII. MONITORING DAN EVALUASI														
1.	Monitoring dan Evaluasi Subsidi Kapal Tol Laut													
2.	Monitoring dan Evaluasi Subsidi Kapal Perintis													
3.	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri													
4.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang SIUPAL dan SIOPSUS													
5.	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Laut Lebaran													
6.	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Monitoring Infrastruktur Network Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)													
8.	Koordinasi dengan Unit Kerja / Instansi Lain di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut													
9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Docking Kapal													
10.	Monitoring dan Evaluasi Subsidi Kapal Rede													
11.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perusahaan Keagenan Kapal Asing dan Realisasi Wilayah Terhadap Kapal Asing yang melakukan kegiatan dalam negeri (<i>Check On The Spot</i>)													
12.	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Wilayah Kerja Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Terhadap Kapal Asing yang melakukan kegiatan di dalam negeri (<i>Check On The Spot</i>)													
	VIII. WORKSHOP / FGD / SEMINAR													
1.	Seminar Pengembangan dan Pengusahaan Angkutan Laut													
	IX. SOSIALISASI													
1.	Pembinaan Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan													

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	X. LAIN-LAIN (KEGIATAN RUTIN)													
1.	Penyusunan LKIP, LAPTAH dan PK													
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).													
3.	Bimbingan Teknis Organisasi Keterampilan SDM Bidang Lala													
4.	Penyelenggaraan <i>Sail Indonesia</i>													
5.	Penyelenggaraan Pertemuan <i>BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group</i>													
6.	Rapat Penyusunan Program Kerja													
7.	Penyiapan Bahan Pimpinan Ditjen Hubla Kemenhub dan Menghadiri Sidang Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri													
B. DIREKTORAT KEPELABUHANAN														
I. BIDANG PEMERINTAHAN DAN OPERASIONAL														
1	Workshop Persiapan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan													
2	Workshop Dalam Rangka Updating Database Sistem Informasi Kepelabuhanan													
3	Kegiatan Koordinasi Dengan Op/Upp Dan Instansi Lain Di Bidang Kepelabuhanan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Penyusunan Program Kerja													
5	Penyusunan Dokumen Database Pegawai Direktorat Kepelabuhanan													
6	Penyusunan Sop Data Dukung Pembangunan/Rehabilitasi Faspel													
7	Kajian Finansial Pelaksanaan Pemberian Konsesi Terhadap Pekerjaan Pengerukan/Alur/Kolam Pelabuhan													
8	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip)													
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Pekerjaan Reklamasi													
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Bimbingan Usaha Di Bidang Pengerukan Dan Reklamasi													
11	Revisi Dan Penyusunan Juknis Terkait Pemanduan Dan Penundaan Kapal													
12	Penyusunan Renstra Tahun 2020 - 2024 Eselon II Dit. Kepelabuhanan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Penyusunan Laptah Direktorat Kepelabuhanan													
14	Penyusunan Capaian Kinerja dan e-performance Direktorat Kepelabuhanan													
15	Pendukung Strategis Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan													
16	Pendukung Kegiatan Studi Penyusunan dan Review Batas-Batas Daerah Dilkr Dan Dilkp Pelabuhan													
17	Pendukung Kegiatan Kerjasama Luar Negeri di Bidang Teknis Kepelabuhanan													
18	Pendukung Kegiatan Studi Survey Investigasi Dan Desain Sid Penggerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan													
19	Pendukung Kegiatan Predredge Sounding Pekerjaan Penggerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan													
20	Pendukung Kegiatan Pemantauan Lingkungan Di Pelabuhan													
21	Pendukung Kegiatan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan													
22	Pendukung Kegiatan Strategis Kepelabuhanan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Pendukung Kegiatan Penyusunan Studi Perancangan Fasilitas Pelabuhan													
24	Pendukung Kegiatan Inspeksi Eksisting Di Bidang Perancangan dan Program Fasilitas Pelabuhan													
25	Pendukung Kegiatan Strategis Di Bidang Perancangan dan Program Fasilitas Laut													
26	Pendukung Kegiatan Evaluasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Terminal													
27	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Teknis Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bagi Konsultan Pelaksana, Supervisi Dan Kontraktor Pelaksana, KPA, PPK dan Staf Teknis													
28	Bimtek Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Kepelabuhanan													
29	Bimtek Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan													
30	Bimtek Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan													
31	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Studi SID dan DED													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	Bimbingan Teknis Penggunaan Perairan Pada Tuks, Tersus dan Bangunan Atas Air													
33	Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan													
34	Bimbingan Teknis Penyusunan Batas Batas Dlkr Dan Dlkp Pelabuhan													
35	Monitoring dan Evaluasi Konsesi													
36	Monitoring/ Evaluasi Pengembangan Pelabuhan Melalui BLN													
37	Pendampingan dan Monitoring Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/ Kolam Pelabuhan													
38	Monitoring Klarifikasi Lapangan dan Klarifikasi Data Teknis Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Dan Pekerjaan Reklamasi Berdasarkan SIKK dan SIKR													
39	Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Terminal Khusus Dan Tuks													
40	Monitoring PNBP dan Pendukungnya Terhadap UPP/KSOP/OP													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	Monitoring Evaluasi Pelayanan Terminal Peti Kemas, Curah Cair dan Curah Kering Pada Pelabuhan Umum, Tersus dan Tuks													
42	Fgd Kegiatan STS													
43	Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Di Lingkungan Ditjen Hubla Pada UPT/KSOP/UPP/SATKER													
44	Evaluasi Pelaksanaan Pemanduan Dan Penundaan Kapal													
45	Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan													
46	Evaluasi Penetapan Perairan Pandu													
47	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Ecoport													
48	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Pelabuhan													
49	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	Pendampingan Kegiatan Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Di Bidang Kepelabuhanan													
51	Pengiriman Blanko PUJK													
52	Penyusunan Laporan PK, RKT, RENAKSI													
53	Studi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha													
54	Studi Penyusunan Naskah Akademik Permenhub Mengenai Persyaratan Teknis Fasilitas Pencegahan Pencemaran Di Pelabuhan Termasuk Terminal Khusus													
55	Pembahasan Perencanaan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan													
56	Pembahasan Klarifikasi Surat Izin Kerja Keruk Dan Reklamasi													
57	Uang Saku Rapat Dalam Kantor													
58	Pengadaan Peralatan Bongkar Muat													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	Pemeliharaan Peralatan Survey Untuk <i>Predredge Sounding</i>													
60	Sistem Aplikasi Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan													
61	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Operasional													
62	Implementasi SAI													
B. BIDANG PEMBANGUNAN														
1	Penyusunan Dokumen Studi Perencanaan Dan Pembangunan (FS, SID, RIP) Fasilitas Pelabuhan													
2	Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan DKLR DLKP													
3	Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan 8 Paket/Lokasi													
4	Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL - UPL) Pelabuhan Laut													
5	Penyusunan Studi SID													
6	Kegiatan <i>Predredge Sounding</i> Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/ Kolam Pelabuhan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Penyusunan Studi DED													
8	Studi Penetapan Batas Batas Daerah DLKR dan DLKP Pelabuhan di 10 Lokasi													
9	Studi Survey Investigasi Dan Desain (Sid) Penggerukan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan													
10	Pengembangan Pelabuhan Belawan													
11	Administrasi <i>Belawan Port Project</i>													

C. DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN**I. Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas, dan Garis Muat Kapal**

1.	Monitoring dan Evaluasi Garis Muat Kapal, Stabilitas dan Uji Coba Berlayar													
2.	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kelaikan Peti Kemas													
3.	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pembangunan dan Perombakan Kapal													
4.	Assesment Badan Klasifikasi sebagai Organisasi yang Ditunjuk													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(Recognize Organization) untuk Menjalankan Fungsi <i>Statutory</i>													
5.	Kajian Teknis dan Perencanaan Mesin <i>Outboard</i> pada Kapal <i>Fiberglass</i>													
6.	Konsinyering Penyiapan Bahan Sidang IMO Sub Komite <i>Ship Design and Construction (SDC)</i> dan <i>Ship System and Equipment (SSE)</i> serta <i>Carriages of Cargoes and Container (CCC)</i>													
7.	Konsinyering Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal													
8.	Konsinyering Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM.39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan													
II. SUBDIREKTORAT PENGUKURAN, PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL														
1.	Input Data e-Filling													
2.	Monitoring Pengukuran Kapal													
3.	Kegiatan Gerai Perijinan dalam Rangka Percepatan Proses Penerbitan Dokumen Status Hukum Kapal dan Sertifikasi terhadap Kapal Penangkap Ikan													
4.	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Peningkatan Kualitas Tenaga Ahli Ukur Kapal (Up Grading)													
6.	Penyelengaraan Pengukuhan Ahli Ukur Kapal Metode Internasional													
III. SUBDIREKTORAT KESELAMATAN KAPAL														
1.	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Keselamatan Kapal													
2.	Uji Petik Bidang Kelaiklautan Kapal													
3.	Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal													
4.	Pengkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal													
5.	Revalidasi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal													
6.	Kajian Standar Approval Peralatan Keselamatan Kapal													
7.	Penyusunan Norma-Norma Prosedur Peraturan Hukum tentang Keselamatan Kapal													
8.	Rakornis Penyempurnaan NCVS													
IV. SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN														
1.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi <i>ISM Code</i>													
2.	Pengukuhan Auditor <i>ISM Code</i>													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	<i>Baseline Study Manajemen Air Balas</i>													
4.	Kajian Teknis Standard Reception Facilities pada Pelabuhan Berdasarkan Jenis Potensi Limbah yang Bersumber dari Kapal													
5.	<i>Workshop Nairobi Convention</i>													
V. SUBDIREKTORAT KEPELAUTAN														
1.	Penambahan Perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut													
2.	Jasa Sewa VPN Buku Pelaut													
3.	Operasional Dewan Penguji Keahlian Pelaut													
4.	Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Awak Kapal													
5.	Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan													
6.	Pengukuhan Tenaga Instruktur dan Assesor Pelaut													
7.	<i>Workshop Maritime Labour Convention, 2006</i>													
8.	Konsinyering Bahan Sidang ILO terkait MLC dan SID													
9.	Konsinyering Penyiapan Bahan Sidang IMO Terkait HTW													
10.	<i>Surveillance Audit ISO</i>													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi dan Web Portal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan													
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan													
3.	Jiwa Korsa Pegawai di Lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan													
4.	Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran													
5.	Inventarisasi Hasil Kegiatan													
6.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (Laptah) TA 2018 di Lingkungan Ditkapel													
7.	Penyusunan Database Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan													
8.	Penyusunan Target dan Verifikasi Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Perkapalan													
9.	Rekapitulasi Data Persediaan													
10.	Penyusunan Program di Lingkungan Ditkapel													
11.	Penyusunan Laporan BMN													
12.	Workshop Penyiapan Bahan Sidang IMO													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
D. DIREKTORAT KENAVIGASIAN																
I. KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN OPERASIONAL																
1.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kenavigasian terdiri dari:															
	a. Penyusunan Program Kenavigasian															
	b. Anggaran pendukung perencanaan penempatan SBNP, DTT dan penomoranan DSJ;															
2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kenavigasian terdiri dari :															
	a. Monitoring Pembinaan SDM Kenavigasian;															
	b. Monitoring dalam rangka Penataan Alur dan Perlintasan;															
	c. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian;															
	d. Monitoring dan Evaluasi Armada Kenavigasian															
	e. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Serah Terima Belanja Modal Kegiatan Kenavigasian;															
	f. Monitoring Pembangunan Sarana Prasaran Kenavigasian;															
	g. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Non DJPL;															
	h. Monitoring dan Evaluasi Pangkalan Kenavigasian.															

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kenavigasian terdiri dari :													
	a. Pembinaan Teknis Telekomunikasi Pelayaran;													
	b. Refreshment Training Pengoperasian Peralatan Survey Hidrografi (2 angkatan);													
	c. Refreshment Training Simulator VTS Operator;													
	d. Penyertaan Diklat Operator Radio Umum (ORU);													
	e. Mentoring Operator dan Teknisi Telekomunikasi Pelayaran;													
	f. Bimbingan dan Pelatihan Pengoperasian dan Perawatan Kapal Negara Kenavigasian oleh Crew Kapal Negara Kenavigasian;													
	g. Peningkatan Disiplin dan Motivasi SDM Kenavigasian;													
	h. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Kenavigasian;													
	i. Anggaran Pendampingan Perumusan Rencana Strategis Kenavigasian;													
	j. Bimbingan Teknis													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengusulan Kegiatan di Bidang Kenavigasian;													
	k. Bimbingan Teknis Capaian Daya Serap Kegiatan Kenavigasian;													
	I. Bimbingan Teknis Kelompok Pengamatan Laut dalam Penataan Alur dan Perlintasan;													
4.	Penyusunan Dokumen Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan Kenavigasian terdiri dari :													
	a. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Satker;													
	b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) Direktorat Kenavigasian;													
	c. Survey Alur dan Penetapan Alur Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;													
	d. Pemutakhiran Aplikasi E-DSI;													
	e. Survey Alur dan Penetapan Alur Pelayaran di Pelabuhan Bau-Bau;													
	f. Upgrade Aplikasi SISKA Planning Maintenance System Kapal Negara.													
5.	Penyelenggaraan Rapat Kerja / Sosialisasi / Sidang Kenavigasian terdiri dari :													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	a. Mengikuti Sidang <i>Asia Pasific Telecommunication Preparatory Group (APT)</i> ;													
	b. Mengikuti Sidang <i>International Maritime Satelite Organization (IMSO)</i> untuk LRIT;													
	c. Mengikuti Pertemuan International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse untuk Kegiatan VTS Committe;													
	d. Sosialisasi Penerapan SOP VTS pada 10 Lokasi													
	e. Mengikuti Pertemuan Kerjasama Pengelolaan Selat Malaka dan Singapura serta Pertemuan Lainnya Terkait dengan Telekomunikasi Pelayaran;													
	f. Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian;													
	g. Mengikuti Pertemuan Delimitasi dengan Negara-Negara Tetangga di Luar Negeri													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	h. Mengikuti Pertemuan Kerjasama Pengelolaan Selat Malaka dan Singapura (TTEG/CF/PCC) serta Pertemuan Lainnya Terkait dengan SBNP di Luar Negeri;													
	i. Mengikuti Pertemuan <i>Aids to Navigation Fund Committee Meeting 2018</i> ;													
	j. Mengikuti Sidang <i>International Association of Lighthouse Authority (IALA)</i> di Luar Negeri;													
	k. Mengikuti Pertemuan / Rapat Terkait SBNP (Delimitasi dan Rapat Antar Kementerian / Lembaga Lainnya;													
	l. Perjalanan Dinas Mengikuti Pertemuan / Perundingan / Sidang Luar Negeri Terkait Alur Pelayaran													
	m. Bantuan Teknis untuk Sidang Internasional di Bidang Telekomunikasi Pelayaran;													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	n. Mengikuti Working Group Marine Electronic Highway (MEH) Meeting;													
	o. Menghadiri Undangan Rapat Dinas Dalam Kota;													
	p. Menghadiri Undangan Rapat Dinas Luar Kota;													
	q. Mengikuti Sidang Conference Preparatory Meeting for WRC-19 (CPM);													
	r. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor													
	a. Langganan Airtime LRIT;													
	b. Langganan Daya Jasa Pemantauan Pasang Surut Gelombang Laut (E-Pasut);													
	c. Langganan Airtime VMS;													
	d. Langganan SAT AIS Data Subscrition;													
	e. Pemeliharaan LRIT System;													
	f. Pemeliharaan Peralatan Sistem Informasi Kenavigasian (Masnav);													
	g. Pengadaan Konsumable Sistem Informasi Kenavigasian (Masnav);													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	h. Maintenance Aplikasi E-SBNP;													
	i. Pengiriman Blangko PNBP.													
B.	KEGIATAN PEMBANGUNAN													
1.	Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian terdiri dari (dua puluh) unit :													
	a. Pengadaan Boat Survey.													
2.	Pembangunan / Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran terdiri dari :													
	a. Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Perambuan.													
E. DIREKTORAT KENAVIGASIAN														
II. KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN OPERASIONAL														
1.	Pembangunan Kapal Patroli													
	a. Pembangunan Kapal Patroli Kelas III Alumunium (Multiyears Contract)													
	b. Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Alumunium													
	c. Pembangunan Kapal Patroli Kelas V Alumunium													
	d. Pembangunan Kapal Patroli Kelas V Alumunium													
2.	Pembangunan / Pengadaan fasilitas Pedukung Penjagaan Laut dan Pantai													
	a. Sistem Manajemen Informasi (Sim) Kplp													
3.	Penyusunan Dokumen Norma / Standar / Prosedur / Ketentuan Penjagaan Laut dan Pantai													
	a. Review Desain Kapal Patroli Kelas I													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Penjagaan Laut dan Pantai													
	a. Penyusunan Program Anggaran Direktorat Kplp													
	b. Penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja, Dan Evaluasi Rencana Strategis													
5.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penjagaan Laut dan Pantai													
6.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi Ke Iv (Fourth Verification)													
7.	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Dan Prasarana													
8.	Monitoring Evaluasi Klarifikasi Penyelidikan Dan Pengawasan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran													
9.	Monitoring Dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran													
10.	Investigasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Terkait Permasalahan Kapal Asing													
11.	Pendampingan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Mengalami Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran													
12.	Pengawasan Terkait Barang Berbahaya (Imsbc & Imdg Code) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut													
13.	Uji Petik Penyelesaian Perkara Dan Pengawasan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Keselamatan Dan Keamanan Di Laut													
14.	Monitoring Terkait Permasalahan Surat Persetujuan Berlayar													
15.	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Petugas Pemeriksa Kecelakaan Kapal Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan													
16.	Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal													
17.	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) Dan Pengawasan Kapal Berbendara Indonesia Yang Akan Melaksanakan Pelayaran Internasional													
18.	Penilaian Kondisi Teknis Kapal Patroli Kplp Di Upt Ditjen Hubla													
19.	Asistensi Pemeliharaan Kapal Patroli Kplp Ditjen Hubla													
20.	Administrasi Basto Tahun Anggaran 2018 Dan 2019													
21.	Uji Petik Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran													
22.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah Di Laut													
23.	Pelaksanaan Investigasi Awal, Klarifikasi, Dan Atau Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut													
24.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penjagaan Laut dan Pantai													
25.	Pembentukan Keterampilan Boarding Officer													
26.	Pembentukan Keterampilan Menembak Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Ditjen Hubla													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27.	Bimbingan Teknis Awak Kapal Patroli Kplp (2 Angkatan)													
28.	Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeliharaan Kapal Patroli													
29.	Jiwa Korsa Direktorat Kplp													
30.	Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal													
31.	Pengukuhan Penjabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing													
32.	Bimbingan Teknis Petugas Pengadministrasi Penyidikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut													
33.	Penyegaran Petugas Intelejen													
34.	Penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns)													
35.	Bimbingan Teknis Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya													
36.	Bimbingan Teknis Kesyahbandaran													
37.	Bimbingan Teknis Pengawasan Kegiatan Salvage Dan Pekerjaan Bawah Air													
38.	Pembekalan Personil Pemadam Kebakaran Di Perairan Dan Pelabuhan													
39.	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator													
40.	Pembekalan Personil Search And Rescue (Sar) Di Perairan Dan Pelabuhan													
41.	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak Di Laut (Marpolex) Antara Indonesia, Philippine Dan Jepang Di Philippine													
42.	Bimbingan Teknis Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Keamanan Kapal Asing (Psco) Dalam Rangka Penyegaran													
43.	Peningkatan Keterampilan Penyelam Bidang Salvage Dan Pekerjaan Bawah Air													
44.	Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil													
45.	Pembentukan Petugas Intelijen													
46.	Peningkatan Keterampilan Isps Code													
47.	Monitoring Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing (Psco) Untuk Peningkatan													
48.	Penyusunan Dokumen Norma / Standar / Prosedur / Ketentuan Penjagaan Laut dan Pantai													
	a. Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut Dan Pantai													
	b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 Di Lingkungan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai													
	c. Konsinyering Revisi Pm No 55 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal													
	d. Konsinyering Ratifikasi Oil Polution Preparedness And Cooperation Convention													
	e. Penyusunan Prosedur Penegakkan Hukum Di Bidang Pelayaran													
	f. Penyusunan Rekomendasi Dan Langkah Aksi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Hukum													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	g. Penyusunan Prosedur Tetap Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan													
	h. Penyusunan Dokumen Bagi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing Untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Di Kemenpan Rb													
	i. Penyusunan Prosedur Tetap Pemeriksaan Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing													
	j. Penyusunan Protap Tentang Kompetensi Dan Kualifikasi Petugas Penandatangan Spb													
49	Penyelenggaraan Rapat Kerja/Sosialisasi/Sidang Penjagaan Laut Dan Pantai													
	a. Fgd Puskodalnas Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut (Puskodalnas)													
	b. Rakernis Kplp													
	c. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran													
	d. Konsinyering Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm.82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Spb													
	e. Pembahasan Status													

NO	PROGRAM/KEGITAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) TAHUN 2019												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penegakkan Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal													
	f. Pembahasan Prosedur Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran													
	g. Sosialisasi Penanganan Muatan Barang Berbahaya													
	h. Penyuluhan Pedoman Tata Cara Pendampingan Hukum Dan Penunjukan Ahli Di Bid Pelayaran													
	i. Seminar Periodik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Psco													
	j. Implementasi Cic													
	k. Perjalanan Koordinasi													
	l. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan													
	m. Rapat Koordinasi Teknis Petugas Penegak Hukum Tindak Pidana Pelayaran													
	n. Sidang Technical Working Group Pscc Meeting													
	o. Penyusunan Bahan Seminar Dan Sidang Internasional Terkait Maritime Investigation													
	p. Pembahasan Materi Sidang Imo Terkait Implementation If Imo Instrument (Iii Code) Dan Cargo Container Carriage (Ccc Code)													